

# ORANG ASLI PAPUA

## Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc  
Ferdinandus Hurulean, SP  
Ir. Havidz Fatamasya, M.Si  
Prof. Dr. Roni Bawole, M.Si  
Dr. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat**

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3  
Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari  
Papua Barat 98312

# ORANG ASLI PAPUA

**Dalam Pengelolaan Pariwisata  
Berbasis Konservasi  
di Kepala Burung Papua**

## Editor

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun , S.Hut., M.Si

Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

## Desain Cover

Ferdian Mahendra Hamzah

## Diterbitkan dan Dicetak oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

## ISBN

978-623-93246-8-1



## Dicetak dengan Pembiayaan Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)

Provinsi Papua Barat Tahun 2020

### UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- I. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- II. Pengandaan Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- III. Pengandaan Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- IV. Penggunaan untuk kepentingan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mungkin suatu Ciptaan dan / atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produsen Fonogram atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami penulis dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku ***Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua*** yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. Buku ini memuat informasi tentang kawasan pariwisata berbasis konservasi yang terdistribusi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kawasan ini meliputi kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki dari berbagai obyek pariwisata yang ada, sistem pengelolaan berbasis konservasi yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dan dampak dari kegiatan pariwisata tersebut terhadap ekonomi OAP.

Penerbitan buku ini bertujuan untuk pembenahan tata kelola pariwisata berbasis konservasi yang afirmatif, merupakan salah satu jalan menuju peningkatan manfaat ekowisata. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder sehingga mendorong akselerasi manfaat yang adil dan merata diantara OAP.

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis memiliki banyak kawasan konservasi. Beberapa kawasan konservasi ini telah dikembangkan sebagai kawasan pariwisata berbasis konservasi yang sangat tinggi keunggulannya dibanding dengan kawasan lain di Indonesia. Beberapa kawasan wisata berbasis konservasi yang memiliki keunggulan komparatif tinggi sebagai kawasan pariwisata di Papua Barat adalah Raja Ampat, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, dan Cagar Alam Pegunungan Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pariwisata berbasis konservasi merupakan kegiatan pemanfaatan jasa ekosistem/lingkungan untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomi baik langsung, tidak langsung maupun ikutan.

Pada kesempatan ini, kami tim penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat yang telah mengizinkan kami para penulis tergabung dalam tim peneliti Balitbangda melaksanakan penelitian dan sekaligus mendorong dan membantu dalam upaya publikasi buku ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan beserta staf dan Tim Media Balitbangda Provinsi Papua Barat, para penyunting dan pihak percetakan yang sudah membantu sehingga buku ini boleh terbit.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.

Manokwari, 10 Oktober 2020

**Tim Penulis**

## **SAMBUTAN**

### **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan adalah penyebaran informasi kelitbang dan inovasi daerah atau dikenal dengan difusi atau diseminasi dan publikasi. Diharapkan keberadaan Balitbangda Provinsi



Papua Barat mampu mendorong peningkatan publikasi hasil-hasil riset ilmiah dan menjembatani penggunaan hasil-hasil publikasi tersebut dalam pembuatan kebijakan pembangunan di internal pemerintah daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang kita cintai ini, maka saya mengharapkan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu memberikan saran-saran dan rekomendasi taktis kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui data dan informasi ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat saat ini sangat membutuhkan data dan informasi yang akurat dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan daerah, sekaligus perlu mendapatkan hasil penilaian terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sehingga akan segera melakukan upaya perbaikan demi tercapainya tujuan pembangunan. Disamping itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat juga merasa

perlu untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat untuk diketahui oleh berbagai pihak termasuk masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan strategis pembangunan ekonomi di Papua Barat adalah dengan membangun **Pariwisata Berbasis Konservasi** yang berlokasi di seluruh Provinsi Papua Barat.

Penerbitan buku “**Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua**” sangat penting dalam rangka menjawab kebutuhan akan data dan informasi sekaligus berisi hasil penilaian terhadap kebijakan yang dibuat terkait pembangunan pariwisata berbasis konservasi dengan pelibatan OAP, karena merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat pada tahun 2019. Secara ringkas bisa disampaikan disini bahwa buku ini memuat informasi tentang kawasan pariwisata berbasis konservasi yang terdistribusi di wilayah Provinsi Papua Barat, potensi kawasan tersebut, sistem pengelolaan pelibatan OAP serta dampaknya terhadap ekonomi OAP.

Saya menyampaikan ucapan selamat kepada para penulis dan semua pihak yang telah terlibat dan berhasil dalam publikasi buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan merupakan sumbangsih kecil dari Balitbangda dalam menunjang pembangunan daerah di Provinsi Berkelanjutan Papua Barat. Terima kasih dan Tuhan Memberkatii!.

Manokwari, 10 Oktober 2020

**Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Penerbit	
Kata Pengantar	
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat	

### **1. ORANG ASLI PAPUA DAN WISATA BERBASIS KONSERVASI**

1.1. Wilayah Penghidupan Orang Asli Papua (OAP) .....	9
1.2. Demografi Orang Asli Papua .....	13
1.3. Pariwisata Berbasis Konservasi .....	15

### **2. POTENSI DAN DAYA TARIK OBYEK WISATA KAWASAN KONSERVASI**

2.1. Peranan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) .....	20
2.1.1. Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) .....	23
2.1.3. KKP Sorong Selatan .....	26
2.1.4. KKP Teluk Bintuni .....	27
2.1.5. KKP Makbon .....	28
2.1.6. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Papua Barat .....	29
2.1.7. Taman Nasional Teluk Cenderawasih .....	29
2.1.8. Suaka Margasatwa Laut Sabuda Tutturuga .....	30
2.1.9. Cagar Alam Laut Kofiau .....	31
2.2. Kawasan Konservasi Daratan .....	31
2.2.1. Kawasan Konservasi di Raja Ampat .....	31
2.3. Kawasan Konservasi di Pegunungan Arfak .....	35
2.4. Kawasan Konservasi di Kaimana .....	37
2.5. Potensi Kawasan Konservasi sebagai Obyek Daya Tarik Wisata .....	40
2.5.1. Potensi wisata di Kawasan Konservasi Pegunungan Arfak .....	40
2.5.2. Potensi Wisata Kawasan Konservasi Raja Ampat .....	46
2.5.3. Potensi Wisata di Kawasan Konservasi Kaimana .....	51

### **3. KEADAAN EKONOMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ORANG ASLI PAPUA**

3.1. Kontribusi Relatif Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Konservasi .....	53
3.1.1. Keadaan Ekonomi Wilayah Kabupaten Kaimana .....	54
3.2. Keadaan Ekonomi Wilayah Kabupaten Raja Ampat .....	61
3.3. Kondisi Ekonomi Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak .....	68
3.4. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Orang Asli Papua .....	76
3.4.2. Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat .....	85
3.5. Kontribusi Kawasan Konservasi Daratan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi OAP .....	98
3.5.1. Kabupaten Raja Ampat .....	98

### **4. MANFAAT BISNIS PARIWISATA BAGI ORANG ASLI PAPUA PEMBELAJARAN DARI RAJA AMPAT**

4.1. Perkembangan Pawisata Berbasis Konservasi di Raja Ampat .....	104
4.1.1. Sejarah.....	104
4.1.2. Strategi Penghidupan Rumah Tangga.....	112
4.1.3. Aset Penghidupan OAP Raja Ampat .....	114
4.1.4. Keluaran Strategi Penghidupan.....	133

### **5. TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI**

5.1. Tata Kelola .....	139
5.2. Kebijakan dan Tatanan Tatakelola Ekowisata.....	148
5.3. Konteks kerentanan .....	168

### **6. PENUTUP**

### **PUSTAKA**



# !

# ORANG ASLI PAPUA DAN WISATA BERBASIS KONSERVASI

## 1.1. Wilayah Penghidupan Orang Asli Papua (OAP)

Papua Barat, Provinsi seluas 97.024,37 km<sup>2</sup> memiliki 1 kota 12 kabupaten diantaranya berada di tepi pantai, danau dan sungai, pulau-pulau serta pegunungan dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 963.600 jiwa. Wilayah ini memiliki hutan, laut dan pesisir pantai yang luas dan kaya serta didiami oleh beberapa suku-suku asli (orang asli Papua) yang secara adat membagi ruang hidupnya ke dalam wilayah adat Bomberay dan Domberay. Wilayah tersebut secara *de facto* terdapat klaim teritori, sumberdaya alam, penguasaan fisik, identitas kebudayaan, kearifan lokal bahkan religiusitas.

Orang Asli Papua (OAP) menurut UU Otsus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua. Sebutan orang asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumberdaya alam. MHA adalah masyarakat

asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya (UU Otsus, 2001).

Mengikuti biogeografi daratan dan perairan, orang asli Papua berburu dan meramu, mencari ikan serta berkebun secara turun - temurun dari wilayah laut dan pesisir sampai ke pegunungan. Interaksi OAP dengan hutan, laut dan pesisir sudah berevolusi lintas generasi. Sampai saat ini penggunaan lahan di wilayah-wilayah hak ulayat OAP sangat rendah terutama untuk kegiatan pertanian menetap, karena masyarakat tetap melakukan perladangan berpindah dengan sistem *slash and burn* pada luasan hutan yang sangat kecil yakni rata-rata 0,25 hektar. Berburu dilakukan dalam dua bentuk yakni bentuk musiman secara berkelompok. Misalnya berburu pada musim hujan, berburu ke dusun yang jauh ke suatu “befak” dengan jangka waktu tertentu maupun yang bersifat intermetin secara individu (Tabisu, 2011). Selain itu, dilakukan juga kegiatan meramu secara individu maupun kelompok untuk memungut dan mencari hasil alam terutama untuk kebutuhan konsumtif. Makanan yang umumnya dipanen dari hutan berupa sayur-sayuran (pakis dan genemo), telur ayam hutan, telur burung maleo, menokok sagu, mengambil ulat pohon sagu kering, memasang jerat babi hutan, memasang sungga penangkap babi hutan, menangkap kuskus, mencari udang kali, menangkap ikan air tawar dan berburu kelelawar dan masih banyak aktivitas meramu lainnya. Penduduk yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melakukan usaha penangkapan ikan, budidaya rumput laut, mencari kerang, taripang, ‘bameti”, “balobe” dan “molo ikan”. Misalnya masyarakat di Distrik Makbon yang sebagian besar sebagai nelayan, aktifitas perikanan tangkap dilakukan sepanjang hari pada musim teduh. Pada musim angin (gelombang), aktivitas masyarakat lebih konsen pada kegiatan perkebunan. Kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada potensi sumberdaya pesisir dan laut.

Inilah wilayah penghidupan (sumber pangan) OAP yang kemudian menciptakan suatu sistem sosial ekonomi, dimana sistem sosial ekonomi ini berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena kontribusi keadaan ekologisnya. Disisi lain hutan, laut dan pesisir juga menyediakan manfaat sebagai sumber obat-obatan, konstruksi, dan budaya.

Wilayah-wilayah penghidupan tersebut secara *de jure* sebagian berada dalam kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi di Papua Barat tersebar dari laut sampai daratan dengan luasan yang bervariasi. Beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Kaimana dan Pegunungan Arfak berada dalam kawasan konservasi.

Pulau Waigeo sebagai salah satu kawasan konservasi di Raja Ampat misalnya didiami oleh beberapa suku atau anak suku asli yang dikelompokkan ke dalam Suku Wawiyai, Kawe, Syam, Laganyan serta Ambel (Waren). Di Pulau Misool berdiam suku Matbat, Misool, Biga, dan Matlau dan Pulau Batanta berdiam Suku Batanta. Di Pegunungan Arfak berdiam Suku besar Arfak yang terbagi ke dalam beberapa Suku asli yakni Suku Hatam, Meyakh, Moile, dan Sougb. Demikian halnya di wilayah Kaimana terdapat Suku Miereh, Maerasi, Irarutu, Koiway, Oburau, Madewana, dan Kuri. Suku-suku ini juga membangun bentuk-bentuk konservasi secara konvensional dari tradisi lintas generasi seperti Sasi, Sinara, dan Igya Ser Hanjop. Dalam konsep Igya Ser Hanjop yang dipraktikkan Suku Arfak hutan disebut juga sebagai dapur hidup/ibu yang memberi makanan (ayamfos). Di wilayah Pegunungan Arfak terutama pada masyarakat Hatam, kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbagi atas 4 (empat) bagian yakni *susti*, *bahamti*, *nimahamti* dan *tumti* (Laksono dkk., 2001). *Susti* berfungsi sebagai kawasan yang diusahakan oleh masyarakat baik untuk tempat tinggal maupun untuk berkebun. *Nimahamti* dimanfaatkan untuk mengambil kayu dengan persetujuan kepala

suku. *Bahamti* secara ekologis merupakan kawasan hutan yang berlumut dan terdapat di wilayah yang sangat curam. *Tumti* adalah wilayah puncak gunung. Tentunya yang akan mendukung penghidupan Suku Hatam adalah wilayah Susti dan Nimahamti. Praktik ini secara jelas membuktikan adanya “pembagian ruang hidup” dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi Suku-suku di wilayah Raja Ampat dan Kaimana bentuk konvensional konservasi adalah Sasi dan Sinara. Sasi mengedepankan aspek pelestarian dan menjaga stok sumberdaya alam, sementara Sinara memberikan akses legal kepada pihak lain untuk mengelola sumberdaya di wilayah petuanan/hak ulayat.

Selain Raja Ampat, Kaimana dan Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat juga memiliki beberapa kawasan konservasi di kabupaten/kota lainnya, sehingga secara keseluruhan luas kawasan konservasi di Papua Barat baik darat maupun laut mencapai 24,83% dari luas kawasan hutan dan perairan (SK. Mehut Nomor 783/2014). Meskipun memiliki kawasan konservasi yang luas namun buku ini berfokus pada wilayah Kaimana, Raja Ampat dan Pegunungan Arfak. Tentunya pemilihan ketiga kawasan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut: wilayah-wilayah ini merepresentasikan kawasan konservasi pada bentang lahan pegunungan, bentang laut pesisir pantai-darat dan pesisir pantai laut dengan pulau-pulau kecil. Beberapa kawasan konservasi itu berada dalam arahan nasional sebagai kawasan Strategis Nasional (KSN). Mewakili wilayah adat Domberay dan Bomberay.

Sejak tahun 1990-an akses OAP ke dalam kawasan konservasi dari waktu ke waktu mengalami penurunan terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya. Seringkali OAP merasa adanya manfaat yang justru tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, tapi sebenarnya turut dihasilkan dari eksistensi mereka, entah dengan kerja, peninggalan sejarah, ataupun pengakuan yang normatif sifatnya. Gambaran seperti ini sedikit banyak menunjukkan bahwa masalah ketidakadilan, khususnya dalam penguasaan sumberdaya, memiliki dimensi dinamika sosial yang penuh kompleksitas.

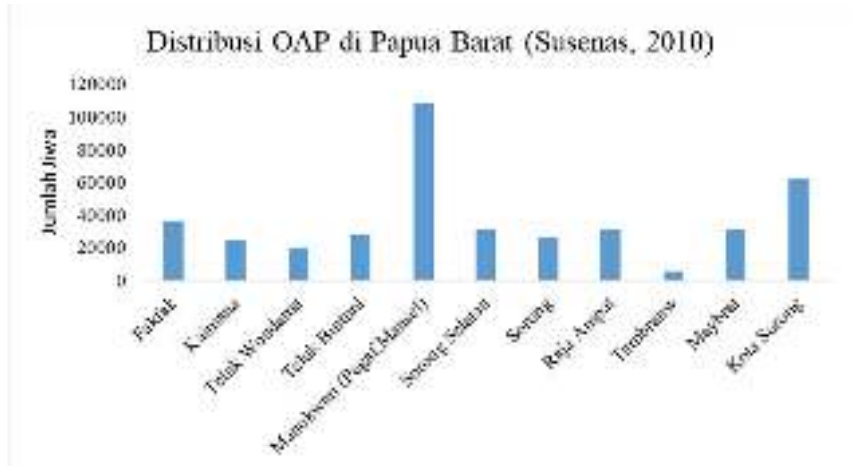
Namun dengan pendekatan pembangunan yang bertujuan meniadakan *trade off* antara aspek konservasi dan pembangunan ekonomi yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dan institusi lain di luar pemerintah maka OAP yang berada dalam kawasan konservasi secara relatif mulai merasakan manfaat eksistensi kawasan konservasi. Meskipun secara absolut manfaat langsung belum dirasakan secara signifikan, tetapi manfaat tidak langsung dari keberadaan kawasan konservasi memiliki nilai ekonomi potensial yang sangat besar. Studi-studi valuasi sumberdaya hutan dan ekosistemnya di wilayah konservasi membuktikan bahwa nilai ekonomi potensial kawasan konservasi sangat besar. Sebagai contoh estimasi total nilai keanekaragaman hayati di TWA Gunung Meja sebesar Rp 801.248.208.618. Pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh masyarakat sekitar kawasan diestimasi memiliki nilai ekonomi sebesar Rp10.476.472.882 dengan rata-rata nilai ekonomi ekstraksi per rumah tangga Rp.1.471.621 tiap satu tahun (Papuana, 2017). Nilai ekonomi potensial bila dikelola dengan mekanisme yang mampu menciptakan transaksi pasar yang jelas akan menciptakan situasi dimana masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi menerima manfaat ekonomi secara langsung dan mengubah stigma *cost centre* pada kawasan konservasi menjadi *benefit centre*.

## 1.2. Demografi Orang Asli Papua

Jumlah OAP di wilayah Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 53,26% dari total Penduduk tahun 2010 (Bappeda dan BPS Papua Barat, 2011). Berdasarkan jumlah tersebut 26,62% berada di wilayah Manokwari (termasuk Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak).

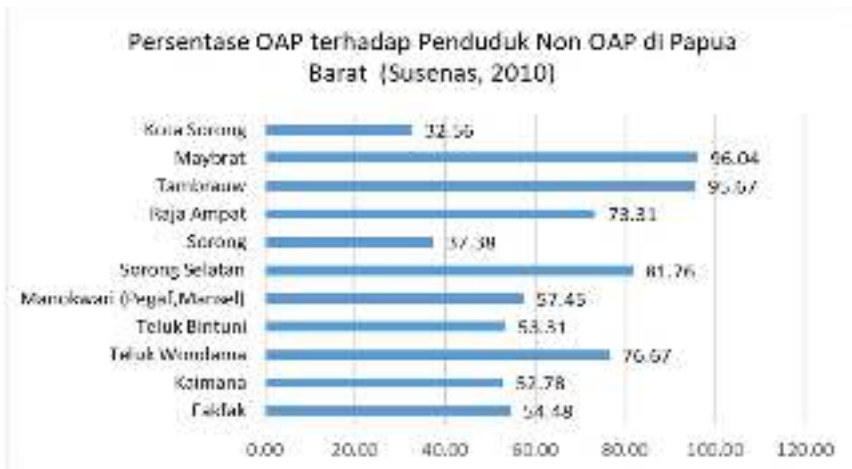
## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua



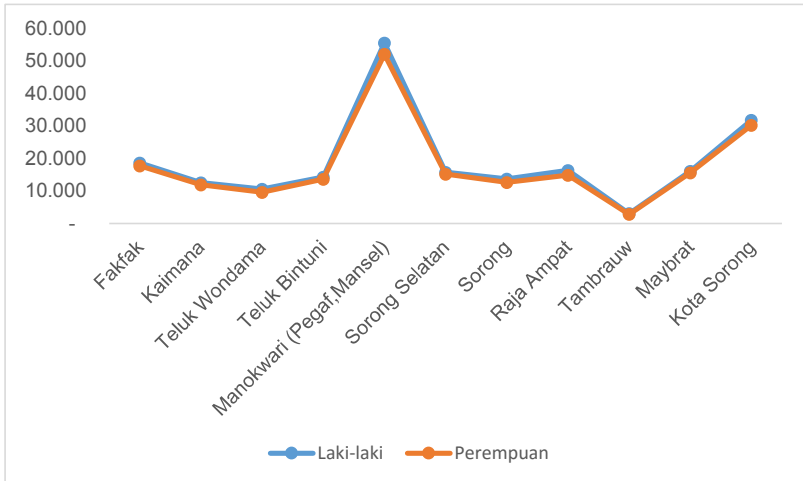
**Gambar 1.1.** Jumlah dan Penyebaran OAP di Papua Barat (Susenas, 2010)

Bila jumlah OAP dibandingkan dengan kelompok masyarakat migran lainnya maka yang memiliki proporsi terbesar keberadaan OAP adalah Maybrat (96,04%) dan Tambrauw (95,67%). Wilayah yang jumlah OAP paling sedikit adalah kota Sorong (32,56%) dan Kabupaten Sorong (37,38%).



**Gambar 1.2.** Proporsi OAP terhadap Non OAP di Papua Barat (Susenas, 2010)

Bila dilihat dari jenis kelamin sebaran OAP di Papua Barat lebih dominan kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita.



**Gambar 1.3.** Distribusi Penduduk OAP Berdasarkan Jenis Kelamin di Papua Barat

Perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan rata-rata 106,23. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Beberapa wilayah seperti Maybrat dan Raja Ampat memiliki rasio yang lebih tinggi yakni 109.

### 1.3. Pariwisata Berbasis Konservasi

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis memiliki banyak kawasan konservasi. Beberapa kawasan konservasi ini telah dikembangkan sebagai kawasan pariwisata berbasis konservasi yang sangat tinggi keunggulannya dibanding dengan kawasan lain di Indonesia. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu

dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu dan menghabiskan waktu senggang atau waktu libur (Zalukhu, 2009 seperti dikutip Saputro, 2011). Menurut Fandeli dan Nurdin (2005), wisata yang memadukan unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat dinamakan ekowisata. Wisata ini memberikan dampak langsung terhadap konservasi kawasan, berperan dalam usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan mendorong konservasi dan pembangunan berkelanjutan (Darsiharjo et al. 2016).

Beberapa kawasan wisata berbasis konservasi yang memiliki keunggulan komparatif tinggi sebagai kawasan pariwisata di Papua Barat adalah Raja Ampat, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, dan Cagar Alam Pegunungan Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat terdiri dari lima wilayah pengelolaan, yaitu Wilayah I Ayau Asia, Wilayah II Teluk Mayalibit, Wilayah III Selat Dampier, Wilayah IV Kofiau dan Wilayah V Misool serta 1 Wilayah KKP Kawe dengan pengelolaan secara Kolaboratif. KKP merupakan inisiatif pemerintah daerah Raja Ampat sejak tahun 2008 dan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia Nomor 36/Kepmen-KP/2014 ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Sebagaimana KKP Raja Ampat, Teluk Triton yang terletak di Kabupaten Kaimana merupakan KKP yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2014. Sasaran umum pengelolaan KKP Kaimana meliputi 4 (empat) wilayah pengelolaan, yaitu wilayah pengelolaan Buruway, Kaimana, Teluk Arguni serta Etna dan Yamor. Selanjutnya, KKP ini dicadangkan oleh Gubernur Propinsi Papua Barat dengan SK Nomor 523/60/3/2018 untuk diajukan penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.



Selain wilayah pesisir dan laut, Provinsi Papua Barat juga memiliki kawasan konservasi yang luas di wilayah pegunungan, yakni wilayah Pegunungan Arfak. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi Pegunungan Arfak masuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam bentuk Cagar Alam dengan luas 158.414 hektar. Sejak tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 820/KPTS/Um/II/1982 kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan luas 68.325 ha. Luas ini kemudian berubah menjadi 63.750 ha. Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA) berada di ketinggian 15 m hingga lebih dari 1.000 mdpl dengan gunung Humeihbou sebagai puncak tertinggi. Meskipun sebagian besar kawasan ini berupa pegunungan, wilayah ini memiliki koridor ke daerah dataran rendah, sehingga membentuk unit ekologi yang lengkap. Sedikitnya 320 jenis burung, 350 jenis kupu-kupu dan 110 jenis mamalia, serta 2.770 anggrek ditemukan di wilayah ini.

Pada kawasan-kawasan konservasi ini telah berkembang usaha-usaha pariwisata alam dengan memanfaatkan keunikan obyek dalam kawasan tersebut. Raja Ampat dan Kaimana berkembang kegiatan pariwisata bahari, yang memanfaatkan bentang laut dan perairan berterumbu karang, serta berbagai jenis biota kharismatik seperti hiu paus, pari manta dan berbagai jenis burung cenderawasih. Kawasan pegunungan Arfak berkembang wisata alam pegunungan berupa *Bird watching* (pengamatan burung), pengamatan kupu-kupu sayap burung, keindahan bentang alam sekitar danau Anggi Gita dan Anggi Giji, pengamatan flora dan fauna liar serta agrowisata kebun campuran.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pemerintah Daerah mulai mengembangkan pariwisata berbasis konservasi yang saat ini telah menjadi trend dalam kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan bahwa pariwisata berbasis konservasi merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan

secara optimal. Dengan demikian, untuk pengembangannya di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekowisata.

Pengembangan pariwisata berbasis konservasi lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan jasa ekosistem, disamping untuk perlindungan biodiversitas sumberdaya alam, atau manfaat langsung berupa hasil hutan bukan kayu (sub sektor kehutanan) dan kegiatan perikanan tangkap (sub sektor perikanan). Jasa ekosistem ini adalah manfaat/nilai alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jasa ini merupakan landasan sistem sumberdaya alam dan digunakan untuk menggambarkan interaksi manusia dan alam. Demikian, jasa ekosistem mendukung ekosistem alamiah sumberdaya, mata pencaharian dan kesejahteraan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Konsepsi ini menggambarkan interaksi yang berbeda dalam proses menghubungkan struktur dan proses biofisik lingkungan dengan manfaatnya bagi manusia. Hal ini menggambarkan ekosistem tidak hanya sebagai penyedia jasa ekosistem tetapi kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan.

Pariwisata berbasis konservasi merupakan kegiatan pemanfaatan jasa ekosistem/lingkungan untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomi baik langsung, tidak langsung maupun ikutan. Manfaat langsung dapat dirasakan oleh pengelola kawasan wisata atau objek dan stafnya. Manfaat tidak langsung dapat dirasakan oleh pengelola hotel/homestay/resort, dan manfaat ikutan dapat dirasakan oleh penyedia souvenir.

Pengembangan pariwisata berbasis konservasi di Raja Ampat, Teluk Triton, dan Pegunungan Arfak telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan orang asli Papua. Perubahan dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sebagai akibat konservasi sumberdaya alam dan habitat, serta

kegiatan pariwisata telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Buku ini mengulas perubahan-perubahan yang telah terjadi soal kehidupan OAP yang berusaha dalam bidang pariwisata baik sebagai pengusaha wisata, penyedia *home stay*, *tour guide*, penyedia transportasi (*speed boat* dll).

# 2

## POTENSI DAN DAYA TARIK OBYEK WISATA KAWASAN KONSERVASI

### 2.1. Peranan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

KKP adalah alat manajemen yang penting secara global yang diharapkan untuk: (1) mengendalikan dan mengelola aktivitas manusia dan penggunaan laut; (2) mempromosikan pemulihan populasi ikan yang dieksploitasi; (3) melestarikan atau memulihkan habitat, keanekaragaman hayati, dan mempertahankan jaring makanan; dan (4) mengelola dan meningkatkan layanan ekosistem seperti penyediaan makanan, produksi dan kegiatan rekreasi (Liquete *et al.* 2013). Sebagian besar KKP diimplementasikan untuk mengurangi tekanan akibat kegiatan manusia, mengurangi kekuatan faktor-faktor pengubah ekosistem laut, dan mengurangi atau mengendalikan mortalitas penangkapan ikan (Claudet *et al.* 2008, 2010). Awalnya, KKP khususnya suaka alam perairan/pesisir secara pragmatis ditujukan untuk menghilangkan tekanan penangkapan ikan, melarang pengambilan sumberdaya, melindungi spesies laut yang hampir punah, habitat, perikanan, dan ekosistem, dan untuk memberikan kenikmatan publik bagi masyarakat (Mora *et al.* 2011). Perkembangan selanjutnya, KKP digunakan sebagai alat manajemen untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan, pariwisata, dan

industri perikanan. Sistem zonasi dalam KKP ditetapkan sesuai dengan tujuan manajemen dan target spesies yang dilindungi. KKP dapat pula mengurangi konflik dan memungkinkan ko-eksistensi berbagai penggunaan kawasan dan sumberdaya.

Pembentukan zona sesuai dengan peruntukan digabungkan dengan penetapan atau pembatasan kegiatan pemanfaatan yang mudah diidentifikasi oleh berbagai pengguna. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan dampak insidental berupa pelanggaran terhadap zona. Informasi publik tentang penggunaan kawasan yang diizinkan di setiap zona yang berbeda akan mendorong partisipasi komunitas lokal dan pengguna lain untuk berkontribusi pada proses manajemen KKP (Hargreaves-Allen *et al.* 2011). Kepatuhan peraturan terhadap zona yang dibuat dalam KKP tergantung pada apakah pengguna memahami peraturan yang dirancang untuk memastikan ketaatan dan keberkelanjutan sumber daya laut. Jika kepatuhan baik, biaya manajemen tambahan untuk memastikan penegakan zonasi akan berkurang. Kegiatan konservasi telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dengan potensi sumberdaya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu mengelola sumberdaya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1990 sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Meskipun demikian, landasan hukum konservasi sumberdaya ikan sesungguhnya baru lahir pada tahun 2004 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Secara operasional konservasi sumberdaya ikan tertuang dalam Peraturan Pemerintah 60 tahun 2007 yang diikuti peraturan teknis lain berupa pedoman dan peraturan menteri. Lahirnya peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum guna mendukung upaya konservasi sumberdaya ikan di Indonesia dan kegiatan pengelolaan KKP semakin intensif dilakukan.

Dari aspek perikanan, KKP merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (UU 31/2004 tentang Perikanan). Dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP didefinisikan sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan sistem yang dilindungi, dilestarikan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Permen KP 17/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Inisiatif pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem menunjukkan peningkatan capaian yang luar biasa.

Penentuan Kawasan konservasi memperhatikan keberadaan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Penetapan kawasan konservasi secara efektif diwujudkan guna memberikan manfaat ekologis, sosial-ekonomi dan budaya bagi masyarakat.

Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan oleh Pemerintah Propinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014. Pembagian Kawasan Konservasi disesuaikan dengan Pasal 20 ayat 2 PerMen KP No 23 Tahun 2016, yang dikategorikan atas Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP dan dijabarkan dalam zona:

1. zona inti;
2. zona perikanan berkelanjutan;
3. zona pemanfaatan; dan
4. zona lainnya.

Selain Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kawasan konservasi perairan

dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Setiap kawasan konservasi dapat memiliki satu atau lebih zona inti sesuai dengan luasan, karakteristik biofisik, biologis, kondisi sosial ekonomi dan budaya.

### 2.1.1. Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)

KKPN Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat dan Laut sekitarnya (KK-07) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.64/MEN/2009, dengan luas 60.000 hektar. SAP Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya (KKP-08) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/KEPMEN-KP/2009, dengan luas 271.630 hektar. Kedua KKPN tersebut terbagi kedalam beberapa zona yaitu:

- Zona inti (KKP-ZI)
- Zona pemanfaatan (KKP-ZP)
- Zona perikanan berkelanjutan (KKP-ZPB)
- Zona sasi (KKP-S)

### 2.1.2. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

#### 1. Taman Wisata Perairan Raja Ampat



**Gambar 2.1** Pemandangan hamparan kepulauan Raja Ampat dari bukit Pianemo

Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat ditujukan untuk perlindungan dan berfungsi dalam mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan, sebagai kawasan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan daerah. KKP Kepulauan Raja Ampat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Kepmen-KP/2014. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa KKP ini dikelola sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Raja Ampat. Luas keseluruhan Taman Wisata Perairan Raja Ampat ini mencakup 1.348.690 hektar yang terdiri dari 6 area yaitu Area 1 - Perairan Kepulauan Asia dan Ayau, Area 2- Teluk Mayalibit, Area-3- Selat Dampier, Area 4- Perairan Kep.Misool, Area 5- Perairan Kep. Kofiau-Boo, dan Area 6- Perairan Kep.Fam.



**Gambar 2.2**  
Pemandangan Kolam  
Sisir Kaimana



## **2. Taman Wisata Perairan Kaimana**

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana (KKPD Kaimana) terletak di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. KKPD ini pada awalnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kaimana. Namun, karena belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka proses pencadangan dilakukan kembali oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Proses pencadangan dilakukan melalui Surat Bupati Kaimana kepada Gubernur Papua Barat Nomor 556/2123, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pengusulan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana di Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor 523/60/3/2018 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana Di Provinsi Papua Barat.

Dalam SK Gubernur tersebut pencadangan KKPD Kaimana dengan status Taman Wisata Perairan (TWP), dengan luas keseluruhan yaitu 435.495 hektar. Area pengelolaan yang terdiri dari Area Pengelolaan Buruway, Arguni, Teluk Etna, dan Kaimana.

## **3. Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch Fakfak**

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Fakfak telah dicadangkan oleh Gubernur Papua Barat pada tahun 2017. Pencadangan ini berdasarkan Surat Usulan Inisiatif Pembentukan Kawasan KKPD Fakfak dari Bupati Fakfak kepada Gubernur Papua Barat Nomor 523.2/497/DKP/FF/2016 tanggal 13 Desember 2016, serta Berita Acara Deklarasi Adat Pengukuhan Wilayah Teluk Nusalasi *Van Den Bosch* Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas 251.000 hektar oleh Petuanan Atiati pada tanggal 20 November 2016 dan Berita Acara Deklarasi Adat Pengukuhan Wilayah Teluk Berau sebagai

Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas 99.000 hektar oleh Petuanan Wertuar pada tanggal 21 November 2016, Petuanan Arguni dan Pikipik Sekar pada tanggal 22 November 2016.

Pencadangan KKPDK Fakfak tertuang dalam SK Gubernur Papua Barat Nomor 523/136/7/2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi *Van Den Bosch* di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Luas KKPDK yang dicadangkan secara keseluruhan adalah 350.000 hektar, dengan area pengelolaan yang terdiri dari:

- Area I: Taman Pesisir Teluk Berau terletak di Distrik Kokas hingga Arguni seluas 99.000 hektar
- Area II: Taman Pesisir Teluk Nusalasi *Van Den Bosch* terletak di Distrik Karas seluas 251.000 hektar

#### **4. Taman Pesisir Jeen Womom Tambrau**

Taman Pesisir Jeen Womom Kabupaten Tambrau (KKP3K-01) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2017, tanggal 22 Desember 2017. Dalam Penetapan ini disebutkan bahwa Jeen Womom merupakan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang dikelola sebagai Taman Pesisir. Luas kawasan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri ini adalah 32.250,86 hektar sementara luas yang tercakup dalam RZWP3K adalah 31.607 hektar. Taman pesisir ini sebagai upaya perlindungan pantai peneluran penyu belimbing. Sub zona Taman Pesisir ini terdiri dari:

- zona inti;
- zona pemanfaatan terbatas; dan
- zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

#### **2.1.3. KKP Sorong Selatan**

Wilayah perairan Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 telah diusulkan sebagai kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta PER.02/MEN/2009 tentang Tata

Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, tahapan insiasia Kawasan Konservasi Perairan – KKP di Sorong selatan telah melalui tahapan persiapan Pencadangan oleh Gubernur Papua Barat.

KKP Sorong Selatan telah dideklarasikan oleh masyarakat adat memiliki luas 338.323 ha, mencakup wilayah distrik pesisir mulai dari Distrik Saifi hingga Distrik Kokoda. Kawasan Konservasi yang diinisiasi oleh masyarakat adat suku besar Tehit, Ogit dan Emiyode bertujuan untuk perikanan berkelanjutan (*MPA For Fisheries*) yang mana ekosistem utamanya adalah hutan mangrove seluas 76.171 ha. Selain itu, KKP yang dibangun di Sorong Selatan sekaligus menjaga dan melindungi daerah pembesaran/perawatan (*nursery ground*) untuk jenis biota ETP (*endangered, threathned and protected*) seperti Hiu dan Pari. Selanjutnya, KKP di Sorong Selatan memiliki potensi perikanan ekspor dengan komoditas udang (jenis: *Panaeus merguensis*) dengan tujuan ke negara Eropa dan Asia lainnya. Saat ini KKP Sorong Selatan telah disepakati akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan nama Suaka Alam Perairan Seribu Satu Sungai Teo Enebikia dengan luas alokasi ruang total adalah 348.764 ha.

#### 2.1.4. KKP Teluk Bintuni

Insiasi Kawasan Konservasi di Teluk Bintuni juga telah dimulai sejak tahun 2017 dan telah dilakukan survei data dasar potensi untuk mendukung inisiasi tersebut. Luas Kawasan Konservasi yang diinisiasi yaitu 66.935 ha yang mana potensi perikananannya adalah udang, kepiting dan ikan demersal. Selain itu, Kabupaten Teluk Bintuni juga dikenal dengan eksistensi tujuh suku besar yang cukup kental sehingga Kawasan Konservasi yang akan dibangun melalui pendekatan *Right Base Fisheries Management-RBFM*. Usulan kawasan konservasi tersebut hanya mencakup wilayah perairan Distrik Manimeri, Bintuni, Kuri dan Wamesa.

### 2.1.5. KKP Makbon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara tegas dikatakan bahwa faktor ekologi, sosial budaya, dan ekonomi merupakan dasar pertimbangan inisiasi dan pencadangan suatu kawasan konservasi Perairan. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, khususnya wilayah pesisir dan laut pada Distrik Makbon yang terdiri atas 14 kampung dan 11 kampung diantaranya terletak di wilayah pesisir Moraid, Della, Asbaken, Sawatuk, Suatolo, Malaumkarta, Mibi, Kuadas, Baingkete, Makbon dan Batu Lobang.

Kriteria ekologi, wilayah perairan Kabupaten Sorong memiliki nilai penting sebagai habitat bagi biota yang dilindungi dan bernilai ekonomi penting. Pulau Um, pesisir Kampung Malaumkarta, dan Kampung Swatolo merupakan pantai peneluran bagi penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada bulan Februari - April 2018, ditemukan sebanyak 50 sarang penyu. Keberadaan ekosistem padang lamun di sekitar Pulau Um dan Kampung Malaumkarta merupakan habitat dugong. Diketahui luas tutupan lamun di pesisir timur Pulau Um dengan rata-rata 58,83% yang didominasi oleh jenis *Halodule uninervis* dan *Thalassodendron ciliatum* sedangkan di pesisir barat 22,42% yang didominasi jenis *Syringodium isoetifolium*, *Cymodocea rotundata*, *Thalasia hemprichii* dan *Halophila ovalis*. Pada bulan April 2018, melalui Survey aerial menggunakan drone, Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP) telah mendokumentasikan adanya dugong di wilayah tersebut. Kealamiahkan kawasan ekosistem mangrove juga yang terdapat di sekitar wilayah ini perlu dipertahankan untuk menjaga kelestarian potensi udang, kepiting, dan ikan. Pada tahun 2016 telah dilakukan survei/monitoring ekosistem terumbu dengan titik sampling di Pulau Um yang menghasilkan informasi kesehatan terumbu karang termasuk dalam katagori “Sedang”.

Kriteria sosial budaya, nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya laut di Kampung Malaumkarta hingga saat ini masih dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat yang dinamakan Egek atau Sasi. Pemerintah telah menetapkan sebuah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Laut di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Dalam keputusan tersebut Masyarakat Hukum Adat bersepakat untuk melakukan perlindungan terhadap 9 jenis biota laut antara lain Kima, Dugong, Penyu (Telur dan Tukik), Pari Manta, Cetacean, Lumba-lumba, Hiu Paus, Napoleon, dan Terumbu Karang. Kemudian pengelolaan 3 jenis biota Teripang, Lola, dan Lobster melalui kearifan lokal Egek atau Sasi.

Berdasarkan informasi kajian awal di atas, maka dipandang perlu mengalokasikan ruang perencanaan Calon Kawasan Konservasi Perairan Distrik Makbon (KKP-13) seluas 147.589 Ha. Saat ini, Kawasan Konservasi di Kabupaten Sorong telah pada tahapan usulan inisiatif yang bersama Loka PSPL Sorong.

### **2.1.6. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Papua Barat**

KKM diperuntukan bagi kegiatan konservasi untuk melindungi bahan muatan kapal tengelam dan peninggalan sejarah dari bekas kapal perang yang tenggelam. Terdapat 3 alokasi ruang kawasan konservasi untuk KKM yaitu bekas kapal dan pesawat tenggelam sebagai akibat Perang Dunia II di Kabupaten Tambrauw (KKM-01) dengan luas 100 ha, Kargo Okinoyama Maru di Kabupaten Tambrauw dengan luas 4.642 ha dan Maritim Cross Wreck Mansinam di Pulau Mansinam, Manokwari dengan luas 53 ha. KKM dapat dimanfaatkan pula sebagai objek wisata selam.

### **2.1.7. Taman Nasional Teluk Cenderawasih**

Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dengan luasan 1.453.500 hektar, ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8009/Kpts-II/2002, merupakan kawasan Taman Nasional Laut terluas

di Indonesia. Secara secara biogeofisik, kawasan TNTC terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%) dan perairan lautan (89,8%). Sedangkan secara administratif, TNTC masuk ke dalam dua wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat) dan Kabupaten Nabire (Provinsi Papua). Terhadap pulau-pulau dalam kawasan Teluk Cenderawasih yang berstatus kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung dan berstatus Areal Penggunaan Lainnya (non kawasan hutan) namun secara ekologis berperan penting dalam sistem perlindungan sistem penyangga kehidupan, telah diajukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk diusulkan penunjukannya menjadi kawasan konservasi (KSA/KPA) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 2.1.8. Suaka Margasatwa Laut Sabuda Taturuga

Pulau Sabuda Taturuga Merupakan pulau yang sempit dan memanjang dengan bukit tertinggi  $\pm 164$  meter di atas permukaan laut. Sedang untuk pulau Taturuga adalah bukit karang yang luasnya  $\pm 0,25$  ha dengan titik tertinggi  $\pm 20$  meter di atas permukaan laut. Jenis-jenis tumbuhan yang paling banyak adalah beringin (*Ficus benyamina*), kayu besi (*Intsia bijuga*), solowaku (*Albizia* sp.), linggua (*Pterocarpus indicus*), pulai (*Alstonia scholaris*) dan semak-semak. Jenis-jenis burung yang dapat dijumpai dalam kawasan ini diantaranya burung pombo (*Duculan aenea*), dara laut (*Sternidae* sp.), bebek laut (*Bsocus* sp.), Sedangkan potensi laut diantaranya penyu, ketam kenari (*Birgus latro*), akar bahar (*Anthipates* sp.). Kawasan ini juga merupakan jalur migran dari ikan paus.

Suaka margasatwa Sabuda Taturuga dapat ditempuh dari pelabuhan Kota Fakfak dengan menggunakan long boat selama  $\pm 6$  jam yang dapat disewa dari penduduk setempat. Objek daya tarik wisata dari kawasan ini adalah pemandangan bawah lautnya dan pada saat musim pendaratan penyu.

### 2.1.9. Cagar Alam Laut Kofiau

Kawasan konservasi ini merupakan habitat penting dari kepiting kenari (*Bitro largus*), dan penyu sisik serta penyu hijau. Terdiri dari 3 (tiga) kawasan konservasi, yaitu:

- Cagar Alam Pulau Kofiau yang ditunjuk sebagai kawasan hutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 5533 /Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 September 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Kepulauan Kofiau – Boo seluas 17.314,70 Hektar di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, dengan luasan 2,926.700 ha.
- Cagar Alam Pulau Torobi yang ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891/Kpts-11/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar, dengan luasan 2.092 ha. Dipertegas dengan point KETIGA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783 /Menhut-II/ 2014 tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.

## 2.2. Kawasan Konservasi Daratan

### 2.2.1. Kawasan Konservasi di Raja Ampat

Kawasan hutan di Kabupaten Raja Ampat berkontribusi sebesar 8,75% terhadap luas hutan di Provinsi Papua Barat. Secara keseluruhan kawasan hutan terluas di Kabupaten Raja Ampat adalah kawasan hutan konservasi teresterial yakni seluas 45% disusul kawasan konservasi perairan sebesar 21%. Sedangkan kawasan hutan lindung dan hutan produksi konversi masing-masing seluas 16% (Tabel 2.1)

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

**TABEL 1.1. DISTRIBUSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

	KAWASAN HUTAN						TOTAL
	KSA/KPA		HL	HPT	HP	HPK	
	Daratan	Perairan					
Luas ( Ha)	404,251	188,221	147,452	6,925	18,017	142,373	907,239
Proporsi (%)	45	21	16	1	2	16	100

Sumber : SK Menhut Nomor 783/2014

Kawasan konservasi teresterial terbagi habis ke dalam 8 kawasan konservasi dengan luas sekitar 416.430 ha (BBKSDA Papua Barat, 2014). Bila dibandingkan dengan SK Menhut Nomor 783 terdapat selisih seluas 12.179 ha yang masuk dalam kawasan perairan. Secara detail kedelapan kawasan konservasi teresterial sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

**TABEL 2.2. LUAS DAN DISTRIBUSI KSA/KPA TERESTERIAL DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Nama KSA/KPA	Luas (Ha)
1	CA Waigeo Barat	95.200
2	CA Waigeo Timur	119.000
3	CA Batanta Barat	16.749
4	CA Salawati Utara	58.411,26
5	CA Misool Selatan	111.476
6	CA Kofiau	100
7	SM Pulau Tolobi (Kofiau)	7.197
8	TWAL Kofiau	7.797

Sumber : BBKSDA Papua Barat, 2014

Kawasan hutan Cagar Alam Waigeo Barat ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.395/ Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 153.000 Ha dan merupakan wilayah dengan pemanfaatan lahan terluas di Daerah Waigeo Barat. Namun setelah dilakukan kegiatan penataan



batas yang dilakukan oleh Sub Biphut Manokwari, kawasan hutan Cagar Alam Pulau Waigeo Barat memiliki luas definitif 95.200 Ha (belum ada penetapan hasil tata batas ini).

Kawasan cagar alam Waigeo berada di utara Raja Ampat dimana kawasan ini berbatasan dengan kawasan Wallacea, daerah peralihan yang merupakan pertemuan dua biogeografi berbeda, Asia dan Australia. Cagar alam Waigeo Barat seluas 95.200 ha dan Waigeo Timur sekitar 119.000 ha keduanya dipisahkan Teluk Mayalibit.

Penelitian yang dilakukan Flora & Fauna International Indonesia Program dan BBKSDA Papua Barat, September hingga Oktober 2016, menunjukkan kekayaan hayati Waigeo, tercatat, 127 jenis burung teridentifikasi di Waigeo Barat dan Waigeo Timur. Jenis-jenis tersebut teramati di Saporken (Cagar Alam Waigeo Barat), Warsanbin (Cagar Alam Waigeo Timur), dan Warimak.

Kondisi habitat cagar alam Waigeo berbeda dari pulau-pulau lainnya. Pulau Waigeo memiliki tipe habitat yang berbeda karena memiliki pegunungan vulkanik tua, perbukitan karts, beberapa perbukitan metamorf dan daratan alluvial yang merupakan endapan dari beberapa sungai. Gunung tertinggi di Pulau Waigeo adalah Gunung Danai (978 m dpl). Tutupan hutan di Pulau Waigeo sebagian besar merupakan hutan primer seluas 263.929 ha (80%) dan hutansekunder seluas 33.094 ha (9%) sedangkan 11% sisanya merupakan kawasan pemukiman dan wilayah aktivitas warga (FFI, 2016).

Bentuk pulau Waigeo mirip dengan kue donat, terdapat lubang ditengah yang dikenal dengan sebutan Teluk Mayalibit. Peruntukan kawasan di Pulau Waigeo digunakan untuk kawasan suaka alam (cagar alam) dengan luasan 200.868 ha. Area hutan produksi seluas 87.143 ha, area penggunaan lain (APL) di Waisai, hutan lindung di Pulau Gam, dan Pulau Mansuar di Selatan Waigeo, Sedangkan sisannya adalah perkampungan masyarakat. Kondisi habitat yang didominasi oleh hutan primer menyimpan berbagai jenis flora dan fauna endemik.

### **1. Potensi dan Sebaran Fauna Waigeo**

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Flora Fauna Internasional ditemukan 125 jenis burung di Pulau Waigeo. Di Warimak tercatat 86 spesies, Sapokren 104 spesies dan Warsambim 78 spesies. Jika digabungkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan pada tahun 2013, di kawasan Pulau Waigeo terdapat 210 spesies burung atau sekitar 31,2% dari 673 spesies burung yang ada di Papua (FFI, 2016). Dari jumlah tersebut sebanyak 74 spesies dilindungi oleh Undang-undang, 32 spesies masuk dalam apendiks CITES, 12 spesies masuk keterancaman konvensi internasional IUCN, 13 spesies endemik Indonesia dan 27 spesies merupakan burung migran.

Selain berbagai jenis burung, Waigeo juga merupakan habitat bagi berbagai jenis amfibi-reptil yang sudah sejak tahun 1830 diinformasi oleh para peneliti. Dalam buku de Rooji memuat deskripsi 25 spesies reptile yang berasal dari Pulau Waigeo. Pada tahun 1923 Pieter Nicolaas van Kampen mencatat sedikitnya 4 spesies amfibi di Pulau Waigeo. Eksplorasi LIPI tahun 2007 menambah catatan untuk amfibi menjadi 12 spesies dan reptil 32 spesies. FFI mencatat 28 spesies amfibi dan 32 spesies reptil, dengan demikian di Pulau Waigeo sudah tercatat sebanyak 29 spesies amfibi dan 42 spesies reptil.

Pulau Waigeo juga menyimpan kekayaan spesies mamalia dari kelompok mamalia bertelur (*Protheria*), mamalia berkantung (*Metatheria*), dan mamalia berplasenta (*Eutharia*). Tim FFI menemukan 20 spesies, tiga diantaranya merupakan satwa yang memiliki sebaran terbatas (endemik) Papua, yakni kuskus Waigeo (*Spilocuscus papuensis*), dan dua spesies kelelawar yaitu kubu beafort (*Dobsonia beafort*) dan paniki pegunungan (*Nyctimene cyclotis*). Kuskus Waigeo merupakan mamalia nokturnal endemik di Pulau Waigeo yang tingkat keterancamannya tinggi karena perburuan baik untuk dipelihara maupun dikonsumsi.

## 2. *Potensi dan Sebaran Flora Waigeo*

Cagar Alam Waigeo dihuni oleh 150 spesies tumbuhan berkayu hutan alam (FFI, 2016). Keberadaan tiga spesies kantung semar (*Nepenthes* spp) dan 57 spesies anggrek. Jumlah tersebut belum termasuk tumbuhan non kayu dan non pembuluh yang diperkirakan lebih dari 100 spesies. Diantara spesies tersebut ada yang merupakan spesies endemik Pulau Waigeo seperti *Alstonia beatricis* dan *Nepenthes danseri*. Selain itu, terdapat juga spesies endemik pulau Papua seperti *Hopea papuana*, *Hopea novoguineensis* dan *Calophyllum parvifolium*.

## 2.3. Kawasan Konservasi di Pegunungan Arfak

### 1. *Kawasan Hutan*

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783 tahun 2014 kawasan hutan di Pegunungan Arfak memiliki luas sekitar 2,89% dari luas kawasan hutan di Papua Barat. Distribusi hutan terluas adalah fungsi lindung dengan luas mencapai 56,86%, disusul fungsi konservasi seluas 28,17%. Dan sisanya 14,97% merupakan kawasan dengan fungsi produksi terbatas (13,45%) dan hutan produksi tetap (1,52%).

Kawasan konservasi di wilayah pegunungan Arfak merupakan kawasan konservasi daratan dengan luas 158.414 hektar. Sejak tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 820/KPTS/Um/II/1982 kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas 68.325 ha. Luas ini kemudian berubah menjadi 63.750 ha. Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA) merupakan salah satu kawasan suaka alam di wilayah Papua Barat yang luas dan berada di ketinggian 15 m hingga lebih dari 1.000 mdpl dengan gunung Humeihbou sebagai puncak tertinggi. Meskipun sebagian besar kawasan ini berupa pegunungan, wilayah ini memiliki koridor ke daerah dataran rendah, sehingga membentuk unit ekologi yang lengkap. Sedikitnya 320 jenis burung, 350 jenis kupu-kupu dan 110 jenis mamalia, serta 2.770 anggrek ditemukan di wilayah ini.

Cagar Alam Pegunungan Arfak dikenal pula sebagai pusat keanekaragaman hayati untuk kupu-kupu sayap burung (*Ornithoptera* spp.), yang memiliki sayap yang besar dan indah. Selain itu, terdapat pula jenis satwa endemik seperti burung pintar (*Amblyornis inornatus*), kanguru pohon (*Dendrolagus*), landak papua (*Zaglossus bruijni*) dan lain-lain.

### **2. Potensi dan sebaran Fauna di Wilayah Pegunungan Arfak**

Kupu-kupu sayap burung (*Ornithoptera priamus poseidon* Doubleday) merupakan jenis kupu-kupu yang banyak terdapat dikawasan Pegunungan Arfak bersama kupu-kupu dari sub spesies lain seperti: *Ornithoptera paradiseae* arfakinensis, *Ornithoptera flavescens*, *Ornithoptera goliath samson*, *Ornithoptera tithonus* misresiana dan *Ornithoptera rosthchildi* yang merupakan endemik Pegunungan Arfak (Petocz, 1987). Penyebaran kupu-kupu ini mulai dari wilayah Mokwam sampai di semua distrik di wilayah Pegunungan Arfak yakni Distrik Anggi, Didohu, Sururei, Anggi Gida, Membey, Taige, Hing, Minyambouw, Catubow dan Testega.

Selain kupu-kupu sayap burung, kawasan hutan Pegunungan Arfak juga menjadi habitat bagi berbagai jenis burung. Burung pintar atau burung *Namdur polos* dan cendrawasih Arfak merupakan spesies endemik burung yang menjadi obyek penelitian dan sekarang ini banyak dijadikan sebagai obyek daya tarik wisata terutama wisata pengamatan burung.

### **3. Potensi dan sebaran Flora di Wilayah Pegunungan Arfak**

Berdasarkan survei FAO tahun 2005 ditemukan 2.770 jenis anggrek di Cagara Alam Pegunungan Arfak. Adapun beberapa jenis anggrek tersebut adalah yang terindah dan langka seperti jenis anggrek Flame of Irian (*Mucuna novaeguinea*) yang berwarna khas merah merona dan hitam. Tak hanya itu ditemukan juga cendawan menyala (*Mycena*) yang mengeluarkan cahaya pendar dari buahnya pada malam hari. Wilayah Pegunungan Arfak juga menyimpan potensi bunga gladiol Arfak yang menarik, serta jenis bunga pegunungan (*Rhododendron*) yang menghiasi wilayah Pegunungan Arfak. Wilayah ini juga menjadi habitat bagi beberapa jenis pohon berdaun jarum seperti *Doodonea viscosa* dan jenis-jenis pohon kasuari.

## 2.4. Kawasan Konservasi di Kaimana

Kabupaten Kaimana memiliki Kawasan lindung dan konservasi yang cukup luas dan tersebar di beberapa distrik seperti Distrik Teluk Arguni dan Kambrau. Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Kaimana seluas 527.268 (30,58%) terdiri dari Hutan Lindung seluas 339.253 ha dan Hutan Konservasi seluas 188.015 ha. Kawasan lindung ini selain berperan sebagai fungsi lindung/hidrologi dan pengawetan/pelestarian keanekaragaman hayati, dapat juga dikembangkan agar dapat memberikan layanan jasa kehutanan yang dapat menambah pendapatan asli daerah.

Kawasan lindung dalam wilayah Kabupaten Kaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982 sebagai berikut :

### 1. Hutan Lindung Teluk Arguni

Kawasan Hutan Lindung Teluk Arguni ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982. Sesuai kondisi wilayahnya Hutan Lindung Teluk Arguni dipisahkan menjadi empat kelompok hutan yaitu Hutan Lindung Arguni I, II, III dan IV terletak sepanjang sisi utara Teluk Arguni dan secara geografis terletak antara 133° 29'00" sampai 133° 52'00" BT dan 02° 23'30" sampai 02° 44'30" LS. Penandaan batas Hutan Lindung Teluk Arguni dilaksanakan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari yang melibatkan Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 1998/1999. Hutan Lindung Teluk Arguni I memiliki panjang batas 64.040,20 meter dengan pal batas yang ditanam sebanyak 559 buah, Hutan Lindung Teluk Arguni II memiliki panjang batas 49.228,90 m dengan pal batas yang ditanam sebanyak 490 buah, Hutan Lindung Teluk Arguni III memiliki panjang batas 99.953,80 m dengan pal batas yang ditanam sebanyak 907 buah dan Hutan Lindung Teluk Arguni IV memiliki panjang batas 28.158,70 m dengan pal batas yang ditanam sebanyak 254 buah.

Kawasan Hutan Teluk Arguni I dan II dipisahkan oleh wilayah Distrik Teluk Arguni, sedangkan Hutan Lindung Teluk Arguni III dan IV dipisahkan oleh selat dan pemukiman/kampung. Topografi kawasan Hutan Lindung Teluk Arguni I dan II relatif datar, cenderung berawa terutama pada bagian pantai. Sungai-sungai yang mengalir pada kawasan tersebut yaitu: Sungai Irimawa dan Sungai Wabora. Sedangkan topografi pada Hutan Lindung Teluk Arguni III dan IV merupakan rangkaian dari beberapa gunung seperti Gunung Gusi, Gunung Fudi, Gunung Genofa dan Gunung Lowai yang umumnya berupa daerah berbatu yang terjal dan curam.

## **2. Hutan Lindung Kamrau – Kambala**

Kawasan Hutan Lindung Teluk Arguni ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982. Kawasan Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau I dan kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau II. Kawasan kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau I dan II berada pada bagian barat Teluk Kamrau dan bagian tenggara Kambala yang secara geografis terletak antara 133° 18'30" sampai dengan 133° 25'00" BT dan 03°36'00" sampai dengan 03° 53'30" LS. Penandaan batas Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau dilaksanakan dalam dua tahap, tahap I dilaksanakan oleh Konsultan PT. Adhelina Konsulindo pada tahun 1996/1997 dan tahap II dilaksanakan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari tahun 1999/2000 dengan pemasangan pal batas sebanyak 550 buah. Luas kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau I sebesar 3.955,50 ha dan kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau II sebesar 7.460,60 ha. Kelompok Hutan Lindung Kambala-Teluk Kamrau secara keseluruhan mempunyai topografi datar sampai bergelombang ringan, pada bagian atas bagian pantai cenderung berawa-rawa, sedangkan batas bagian dalam bergelombang ringan. Banyak mengalir sungai-sungai yang alirannya memotong hutan lindung, diantaranya: Sungai Buya dan Sungai Sasuma. Pengamatan di lapangan menunjukkan masih banyak dijumpai satwa liar

yang dilindungi dalam kawasan kelompok Hutan Lindung tersebut seperti burung cenderawasih dan nuri kepala hitam. Sedangkan tumbuhan yang mendominasi berasal dari jenis mangrove, nipah, kayu besi dan matoa.

### **3. Hutan Lindung Teluk Arguni – Manggai**

Kawasan Hutan Lindung Teluk Arguni ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982. Berada pada bagian ujung utara Teluk Arguni dan secara geografis terletak antara 133°29'00" sampai dengan 133° 52'00" BT dan 02° 54'30" sampai dengan 03° 23'30" LS. Luas hutan lindung ini sebesar 2.413,70 Ha atau sepanjang 30.654,60 meter. Penandaan batas I dilakukan oleh konsultan PT. Barisco Cemerlang pada tahun 1998/1999 dan batas II dilakukan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Manokwari pada tahun anggaran 1999/2000 dengan pal batas sebanyak 210 buah. Kelompok Hutan Lindung Teluk Arguni-Manggai mempunyai topografi datar cenderung berawa-rawa pada bagian pantai, sedangkan pada bagian dalam kawasan hutan tersebut bergelombang ringan. Vegetasi yang dominan ditemui ialah mangrove, nipah dan sagu.

### **4. Cagar Alam Pegunungan Kumawa**

Kawasan hutan Cagar Alam Pegunungan Kumawa ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982. Kawasan hutan cagar alam ini meliputi seluruh daerah Pegunungan Kumawa yang secara geografis terletak antara 132°15'00" sampai 133°16'00" BT dan 3°04'00" sampai 4°04'00" LS. Luas definitif Kawasan Cagar Alam Pegunungan Kumawa sebesar 97.089,38 Ha atau memiliki panjang sejauh 183,134 km, terdiri dari 152,923 km batas buatan dan 30,211 km batas alam dengan jumlah pal batas sebanyak 1.750 buah. Penandaan batas definitif ini dilakukan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Manokwari pada tahun 1992. Daerah Cagar Alam ini merupakan daerah pegunungan yang mempunyai bentuk lapangan bervariasi mulai bergelombang ringan sampai berat dan curam yang membujur dari barat ke timur dengan puncak tertinggi ±1.432 mdpl. Vegetasi yang dominan ialah matoa (*Pometia* spp), merbau (*Intsia bijuga*), nyatoh (*Palaquium* spp) dan *Araucaria*.

### 5. Suaka Margasatwa Pulau Venu

Suaka marga satwa (laut) Pulau Venu ditetapkan berdasarkan SK Menhut Nomor 891/Kpts -II/1999 seluas 16,329 ha terletak di Adijaya Buruway Kabupaten Kaimana. Topografi relative datar dengan ketinggian 0 – 7 mdpl, serta bagian tepi luar pantai dikelilingi pasir yang merupakan lokasi yang idel untuk tempat peneluran penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*) dan Lekang (*Lepidochelys olivacea*).

## 2.5. Potensi Kawasan Konservasi sebagai Obyek Daya Tarik Wisata

Potensi objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kaimana dan Raja Ampat sangat beragam dan tersebar pada beberapa lokasi. Objek dan daya tarik wisata tersebut telah menarik kunjungan tidak hanya wisnus tetapi juga wisman. Obyek daya Tarik wisata dapat berupa tata alam, masyarakat dan hasil binaan manusia.

### 2.5.1. Potensi wisata di Kawasan Konservasi Pegunungan Arfak

Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki berbagai jenis tempat wisata di seluruh distrik. Tercatat jumlah keseluruhan obyek wisata sebanyak 43 lokasi yang menawarkan pemandangan alam, agrowisata, cagar budaya, dan wisata sejarah. Secara ringkas potensi obyek wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak disajikan pada Tabel 2.3.

**TABEL 2.3. POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

No.	Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Keterangan
1.	Goa Alam	Distrik Anggi	Panorama Alam
2.	Danau Anggi Giji (Laki-laki)	Distrik Anggi	Luas 2.200 ha
3.	Dana Anggi Gida ( Perempuan)	Distrik Anggi Gida	Luas 2.500 hha
4.	Wisata Budaya	Pegunungan Kobrey, Distrik Anggi	Tarian Adat, Rumah Adat Kaki Seribu
5.	Cagar Alam	Distrik Minyambouw	Luas CA 45.000 ha & Kupu-Kupu Sayap Burung



Kegiatan wisata di kawasan konservasi atau kawasan lindung umumnya dilakukan dalam bentuk mengamati sesuatu, melakukan sesuatu dan membeli sesuatu pada suatu kawasan atau obyek daya Tarik wisata. Secara umum di kawasan konservasi kabupaten Pegunungan Arfak potensi kegiatan wisata yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersifat melihat atau *Something to See*

Kegiatan yang bersifat melihat ini didasarkan pada ketersediaan obyek yang dapat dilihat memanjakan mata dan menentramkan hati. Adapun kegiatan yang bersifat mengamati sesuatu adalah :

a. Menikmati Pemandangan (*view*)

Danau Anggi Giji dan Anggi Gida merupakan dua obyek daya tarik wisata yang menawarkan pemandangan indah baik keindahan danau maupun alam pegunungan yang masih alami dan lestari. Daya tariknya: keindahan bentang alam danau, keindahan air danau.



**Gambar 2.3.** Pemandangan Danau Anggi Gida (Danau Perempuan) dari puncak Gunung Kobrey, Kabupaten Pegunungan Arfak

- b. Kegiatan menikmati adat dan budaya lokal  
Selain pemandangan indah yang ditampilkan oleh alam Pegunungan Arfak, terdapat obyek wisata yang dapat disaksikan seperti keunikan budaya asli suku-suku di Pegunungan Arfak. Budaya Arfak juga mengenal prosesi ritual pengucapan syukur yang disimbolkan dengan Tarian *Magasa*, sejenis tari ular yang selalu dipertunjukkan pada setiap musim panen, perkawinan atau menyambut tamu. Wilayah Pegunungan Arfak menyimpan potensi arsitektur budaya berupa Rumah Kaki Seribu yang unik dan menjadi ciri khas. Potensi ini menjadi keunggulan daya tarik bagi wisatawan.
- c. Kegiatan menikmati keunikan Flora dan Fauna  
Kabupaten Pegunungan Arfak berada di wilayah Cagar Alam Pegunungan Arfak dimana terdapat habitat flora dan fauna yang endemik dan unik. Jika berada di wilayah Pegunungan Arfak (PEGAF), wisatawan dapat menyaksikan keunikan habitat dan tingkah laku hewan seperti Burung *Amblyornis inornatus* atau Burung pintar, Burung Cenderawasih Arfak dan Kupu-Kupu sayap burung.



**Gambar 2.4.** Area Potensi Wisata Alam Pegaf

Selain keunikan tingkah laku dan keindahan fauna, wilayah ini juga menyimpan keunikan flora khas seperti anggrek irian, bunga gladiol dan lain-lain.

2. Kegiatan yang bersifat untuk melakukan sesuatu atau *something to do*  
Selain dapat dilihat dan disaksikan, terdapat pula kegiatan yang dapat dilakukan dan didukung juga fasilitas rekreasi yang membuat wisatawan tinggal lebih lama di daerah tersebut. Wilayah kabupaten Pegunungan Arfak dapat menjadi arena bagi beberapa aktivitas wisata sebagai berikut:

- a. Piknik atau rekreasi

Keindahan dan kesejukan alam wilayah pegunungan Arfak baik wilayah teresterial maupun perairan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tempat wisata untuk rekreasi atau piknik bersama keluarga dan teman-teman. Kegiatan rekreasi dapat dilakukan dengan sekedar berdiri pada spot-spot di pinggiran jalan untuk melepas kelelahan, sekedar duduk-duduk pada spot-spot di pinggiran danau Anggi, atau mengelilingi danau dengan menggunakan perahu sambil menikmati keindahan danau dan suasana pegunungan.



Salah satu spot rekreasi disepanjang jalan Manokwari-Pegunungan Arfak dan menikmati keindahan kabup di wilayah pegunungan

**Gambar 2.5** Spot Rekreasi Sepanjang Jalan Manokwari-Pegaf

- b. Memancing di Danau

Danau Anggi merupakan habitat beberapa jenis ikan air tawar, seperti Ikan Mujair dan Nila. Potensi ikan di danau sangat mendukung aktivitas wisata memancing. Wisatawan dapat memancing di area danau

sambil menikmati keindahan danau dan udara sejuk pegunungan. Kegiatan memancing dapat dilakukan dipinggir danau atau juga dapat menggunakan perahu untuk memancing di tengah danau.

c. Kegiatan lintas alam ( hiking)

Keadaan alam pegunungan Arfak yang berbukit, berlembah-lembah, dan hutan serta sungai-sungai yang masih alami dan lestari sering dijadikan arena lintas alam bagi para wisatawan. Wisatawan dapat melakukan kegiatan melintasi alam Pegunungan Arfak yang masih alami sambil menikmati keunikan flora dan fauna, budaya masyarakat serta keindahan alam.

d. Kegiatan Agrowisata

Keadaan iklim (suhu), tanah dan alam di wilayah Pegunungan Arfak menjadi potensi yang luar biasa dalam pengembangan agrowisata. Terdapat beberapa varietas sayur dan buah yang banyak ditanam oleh masyarakat seperti Kentang, Kubis, Sawi, Daun Bawang, Daun Sup, Wortel, Jeruk, Nanas, Stroberi, Terong Belanda dan lain-lain. Kebanyakan masyarakat menanam di sekitar rumahnya. Keadaan ini dapat menjadu atraksi wisata yaitu menikmati keindahan pertanian agrowisata, kegiatan menanam hingga menikmati aktivitas pertanian warga setempat. Pengembangan agrowisata berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Pegunungan Arfak yaitu di lahan-lahan kosong dan juga memanfaatkan lahan kebun warga.



Kebun di sekitar rumah warga, Kebun-kebun campuran yang dikerjakan warga masyarakat setempat, Potensi Buah Stroberi di pekaran rumah dan hutan-hutan di wilayah Pegunungan Arfak



**Gambar 2.6.**  
Angrowisata khas Pegunungan Arfak

Buah nenas ada banyak tumbuh liar di hutan-hutan di Pegunungan Arfak. Ada juga yang dibudidayakan oleh masyarakat kemudian dijual di Pasar atau pondok-pondok jualan sepanjang jalan utama

e. Menikmati Kuliner

Kekayaan alam yang melimpah seperti ikan, tanaman hortikultura berupa kentang, wortel, tomat, dau bawang, terung belanda, nenas jeruk dan lain-lain dapat dioleh menjadi kuliner khas Pegunungan Arfak. Di sekitar Danau Anggi ada Kuliner Mabuan Hose. Kuliner ini merupakan rebusan ikan mujair dari danau yang diracik dengan bumbu-bumbu yang ditanam di wilayah sekitar danau seperti cabe, bawang, tomat, dan serai. Namun potensi ini belum dikembangkan dengan baik, artinya masih tersedia di rumah-rumah warga saja.

f. Kegiatan Berkemah

Wilayah Pegunungan Arfak memiliki beberapa areal yang datar dan berbukit sehingga dapat dijadikan sebagai areal berkemah. Kegiatan berkemah di wilayah ini sangat jarang, yang selama ini melakukan camping hanya para mahasiswa pencinta Alam dan para pengunjung dengan maksud atau kegiatan lain selain berwisata dan tidak memiliki tempat istirahat.

### **2.5.2. Potensi Wisata Kawasan Konservasi Raja Ampat**

Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Kepulauan ini berada di bagian paling barat pulau induk Papua, Indonesia, membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar. Raja Ampat memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan ditemukannya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska (hewan lunak) dan 537 jenis hewan karang. Tidak hanya jenis-jenis ikan, Raja Ampat juga kaya akan keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan pantai tebing berbatu yang indah. Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dan lebih dari 600 pulau-pulau kecil. Pusat pemerintahan berada di Waisai, Distrik Waigeo Selatan. Luas wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah 8.034,440 km<sup>2</sup>.

**TABEL 2.4. DAYA TARIK DAN TEMPAT WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI	JENIS WISATA
1.	Air Terjun Warin Kabom	Pulau Batanta	Alam
2.	Tanjung Batu Jefman	Salawati Utara	Alam
3.	Pulau Matan	Salawati Utara	Alam
4.	Pulau Kasim Raja	Salawati Utara	Alam
5.	Pulau Rumbabo	Salawati Utara	Alam
6.	Pulau Bam	Salawati Utara	Alam
7.	Pulau Senapan	Salawati Utara	Alam
8.	Batu Gantung	Salawati Utara	Alam
9.	Hutan Mangrove Selat Kalobo	Salawati Tengah	Alam
10.	Pengamatan Kangguru Warir Kalobo	Salawati Tengah	Alam
11.	Goa Jepang Samate	Salawati Utara	Minat Khusus
12.	Pengamatan Ular Laut Rumbabo	Salawati Utara	Alam
13.	Goa Jepang Batanta	Batanta	Minat Khusus
14.	Pengamatan Burung Wailebet	Batanta	Minat Khusus
15.	Wayag	Waigeo Barat	Alam
16.	Batu Pensil	Waigeo Selatan	Alam
17.	Piaynemo	Waigeo Barat	Alam
18.	Pengamatan Burung Yenwaupnor	Waigeo Barat	Minat Khusus
19.	Pengamatan Burung Sawingrai	Meos Mansar	Minat Khusus
20.	Jelajah Puncak Wawiyai	Waigeo Selatan	Minat Khusus
21.	Puncak Karawapop	Misool	Alam
22.	Puncak Dapun Lol	Misool	Alam
23.	Goa Keramat	Misool	Minat Khusus
24.	Danau Ubur-Ubur Len Makana	Misool	Alam
25.	Puncak Harfard Dapun Lol	Misool	Alam
26.	Goa Danau Biru To Molol	Misool	Minat Khusus
27.	Goa Fan-Fan Lol	Misool	Minat Khusus

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

**TABEL 2.4. DAYA TARIK DAN TEMPAT WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI	JENIS WISATA
28.	Air Terjun Malol Gamta	Misool	Alam
29.	Goa Putri Termenung	Misool	Minat Khusus
30.	Pengamatan Burung Kofiau	Misool	Minat Khgusus
31.	Batu Candi Sabu Ket Fafanlap	Misool	Alam
32.	Kali Biru Warsamdim	Teluk Mayalibit	Alam
33.	Pengamatan Burung Warimak	Teluk Mayalibit	Minat Khusus
34.	Pengamatan Burung Waifoi	Teluk Mayalibit	Minat Khusus
35.	Pengamatan Burung Yenbeser	Waigeo Selatan	Minat Khusus
36.	Goa Sapokren	Waigeo Selatan	Minat Khusus
37.	Goa Waiwo	Waigeo Selatan	Minat Khusus
38.	Pengamatan Burung BBI	Waigeo Selatan	Minat Khusus
39.	Pantai Saleo	Waigeo Selatan	Alam
40.	Pantai Waisai Torang Cinta	Waisai Kota	Wisata Modern
41.	Air Terjun Warin Kris	Batu Merah	Alam
42.	Pasir Timbul Meos Mansar	Meos Mansar	Alam
43.	Area Snorkling Arborek	Meos Mansar	Alam
44.	Wai Bem Lopintol	Teluk Mayalibit	Alam
45.	Kapat So (Batu Kelamin)	Teluk Mayalibit	Budaya
46.	Pasir Timbul Meos Mansar	Meos Mansar	Alam
47.	Manta Sandy	Meos Mansar	Alam (Selam)
48.	Manta Ridge	Meos Mansar	Alam (Selam)
49.	Lalosi Reef	Meos Mansar	Alam (selam)
50.	Cape Kri	Meos Mansar	Alam (Selam)
51.	Yenbuba Jetty	Meos Mansar	Alam (Selam)
52.	Mioskon	Meos Mansar	Alam (Selam)
53.	Blue Magic	Meos Mansar	Alam (Selam)



**TABEL 2.4. DAYA TARIK DAN TEMPAT WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI	JENIS WISATA
54.	Sardine Reef	Meos Mansar	Alam (Selam)
55.	Chicken Reef	Meos Mansar	Alam (Selam)
56.	Melisa Garden	Waigeo Barat Kepulauan	Alam (Selam)
57.	Otdima	Waigeo Barat Kepulauan	Alam (Selam)
58.	Friwen Bonda	Meos Mansar	Alam (Selam)
59.	Arborek Jetty	Meos Mansar	Alam (Selam)
60.	Five Rocks	Meos Mansar	Alam (Selam)
61.	The Passage	Meos Mansar	Alam (Selam)
62.	Wagmab Wall	Misool Timur	Alam (Selam)
63.	Pet Rock	Misool Timur	Alam (Selam)
64.	No Contest	Misool Timur	Alam (Selam)
65.	Goa Farondi	Misool Timur	Alam (Selam)
66.	Lenmakana	Misool Timur	Alam (Selam)
67.	Magic Montain	Misool Timur	Alam (Selam)
68.	Nudi Rock	Misool Timur	Alam (Selam)
69.	Whale Rock	Misool Timur	Alam (Selam)
70.	Boo Window	Kofiau	Alam (Selam)
71.	Tank Rock	Kofiau	Alam (Selam)
72.	Boo West	Kofiau	Alam (Selam)

Sumber : Dinas Pariwisata Raja Ampat, 2018

Potensi atraksi wisata yang dimiliki Kabupaten Raja juga didukung oleh penetapan beberapa kampung sebagai kampung Wisata. Jumlah kampung wisata di Raja Ampat sebanyak 24 dimana setiap Kampung ditetapkan dengan peraturan Bupati Raja Ampat ( Tabel 2.5)

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

**TABEL 2.5. JUMLAH DAN SEBARAN KAMPUNG WISATA DI RAJA AMPAT**

No	Nama Kampung	Distrik	Regulasi
1	Sawandarek	Distrik Meosmansar	Perbub no. 104 tahun 2008
2	Yenwaupnor	Distrik Meosmansar	Perbub no. 104 tahun 2008
3	Arborek	Distrik Meosmansar	Perbub no. 104 tahun 2008
4	Friwen	Distrik Waigeo Selatan	Perbub no. 223 tahun 2012
5	Yenbeser	Distrik Waigeo Selatan	Perbub no. 223 tahun 2012
6	Salio	Distrik Waigeo Barat Daratan	Perbub no. 223 tahun 2012
7	Selpele	Distrik Waigeo Barat Daratan	Perbub no. 223 tahun 2012
8	Arefi selatan	Distrik Batanta Utara	Perbub no. 223 tahun 2012
9	Yensawai barat	Distrik Batanta Utara	Perbub no. 223 tahun 2012
10	Harapan jaya	Distrik Misool Selatan	Perbub no. 70 tahun 2010
11	Yellu	Distrik Misool Selatan	Perbub no. 70 tahun 2010
12	Fafanlap	Distrik Misool Selatan	Perbub no. 70 tahun 2010
13	Usaha jaya	Distrik Misool Timur	Perbub no. 70 tahun 2010
14	Tomolol	Distrik Misool Timur	Perbub no. 70 tahun 2010
15	Saporkren	Distrik Waigeo Selatan	Perbub no. 51 tahun 2014
16	Wawiyai	Distrik Waigeo Selatan	Perbub no. 51 tahun 2014
17	Saukabu	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Perbub no. 51 tahun 2014
18	Pam	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Perbub no. 51 tahun 2014
19	Saupapir	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Perbub no. 51 tahun 2014
20	Manyaifun	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Perbub no. 51 tahun 2014
21	Meosmanggara	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Perbub no. 51 tahun 2014
22	Wailebet	Distrik Batanta Selatan	Perbub no. 51 tahun 2014
23	Kliam	Distrik Salawati Barat	Perbub no. 51 tahun 2014
24	Waiyom	Distrik Salawati Barat	Perbub no. 51 tahun 2014

Sumber : Dinas Pariwisata Raja Ampat, 2018

### 2.5.3. Potensi Wisata di Kawasan Konservasi Kaimana

Potensi wisata di Kabupaten Kaimana tersebar di beberapa wilayah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6

<b>TABEL 2.6. POTENSI WISATA DI KABUPATEN KAIMANA</b>		
<b>Jenis Daya Tarik wisata</b>	<b>Daya Tarik Utama</b>	<b>Lokasi</b>
Peninggalan Perang Dunia II	Bangunan dan benda peninggalan sejarah	Tanjung Simora, Pantai Anda Air, Kampung Coa
Benteng Fort Du Bus	Benteng	Kampung Lobo
Situs Kerajaan Namatota	Rumah adat dan Kampung	Kampung Namatota
Lukisan Dinding Batu	Lukisan dinding masa prasejarah	Teluk Bisyari, Teluk Triton
Budidaya mutiara	Budidaya Mutiara	Teluk Bisyari
Goa Tengkorak	Kerangka Manusia	Kampung namatota, Pulau Adi
Makan Tua Raja	Makam Tua	P. Aiduma, Adi, Ulan Jaya
Kuburan Tua	Makam Tua	P. Adi, Aiduma, Lobo
<b>Event</b>		
Ritual sasi nggama	Upacara Adat	Kampung Adijaya
Festival Perahu tradisional	Lomba Perahu Naga	Distrik Kaimana
Birtu Festival	Lomba Kreasi Perahu	Distrik Kaimana
Pentas Seni Rakyat	Seni Budaya Lokal	Distrik Kaimana
Parade Budaya	Lomba Antraksi Seni Budaya	Distrik Kaimana
<b>Wisata Alam</b>		
Wisata alam KM 14	Ekosistem Hutan Tropis	Kampung Tanggaromi
Air Panas Nusa Ulan	Sumber Air Panas	Nusa Ulan
Air Panas Wonoma	Sumber Air Panas	Distrik Kambrau
Air terjun Mbuta	Air terjun ke Laut	Distrik Teluk Etna
Air terjun Kititi	Air Terjun	Nusa Ulan
Danau Siviki	Ekosistem Danau dan Hutan Tropis	Distrik Teluk Arguni

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

**TABEL 2.6. POTENSI WISATA DI KABUPATEN KAIMANA**

Jenis Daya Tarik wisata	Daya Tarik Utama	Lokasi
Danau Kamaka	Ekosistem Danau dan Hutan Tropis	Kampung Kamaka
Pusaran Air Wonama	Fenomena pusaran Air	Distrik Kambrau
Taan Getsemani	Taman	Jl. Trans Tanggaromi
Pulau Venu	Habitat penyu dan ekosistem Pulau	Kampung Adijaya
Pulau Paniki	Kelelawar	Nusa ualan, Lobo, P.Adi
Taman Laut Triton	Taman Bawah Laut	Teluk Triton
Teluk Arguni Adventure	Ekosistem	Teluk Arguni
Sunset	Sunset	Distrik Kaimana
Bird watch	Burung	7 Distrik
Wisata Ikan Paus	Ikan Paus dan Lumba lumba	Teluk Triton, Laut
Kampung Rambutan	Wisata Agro	Kaimana
Ermud Cottage	Ecoturism	Ermud Teluk Triton
Aiduma Cottage	Ecoturism	Aiduma (Waikala, Simurip)

Sumber : RIPPARDA Provinsi Papua Barat 2011-2033

# 3

## KEADAAN EKONOMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ORANG ASLI PAPUA

### 3.1. Kontribusi Relatif Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Konservasi

Perkembangan wilayah dikenali dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, fisik, dan kelembagaan. Aspek ekonomi menjadi bagian yang paling penting dalam perkembangan wilayah karena basis ekonomi sebuah wilayah menentukan perkembangan wilayah tersebut. Dalam ekonomi wilayah dikenal istilah basis ekonomi. Sektor yang menjadi basis ekonomi salah satunya adalah pariwisata.

Kegiatan pariwisata dalam lingkup ekonomi wilayah merupakan salah satu sektor produksi yang menyumbang pendapatan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian pariwisata dalam berbagai literatur dan penelitian tidak pernah ditempatkan sebagai satu sektor khusus dalam perkembangan wilayah, sehingga untuk melihat peran sektor pariwisata

dalam perkembangan wilayah. Salah satu cara untuk mengukur sebuah sektor dalam perkembangan wilayah adalah analisis Input-Output. Saputra (2014) menjelaskan sektor pariwisata dibentuk melalui agregasi sektor dari tabel Input-Output sehingga menghasilkan 5 sektor pembentuk sektor pariwisata, yakni Angkutan, Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

### 3.1.1. Keadaan Ekonomi Wilayah Kabupaten Kaimana

Nilai PDRB Kaimana atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 1,77 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,81 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 2,58 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 1,64 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,74 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kabupaten Kaimana mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,86 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

#### 1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Kaimana didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kaimana (tabel 3.1).

**TABEL 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAIMANA ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2014-2018 (BPS STATISTIK KABUPATEN KAIMANA, 2019)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.81	28.96	27.94	27.12	26.33
Pertambangan dan Penggalian	0.95	0.97	0.99	1.00	1.02
Industri Pengolahan	5.96	5.75	5.62	5.44	5.29
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
Konstruksi	17.46	18.40	19.36	20.14	20.66
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.31	9.49	9.63	9.83	10.19
Transportasi dan Pergudangan	4.97	5.08	5.23	5.32	5.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.70	0.71	0.72	0.76	0.78
Informasi dan Komunikasi	1.66	1.58	1.58	1.60	1.62
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.48	1.43	1.43	1.36	1.29
Real Estate	1.93	1.96	2.01	2.07	1.92
Jasa Perusahaan	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.81	22.79	22.54	22.40	22.61
Jasa Pendidikan	1.75	1.68	1.69	1.69	1.68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.65	0.64	0.67	0.67	0.67
Jasa Lainnya	0.39	0.39	0.41	0.41	0.42
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Ket: \*Angka sementara\*\*Angka sangat sementara

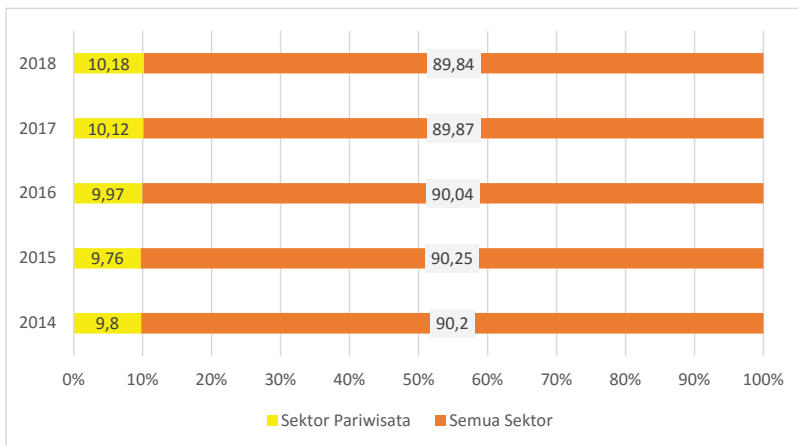
## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 26,33 persen (angka ini menurun dari 30,81 persen di tahun 2014). Selanjutnya, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 22,61 persen (naik dari 21,81 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 20,66 persen (naik dari 17,46 persen di tahun 2014).

Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,19 persen (naik dari 9,31 persen di tahun 2013) dan diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,35 persen (naik dari 4,97 persen di tahun 2014) serta Industri Pengolahan sebesar 5,29 persen (turun dari 5,96 persen di tahun 2014).

Di antara sejumlah lapangan usaha tersebut, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dimasukan sebagai sektor yang berkontribusi terhadap pariwisata Kaimana.



**Gambar 3.1.** Kontribusi Relatif Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kaimana



Kontribusi relatif aktivitas pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kaimana dari waktu terlihat mengalami mulai dari 9,76 sampai dengan 10,18 % selama 5 tahun terakhir. Dengan sumbangsih terbesar berasal dari sektor transportasi dan perdagangan.

## **2. *Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kaimana pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kaimana atas dasar harga konstan 2010, mencapai 1,74 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 1,64 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung pemerintah daerah, renovasi gedung pertemuan serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,30 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lebih dari

lima persen. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi antara lain: lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,30 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,29 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,50 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,45 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,82 persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,41 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen adalah lapangan usaha Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,30 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,44 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 1,15 persen, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,56 persen.

**TABEL 3.2. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 KABUPATEN KAIMANA MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2014-2018 (BPS STATISTIK KABUPATEN KAIMANA, 2019)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.26	-1.44	0.13	3.72	4.15
Pertambangan dan Penggalian	3.63	6.68	6.36	9.03	8.50
Industri Pengolahan	3.02	0.27	1.48	2.98	2.99
Pengadaan Listrik dan Gas	4.00	-4.46	8.30	0.66	0.56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	1.98	2.01	3.07	2.30
Konstruksi	12.82	10.04	8.02	9.17	9.29
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.42	6.09	5.59	7.17	8.45

**TABEL 3.2. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 KABUPATEN KAIMANA MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2014-2018 (BPS STATISTIK KABUPATEN KAIMANA, 2019)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Transportasi dan Pergudangan	8.33	5.55	5.99	7.21	6.79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.98	5.12	7.49	9.45	10.30
Informasi dan Komunikasi	11.29	4.88	5.31	7.11	7.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.10	5.43	3.94	1.58	1.44
Real Estat	9.39	8.32	6.39	8.99	1.15
Jasa Perusahaan	7.76	6.79	5.81	7.91	7.41
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.25	11.63	1.16	4.87	4.84
Jasa Pendidikan	9.90	6.28	7.69	7.74	7.82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.20	5.19	6.98	7.36	7.69
Jasa Lainnya	6.67	5.30	7.98	7.28	6.63
Rataan	5.45	4.97	3.17	5.73	5.86

### 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kaimana atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,82 juta rupiah. Secara nominal terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 44,29 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**TABEL 3.3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN KAIMANA, 2014-2018 (MILYAR RUPIAH) (BPS STATISTIK KABUPATEN KAIMANA, 2019)**

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
ADHB	1,775	1,984	2,153	2,365	2,586
ADHK	1,438	1,509	1,557	1,647	1,743
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	33,829	36,643	38,791	41,592	44,290
ADHK	27,411	27,876	28,067	28,956	29,855
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5.45	1.69	0.68	3.16	3.10
Jumlah Penduduk (ribu orang)	52 473	54 165	55 503	56 882	58 404
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0.00	3.22	2.47	2.48	2.67

#### **4. Pertumbuhan Dan Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 0,68 triliun rupiah atau sebesar 26,33 persen. Subkategori usaha Perikanan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 52,30 persen. Subkategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu merupakan kontributor terbesar kedua

dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 30,97 persen.

Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terkecil dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 16,73 persen. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman Perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 10,53 persen, disusul Tanaman Hortikultura sebesar 2,48 persen dan Peternakan sebesar 2,42 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing relatif kecil sekitar 1 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Perikanan dan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu. Percepatan tertinggi dicapai oleh subkategori Perikanan yaitu sebesar 8,49 persen disusul subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 6,35 persen pada tahun 2018.

### **3.2. Keadaan Ekonomi Wilayah Kabupaten Raja Ampat**

Nilai PDRB Raja Ampat atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 2,68 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 206,95 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 2,47 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 2,13 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 2,23 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Raja Ampat mengalami pertumbuhan

ekonomi sekitar 4,35 persen, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini murni disebabkan oleh bertambahnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

### **1. Struktur Ekonomi**

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014 – 2018) struktur perekonomian Raja Ampat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Raja Ampat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Raja Ampat pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 29,82 persen (angka ini menurun dari 31,60 persen pada tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,83 persen (naik dari 23,98 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,10 persen (naik dari 18,95 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,90 persen (turun dari 15,02 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,02 persen (turun dari 5,04 persen di tahun 2017)

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan peranan tiap tahunnya. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami penurunan peranan, pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kegiatan pertambangan minyak, gas dan panas bumi serta pertambangan bijih logam.

**TABEL 3.4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO RAJA AMPAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2014-2018 (BPS KABUPATEN RAJA AMPAT, 2019)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.54	28.54	30.13	31.60	29.82
Pertambangan dan Penggalian	43.30	37.41	32.10	23.98	25.83
Industri Pengolahan	0.72	0.76	0.79	0.86	0.82
Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Konstruksi	8.58	10.15	11.71	15.02	14.90
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.62	4.07	4.51	5.04	5.02
Transportasi dan Pergudangan	0.53	0.59	0.64	0.76	0.76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.50	0.55	0.60	0.66	0.66
Informasi dan Komunikasi	0.20	0.21	0.22	0.24	0.24
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.47	0.51	0.55	0.57	0.55
Real Estat	0.53	0.58	0.62	0.71	0.73
Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.60	15.15	16.61	18.95	19.10
Jasa Pendidikan	0.97	0.99	1.01	1.04	1.01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.23	0.25	0.26	0.27	0.26
Jasa Lainnya	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

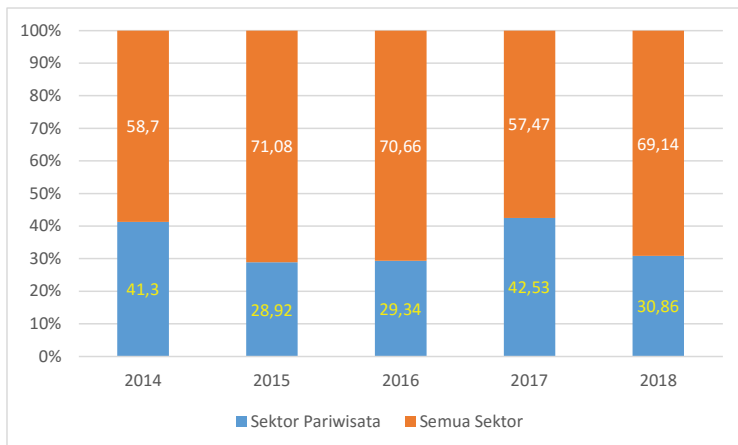
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Raja Ampat pada tahun 2018 meningkat. Nilai PDRB Raja Ampat pada tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,23 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,13 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35 persen, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar -0,01.

Dari seluruh lapangan usaha, peningkatan terbesar terdapat pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 37,93 miliar rupiah, yang semula 778,69 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 816,62 miliar rupiah pada tahun 2018. Peningkatan tersebut diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 25,34 miliar rupiah serta Konstruksi sebesar 13,84 miliar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 11,08 persen. Sementara untuk lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya adalah lapangan usaha *Real Estate* sebesar 9,39 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,97 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,75 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,35 persen.



Kontribusi relatif usaha pariwisata dalam menggerakkan roda perekonomian daerah di Raja Ampat muncul dari sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 maka terjadi kecenderungan menurun.



**Gambar 3.2.** Kontribusi Relatif Sektor Pariwisata terhadap PDRB

### 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Raja Ampat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 50,70 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga 2018 mencapai 55,89 juta rupiah (lihat tabel 3.5). Kenaikan PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Sementara itu nilai PDRB per kapita Raja Ampat atas dasar harga konstan pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tercatat bahwa nilai PDRB per kapita sebesar 45,11 juta rupiah dan pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 46,50 juta rupiah. Sehingga nilai PDRB per kapita pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen.

**TABEL 3.5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA RAJA AMPAT, 2014-2018 (MILYAR RUPIAH) (BPS KABUPATEN RAJA AMPAT, 2019)**

<b>PDRB</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
ADHB	2.297	2.336	2.416	2.469	2.676
ADHK	2.044	2.084	2.134	2.134	2.227
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
ADHB	50.703	50.877	51.835	52.198	55.887
ADHK	45.113	45.389	45.783	45.113	46.502
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)	4.39	0.61	0.87	-1.46	3.08
Jumlah Penduduk (orang)	45.310	45.923	46.613	47.301	47.885
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.66	1.35	1.50	1.48	1.24

#### **4. Perkembangan Lima Kategori Terbesar**

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 780,34 miliar rupiah atau sebesar 29,82 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, kategori ini tumbuh sebesar 0,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 4,93 persen.

Secara nominal, Pertambangan dan Penggalian menurun dari 965,65 miliar rupiah menjadi 816,62 miliar rupiah selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan selama periode 2014 – 2017 selalu menurun, hanya pada tahun 2018 saja yang naik. Pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 sebesar 4,87 persen naik dari -14,23 di tahun 2017. Pada tahun 2018, kontribusi kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 511,19 miliar rupiah atau sebesar 19,10 persen terhadap total perekonomian Raja Ampat dan menduduki peringkat ketiga. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2014 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,38 persen per tahun. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2018 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Pada 2017 laju pertumbuhan sebesar 11,59 persen, sementara pada tahun 2018 laju pertumbuhan 7,75 persen.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Konstruksi menyumbang lebih dari 5 persen kontribusi terhadap PDRB. Bahkan, selama periode 2015-2018, sektor ini menyumbang lebih dari 10 persen setiap tahunnya. Kategori Konstruksi cenderung stabil selama periode 2014-2018 dengan peningkatan kontribusi hampir di setiap tahunnya. Laju pertumbuhan di kategori ini berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada 2018, laju pertumbuhan kategori ini mencapai 5,34 persen. Laju pertumbuhan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 27,12 persen.

Pada tahun 2018 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sebesar 5,02 persen terhadap total perekonomian Raja Ampat. Kontribusinya meningkat dari 62,42 miliar rupiah di tahun 2014 menjadi 134,22 miliar rupiah pada tahun 2018. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dari 8,88 persen menjadi 6,75 persen pada periode 2014-2018.

### 3.3. Kondisi Ekonomi Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak

Nilai PDRB Pegunungan Arfak atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 189,39 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 18,97 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 170,41 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 122,53 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 134,43 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Pegunungan Arfak mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 9,71 persen lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

#### 1. Struktur Ekonomi

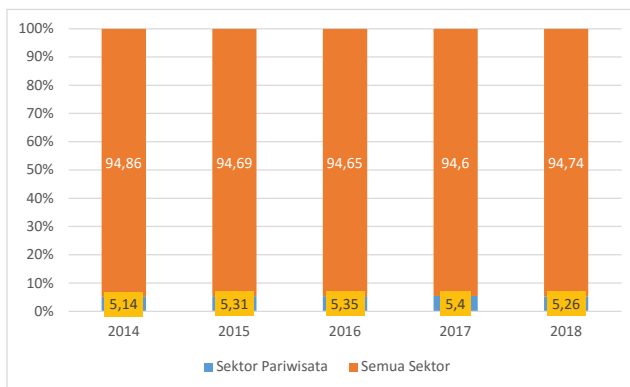
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014 – 2018) struktur perekonomian Pegunungan Arfak didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; Pertanian, Konstruksi; Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pegunungan Arfak.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pegunungan Arfak pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial, yaitu mencapai 46,57 persen (angka ini meningkat dari 41,44 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 39,53 persen (turun dari 44,64 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,30 persen (naik dari 7,41 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,76 persen (naik dari 3,72 persen di tahun 2014) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,29 persen.

Kontribusi relatif terhadap PDRB Kabupaten Pegunungan Arfak dari aktivitas yang berkaitan dengan wisata terlihat mengalami pertumbuhan yang lambat dengan kisaran nilai kontribusi relatif dari 5,16 - 5,40 persen selama lima tahun. Meskipun demikian aktivitas yang berhubungan wisata telah menggerakkan roda perekonomian di wilayah ini.



**Gambar 3.3.** Kontribusi Relatif Kegiatan Wisata

Selaian sektor pariwisata terdapat lima lapangan usaha tersebut, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan perannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, perannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 0,5 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

## **2. *Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pegunungan Arfak pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pegunungan Arfak atas dasar harga konstan 2010, mencapai 134,43 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 122,53 miliar rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 9,71 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar daerah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan Manokwari-Pegunungan Arfak. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan yaitu sebesar 19,18 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sembilan belas persen. Sedangkan sembilan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Dan juga masih terdapat tiga lapangan usaha yang tidak ada kegiatannya di Pegunungan Arfak.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sembilan belas persen tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,18 persen; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 18,88 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,35 persen; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,46 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,02 persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,62 persen; disusul Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,38 persen; Jasa Lainnya sebesar 3,64 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,32 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,58 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,37 persen; Jasa Kesehatan dan aktivitas Sosial 2,35 persen; Real Estate 1,46 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi 1,25 persen. Tiga lapangan usaha yang masih belum ada kegiatannya adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Jasa Perusahaan. Ketiadaan kegiatan ini disebabkan belum adanya investor yang melakukan kegiatan tersebut.

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

**TABEL 26. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 PEGUNUNGAN ARAFAK MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2014-2018**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.13	3.39	2.17	2.30	2.37
Pertambangan dan Penggalian	0.59	4.31	5.31	3.00	4.38
Industri Pengolahan					
Pengadaan Listrik dan Gas	2.08	4.36	6.30	3.57	2.58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	54.73	9.72	3.00	8.63	7.35
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.90	6.13	6.87	5.31	19.18
Transportasi dan Pergudangan		12.89	-6.59	3.22	5.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			8.28	7.64	6.46
Informasi dan Komunikasi		6.12	5.77	5.61	3.32
Jasa Keuangan dan Asuransi		1.30	2.56	1.89	1.25
Real Estat	3.16	4.52	1.00	2.62	1.46
Jasa Perusahaan					
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.54	9.84	4.20	7.48	18.88
Jasa Pendidikan	10.32	6.63	4.03	6.63	4.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.53	5.34	3.06	2.94	2.35
Jasa Lainnya	8.21	7.55	4.25	4.69	3.64
<b>Rataan</b>	<b>9.10</b>	<b>6.67</b>	<b>3.15</b>	<b>5.06</b>	<b>9.71</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pegaf, 2019



### 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Pegunungan Arfak atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita per tahun tercatat sebesar 5,24 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 6,69 juta rupiah (lihat tabel 3.7). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**TABEL 3.7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, 2014-2018 (MILYAR RUPIAH)**

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
ADHB	134.48	149.11	156.86	170.41	189.39
ADHK	106.00	113.07	116.64	122.54	134.43
PDRB per Kapita (Ribuan Rupiah)					
ADHB	5,243.79	5,667.13	5,833.24	6,161.19	6,695.42
ADHK	4,133.42	4,297.29	4,337.57	4,430.11	4,752.51
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	NA	3.96	0.94	2.13	7.28
Jumlah Penduduk (orang)	25 645	26 312	26 890	27 659	28 286
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	3.28	2.60	2.20	2.86	2.27

Sumber : BPS Kabupaten Pegaf, 2019

#### **4. *Pertumbuhan Dan Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan***

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2014 – 2018. Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 74,86 miliar rupiah atau sebesar 39,53 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 50,07 persen. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman Hortikultura merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 26,14 persen, disusul Peternakan sebesar 10,43 persen dan Perkebunan sebesar 7,10 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 37,14 milyar rupiah atau 49,61 persen dan subkategori Perikanan lebih rendah, yaitu 0,24 milyar rupiah atau 0,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian,

khususnya Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura. Sementara itu, 2 (dua) subkategori yang lain mengalami perlambatan, subkategori Perikanan yaitu sebesar 3,64 persen disusul subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 1,64 persen. Pada tahun 2018, kategori ini tumbuh sebesar 2,37 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 2,30 persen.

**TABEL 3.8. PERANAN SUBKATEGORI TERHADAP NILAI TAMBAH KATEGORI PERTANIAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, DAN JASA PERTANIAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (PERSEN), 2014-2018 (BPS KABUPATEN PEGAF, 2019)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	50.84	50.21	49.99	49.30	50.07
a. Tanaman Pangan	6.40	6.39	6.39	6.02	6.41
b. Tanaman Hortikultura	26.14	25.75	25.96	25.86	26.41
c. Tanaman Perkebunan	8.76	8.52	7.70	7.19	7.10
d. Peternakan	9.55	9.55	9.93	10.23	10.43
e. Jasa Pertanian dan Perburuan					
Kehutanan dan Penebangan Kayu	48.86	49.49	49.70	50.38	49.61
Perikanan	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.4. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Orang Asli Papua

Pitana (2009) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dikategorikan dalam 7 kategori seperti berikut :

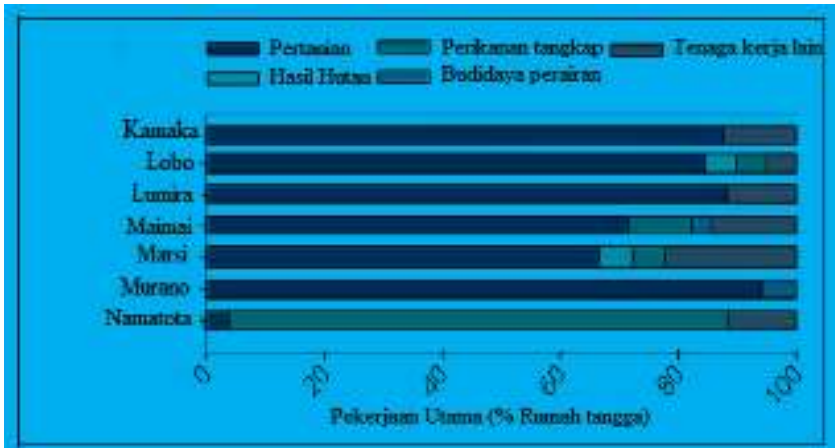
1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan
5. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat.
6. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya
7. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Meskipun ada sejumlah dampak yang bisa dihasilkan, namun dalam buku ini hanya bahas dampak terhadap pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, distribusi manfaat atau keuntungan, kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat serta pembangunan secara umum.

#### 3.4.1. Dampak Kawasan Konservasi Perairan Teluk Triton Kaimana terhadap Kondisi Sosial Ekonomi OAP

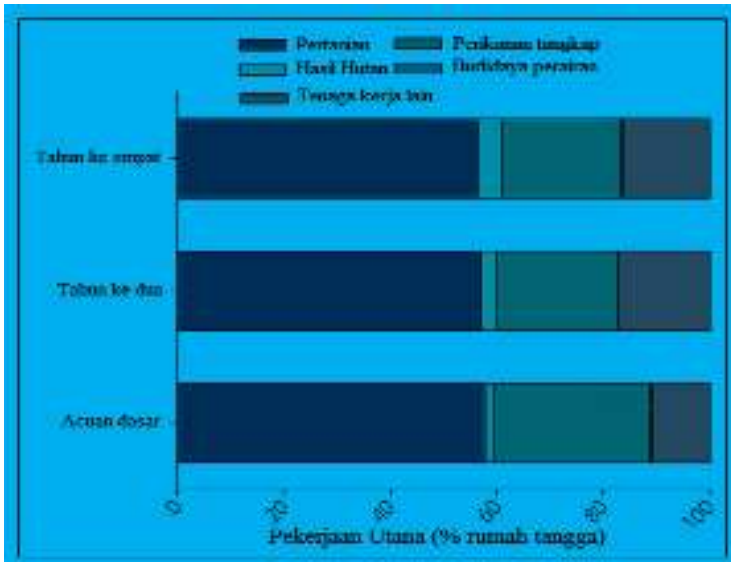
##### 1. *Pekerjaan Utama*

Hampir semua responden dari kampung-kampung di Teluk Triton bermata pencaharian adalah petani, yang mengandalkan kegiatan ekonominya dari kegiatan pertanian (Gambar 3.4). Kegiatan perikanan tangkap lebih banyak dilakukan oleh penduduk di Namatota, dengan jumlah nelayan yang lebih sedikit di Marsi, Maimai dan Lobo. Tenaga kerja lain yang berasal dari ASN/PNS ditemukan hampir pada semua kampung di Teluk Triton. Kebanyakan dari mereka adalah guru dan tenaga medis. Kegiatan budidaya rumput laut telah berkembang di Murano dan Maimai, dengan skala usaha kecil dan belum dikembangkan secara masal dalam menghasilkan pendapatan masyarakat.



**Gambar 3.4.** Pekerjaan Utama Responden berdasarkan kampung di Teluk Triton.

Perubahan pekerjaan utama selama 4 tahun pemantauan hampir tidak terjadi terutama untuk pekerjaan di bidang pertanian (Gambar 3.5). Selanjutnya, kegiatan perikanan tangkap terjadi penurunan sebagai akibat meningkatnya penduduk dalam mengusahakan hasil hutan, terutama dalam pengumpulan gaharu. Tenaga kerja ASN/PNS mengalami peningkatan sebagai akibat membaiknya pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Penempatan tenaga medis dan guru pada kampung-kampung oleh pemerintah sebagai penyebab meningkatnya proporsi tenaga kerja lain di Teluk Triton.



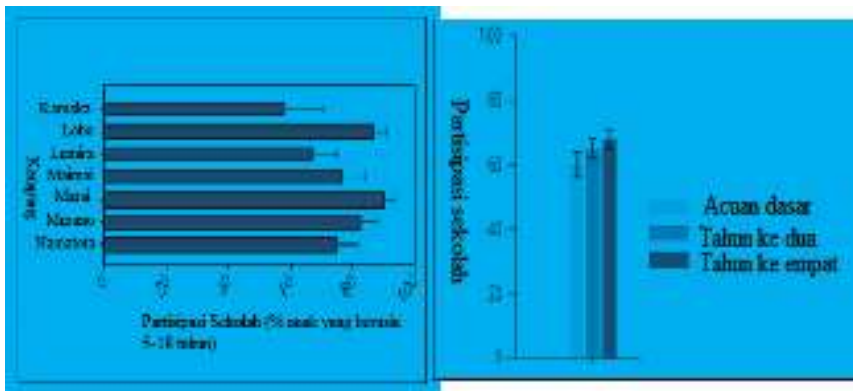
Gambar 3.5. Dampak perubahan pekerjaan utama di Teluk Triton.

## 2. Aspek Sosial-Ekonomi

### a. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APS merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kebanyakan responden pada berbagai kampung telah mengakses pendidikan (Gambar 3.6; kiri), meskipun angka ini belum menunjukkan jenjang pendidikan. Selanjutnya apabila dilihat dari perubahan partisipasi sekolah (Gambar 3.6; kanan) menunjukkan ada peningkatan yang nyata dalam mengakses pendidikan.



**Gambar 3.6.** Partisipasi sekolah (kiri) dan perubahan pendidikan (kanan) anak berusia 6 – 18 tahun di Teluk Triton

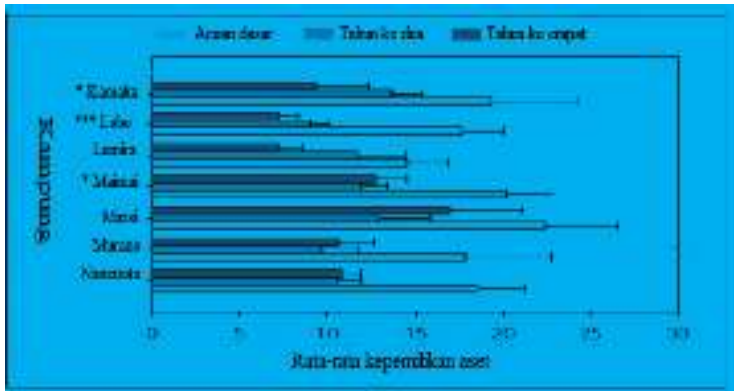
### 3. Aset Material Rumah Tangga

Kesejahteraan ekonomi OAP yang bermukim di sekitar Teluk Triton menggambarkan sumber-sumber yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan (Sen, 1999). Indikator yang digunakan dalam pemantauan kesejahteraan adalah aset material rumah tangga (*household material assets*). Indikator ini lebih menggambarkan hal sesungguhnya daripada pendapatan rumah tangga. Aset material rumah tangga dapat dibagi ke dalam kategori aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan dan dimasa depan nilainya meningkat. Sebaliknya aset konsumtif tidaklah menghasilkan, serta nilainya menurun seiring waktu. Aset konsumtif dapat menghasilkan kepuasan untuk konsumennya, namun produktif yaitu aset yang menghasilkan uang, atau nilai asetnya dapat bertambah atau dijual kembali lebih tinggi dibandingkan pada saat kita membelinya.

Hasil analisis (Gambar 3.7) menunjukkan bahwa kepemilikan aset menurun selama 4 tahun pemantauan sejak tahun 2012 (acuan dasar) terjadi hampir semua kampung di Teluk Triton. Penurunan aset rumah tangga secara nyata terjadi di Kampung Kamaka dan Maimai, dan sangat nyata di Kampung Lobo. Agak sulit untuk melihat dan menyatakan penyebab penurunan aset rumah tangga karena hubungan sebab-akibat antara pendapatan yang dihasilkan dengan belanja rumah tangga, namun demikian penurunan aset rumah tangga lebih diakibatkan oleh pendapatan lebih banyak teralokasi untuk membeli kebutuhan sehari-hari guna pemenuhan konsumsi pangan. Walaupun belum dapat dipastikan penyebab menurunnya aset rumah tangga, tetapi penurunan ini berkaitan pula dengan meningkatnya harga bahan bakar yang berdampak pada harga-harga barang dan jasa.

Hasil riset mengindikasikan pula bahwa penghasilan nelayan lebih banyak teralokasi untuk aset tidak tetap atau material konsumtif namun untuk aset-aset material rumah tangga yang tetap dan bersifat produktif sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari kepemilikan HP, Tape recorder dan TV yang lebih dominan.





**Gambar 3.7.** Kepemilikan aset rumah tangga di Teluk Triton (UNIPA & WWF Amerika, 2016)

Hasil riset ini menunjukkan bahwa KKP Teluk Triton belum secara efektif memberikan dampak ekonomi pada kegiatan perikanan dan mata pencaharian nelayan. Secara rata-rata, rumah tangga di Jejaring KKP Kaimana memiliki kesejahteraan lebih rendah. Dampak negatif yang dirasakan terhadap mata pencaharian nelayan dianggap sebagai faktor yang dipengaruhi oleh kurangnya dukungan KKP dalam pengembangan budaya, sosial, keuangan, aset modal alam, manusia dan lingkungan biofisik.

#### **4. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan, namun hal ini sulit dicapai di negara

maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangannya. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

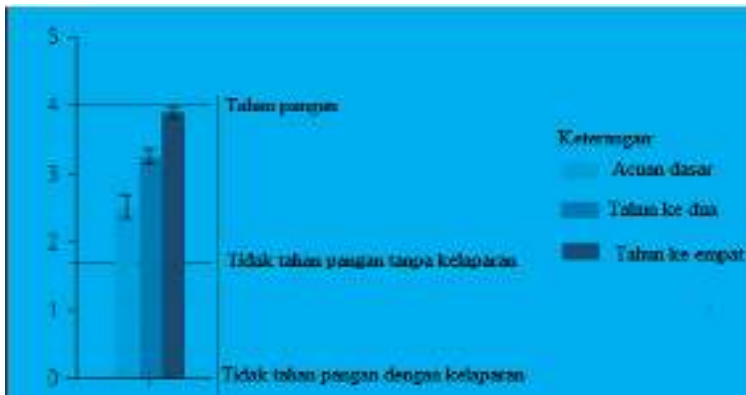
*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO (2006) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan pangan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Ketahanan pangan adalah kemampuan bagi siapapun, kapanpun, untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan aman untuk hidup yang aktif dan sehat dalam cara yang dapat diterima secara sosial (Bickel et al. 2000). Program pemantauan Bentang Laut Kepala Burung mengadopsi skala standar internasional yang membagi rumah tangga menjadi tiga kategori ketahanan pangan (Bickel et al. 2000), yaitu:

1. *Tahan pangan*: Rumah tangga menunjukkan sedikit bukti tidak tahan pangan, berarti mereka mampu mendapatkan makanan yang bergizi cukup dan aman dengan cara yang dapat diterima secara sosial.
2. *Tidak tahan pangan tanpa kelaparan*: Bukti-bukti tidak tahan pangan terlihat pada anggota rumah tangga yang khawatir tentang kecukupan makanan dan melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan makanan, yang meliputi upaya mengurangi kualitas makanan dan pola menghadapinya secara tidak biasa. Hanya sedikit atau tidak ada pengurangan asupan makanan yang dilaporkan.

3. *Tidak tahan pangan dengan kelaparan*: Asupan makanan bagi anggota rumah tangga telah berkurang hingga titik dimana para anggota rumah tangga sering mengalami rasa kelaparan secara fisik

Pemantauan sosial menunjukkan bahwa rumah tangga mengalami peningkatan mencolok pada kemampuan untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan dapat diterima secara sosial (Gambar 3.8). Selama 4 tahun pemantauan, ketahanan pangan bergerak dari tingkat “tidak tahan pangan tanpa kelaparan” menuju “tahan pangan”. Artinya perbaikan dalam ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan serta kestabilan pangan di tingkat kampung di Teluk Triton berkembang ke arah yang lebih baik. Penetapan KKP kemungkinan berperan dalam tren positif ketahanan pangan rumah tangga melalui peningkatan biomassa spesies perikanan kunci, dan kecenderungan realokasi hak terhadap sumberdaya kepada masyarakat setempat.

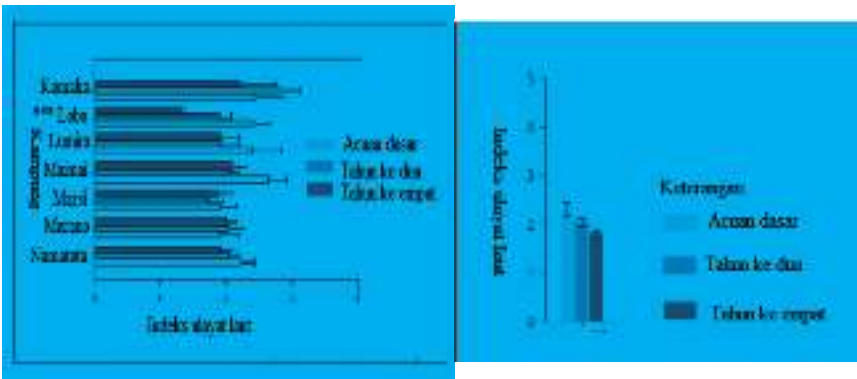


**Gambar 3.8.** Perubahan ketahanan pangan masyarakat di Teluk Triton

### 5. Aspek Budaya

Program pemantauan sosial di Teluk Triton menggunakan indeks pemenuhan hak terhadap sumberdaya. Pengukuran hak-hak yang diterima oleh masing-masing rumah tangga dilakukan selama 12 bulan pra survei. Indeks tersebut (berkisar antara nol hingga lima) menghitung jumlah hak yang diterima oleh rumah tangga dan telah dilakukan selama 12 bulan pra survei. Indeks hak ulayat mengindikasikan (Gambar 3.9) bahwa indeks hak ulayat laut selama 4 tahun pemantauan mengalami penurunan pada hampir semua kampung di Teluk Triton, dan penurunan secara nyata terjadi di Kampung Lobo. Artinya responden lebih memilih hak sumberdaya yang melekat secara turun temurun dikelola orang lain dengan perjanjian kompensasi.

Meskipun belum ada cukup bukti, kompensasi yang diberikan oleh pihak pengguna sumberdaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini perlu diantisipasi kedepan untuk mengembangkan strategi peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara pengelolaan sumberdaya laut dengan bijaksana, terutama marga-marga yang memiliki hak ulayat untuk pengelolaan tradisional yang bijaksana.



**Gambar 3.9.** Indeks hak ulayat berdasarkan kampung (kiri) dan perubahan indeks hak ulayat di Teluk Triton

### 3.4.2. Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat

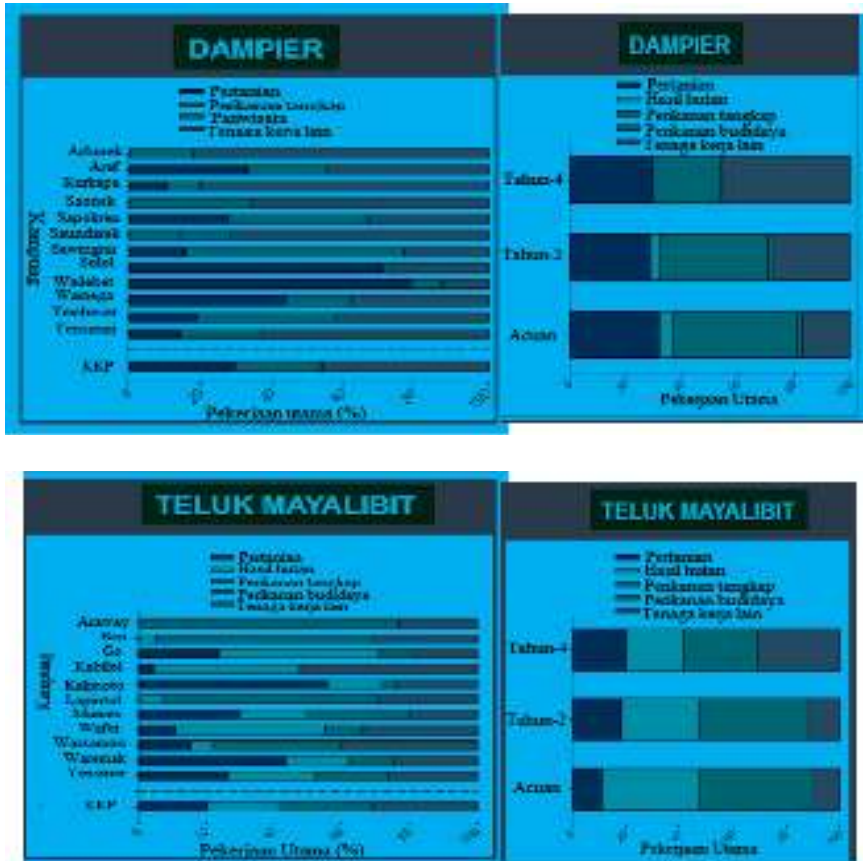
#### 1. *Pekerjaan Utama*

Pekerjaan utama bagi masyarakat di Raja Ampat pada awalnya sangat bergantung pada kegiatan perikanan dan pertanian, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Selat Dampier dan Teluk Mayalibit. Pekerjaan utama ini berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Perkembangan pembangunan di Raja Ampat telah memberikan peluang alternatif matapencaharaan. Artinya, masyarakat tidak hanya bertumpuh pada sektor perikanan dan pertanian tetapi juga pada sektor kehutanan dan pariwisata. Meskipun ada alternatif lain dalam mata pencaharian, masyarakat tetap juga mengusahakan kegiatan di bidang perikanan dan pertanian, misalnya ketika kegiatan pariwisata sepi kerana perubahan cuaca, masyarakat tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan atau mengusahakan lahan pertanian

Rumah tangga di Sawinggrai dan Saprokren kebanyakan berasal dari Biak dan Raja Ampat yang dikenal sebagai nelayan, sedangkan Solol dan Wailebet secara dominan berasal dari suku Batanta dan Tepin, yang memilih pertanian sebagai sumber penghidupan utama mereka bahkan ketika mereka tinggal di daerah pesisir (Gambar 3.10). Perubahan mata pencarian utama di Selat Dampier terjadi pada perikanan tangkap, dimana selama pemantauan tahun 2012 mengalami penurunan. Keadaan ini menjadi terbalik dengan pekerjaan utama lain (ASN, buruh pada berbagai proyek pemerintah dan adanya perdagangan hasil hutan bukan kayu seperti damar) yang mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir.

## ORANG ASLI PAPUA

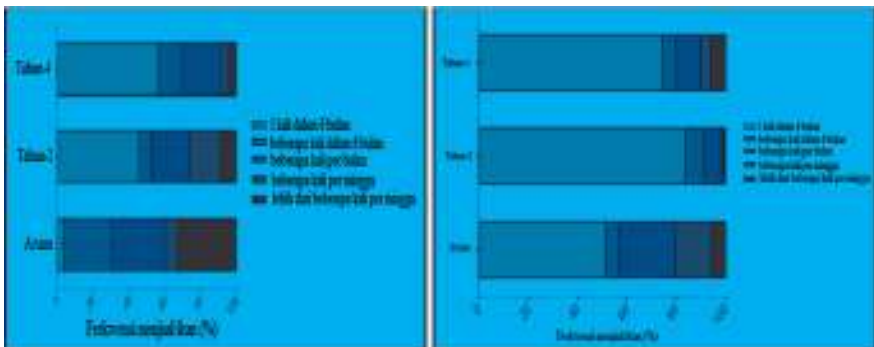
Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua



**Gambar 3.10.** Pekerjaan utama Responden di Raja Ampat berdasarkan kampung dan perkembangan perubahan (gambar atas adalah Selat Dampier; bawah adalah Teluk Mayalibit).

Adanya cuaca yang tidak mendukung (angin dan ombak) terutama pada musim angin selatan, kegiatan perikanan relatif tidak dilakukan. Tingginya pembangunan di Raja Ampat berdampak pula pada kebutuhan terhadap kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah dan tenaga kerja menyebabkan banyak masyarakat yang beralih menjadi penebang kayu, pekerja lepas, menokok sagu dan membuat perahu. Hal ini hanya terjadi sementara, yaitu ketika ada peluang ekonomi untuk mendapatkan dana tunai secara cepat. Ada kecenderungan di Teluk Mayalibit, masyarakat lebih tertarik untuk bekerja sebagai pekerja lepas dan penebang kayu, sehingga hasil laut hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga.

Dari kegiatan perikanan tangkap terlihat bahwa terjadi penurunan frekuensi penjualan ikan di antara rumah tangga, terutama frekuensi kegiatan mingguan rumah tangga, tetapi terjadi peningkatan pada kegiatan perikanan selama enam bulannya (Gambar 3.11 kiri). Hal yang sama terjadi pula penurunan kegiatan penangkapan ikan selama dua tahun pemantauan. Hal yang sama ditemukan juga di Teluk Mayalibit (Gambar 3.11 kanan).

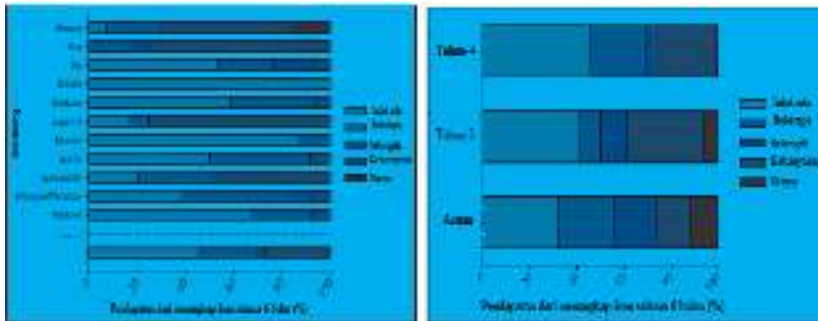


**Gambar 3.11.** Perubahan frekuensi menjual ikan (kiri = Selat Dampier; kanan = Teluk Mayalibit)

## ORANG ASLI PAPUA

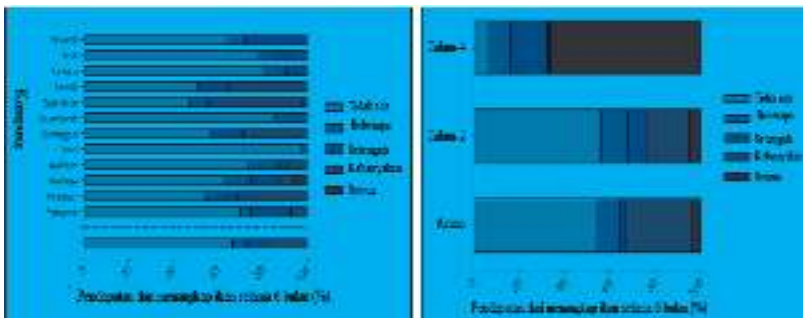
Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

Pengalihan mata pencaharian dari nelayan ke pekerja lepas, penokok sagu dan penebang kayu menyebabkan penghasilan dari perikanan menurun (Gambar 22). Teripang dan Udang paling banyak dijual (Kampung Beo), Ikan lema (Kampung Lopintol). Sebagian besar masyarakat di Teluk Mayalibit bekerja sebagai pekerja lepas, penebang kayu dan mengambil sagu.



**Gambar 3.12.** Proporsi pendapatan responden berdasarkan kampung di Teluk Mayalibit

Pendapatan rumah tangga (Saprokren, Sawinggrai dan Saonek) memiliki proporsi pendapatan nelayan yang lebih tinggi (Gambar 3.12, kiri) karena kebanyakan rumah tangga memiliki sumber mata pencaharian utama mereka untuk menangkap ikan (memancing). Sementara kebanyakan rumah tangga di Solol mengandalkan pertanian untuk penghidupan mereka, sehingga proporsi pendapatan dari kegiatan melaut hingga 6 bulan relatif tidak ada.



**Gambar 3.12.** Proporsi pendapatan responden berdasarkan kampung di Selat Dampier



Kegiatan penangkapan ikan lebih dominan pada hampir semua kampung di Selat Dampier, sehingga selama 4 tahun pemantauan dari aktivitas penangkapan terdistribusi pada hampir semua kegiatan mulai dari beberapa hingga semua proporsi pendapatan (Gambar 3.12, kanan). Artinya, perubahan proporsi pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan menjadi intensif sebagai kegiatan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan rumah tangga. Walaupun demikian, proporsi rumah tangga yang mendapatkan sebagian atau lebih pendapatan mereka dari penangkapan ikan menurun dari awal sampai periode pemantauan dua tahun. Hal ini mungkin sebagai akibat tersedianya sumber pendapatan lain bagi masyarakat di Selat Dampier. Terlihat pula bahwa lebih banyak rumah tangga lebih mengandalkan perikanan sebagai sumber pendapatan mereka dalam periode pemantauan 4 tahun.

## **2. Aspek Sosial-Ekonomi**

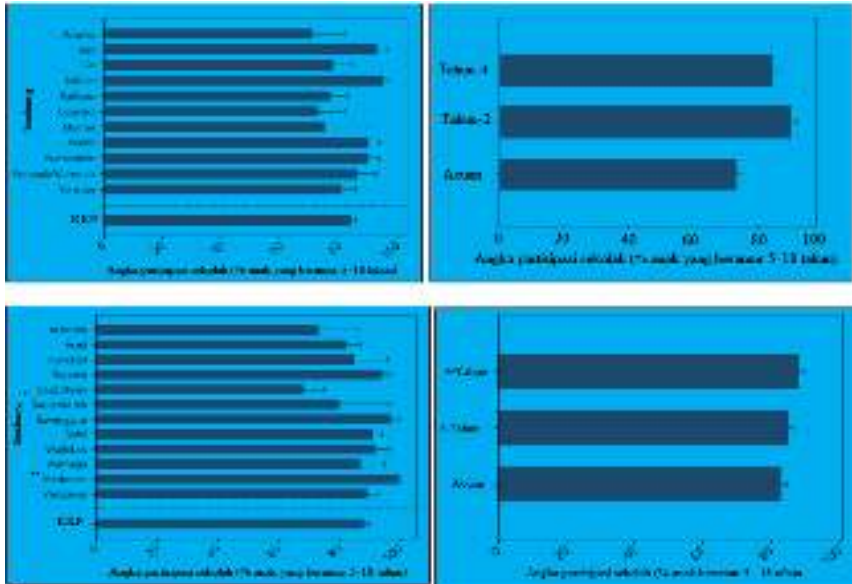
### *a. Pendidikan*

Di Teluk Mayalibit partisipasi sekolah dari kebanyakan kampung dapat dikatakan cukup baik (Gambar 3.13, atas), dan menunjukkan perkembangan angka partisipasi sekolah. Transportasi antar kampung dapat dilalui dengan jalan darat, dan hal ini memudahkan masyarakat dalam usia sekolah untuk dapat bersekolah. Adanya pembukaan jalan darat yang menghubungkan antar kampung di Teluk Mayalibit maupun ke Waisai, menyebabkan banyak orang tua yang dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagaimana di Teluk Mayalibit, di Selat Dampier (Gambar 3.13, bawah) dapat dikatakan cukup tinggi dan mengalami perkembangan selama pemantauan. Artinya, kegiatan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah termasuk kegiatan konservasi perairan yang mempromosikan pendidikan lingkungan laut mungkin telah mendorong angka partisipasi sekolah. Pada saat promosi pendidikan lingkungan secara bersamaan juga mendorong anak-anak untuk melanjutkan. Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tingkat pendaftaran anak-anak usia sekolah dapat dipengaruhi oleh kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua



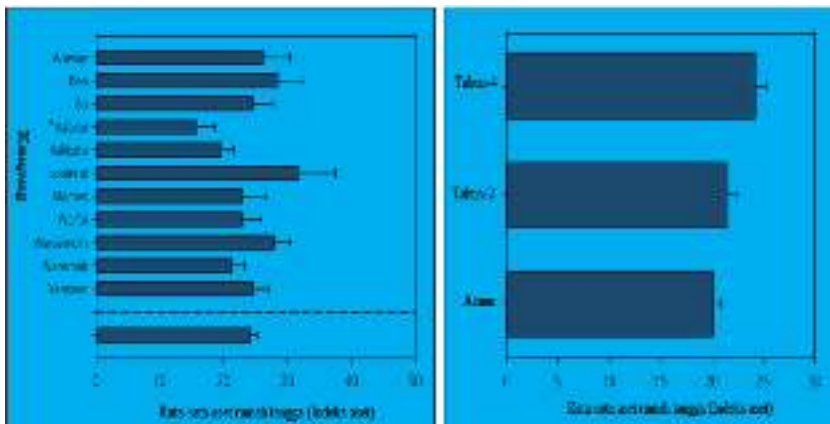
**Gambar 3.13.** Angka partisipasi sekolah dan perkembangannya;  
Atas = Teluk Mayalibit; bawah = Selat Dampier

Tingkat pendidikan orang tua dapat berperan penting dalam membangun kesadaran mereka dalam mengakses pendidikan sesuai jenjang dan usia anak-anak. Kesadaran orang tua akan pendidikan juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan angka partisipasi anak-anak usia sekolah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak yang tidak terdaftar pada tahun dasar kemungkinan besar adalah orang-orang yang tidak bersekolah dalam periode pemantauan 2 tahun.

### *b. Aset Rumah tangga*

Aset rumah tangga sangat bergantung pada daya beli dan pendapatan masyarakat. Pendapatan umumnya memiliki hubungan dengan aset rumah tangga, artinya sebagian dari pendapatan akan digunakan untuk

membeli sesuatu yang dapat dijadikan sebagai aset rumah tangga. Dengan demikian keberadaan aset rumah tangga akan menggambarkan pula tingkat pendapatan seseorang. Selanjutnya, tingkat pendapatan seseorang berkaitan pula dengan tingkat pendidikan. Lapintor, Araway dan Beo serta Warsambin memiliki aset rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kampung lain di Teluk Mayalibit. Hal ini mungkin berkaitan dengan persentasi ibu rumah tangga yang berpendidikan SMA di kampung Lopintol, Araway dan Beo cukup tinggi (lebih dari 23 %). Artinya, mereka memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Banyak masyarakat di Kampung Kabilol yang mendapatkan penghasilan dari sagu, tapi mereka terkendala dengan masalah transportasi sangat sulit untuk memasarkan sagu. Di samping bergantung pada sumberdaya tersebut, masyarakat juga memanfaatkan teripang, yang dijual dengan harga tinggi. Keadaan ini menyebabkan masyarakat yang mencari teripang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, disamping adanya pembangunan serta pemberian dana Otsus bagi pembangunan kampung. Kegiatan pembangunan bersifat padat karya yang menggunakan tenaga lokal sebagai buruh bangunan. Keadaan ini berakibat masyarakat memiliki uang lebih untuk membeli barang. Hal ini dapat dilihat selama 4 tahun pemantauan, aset rumah tangga mengalami peningkatan.

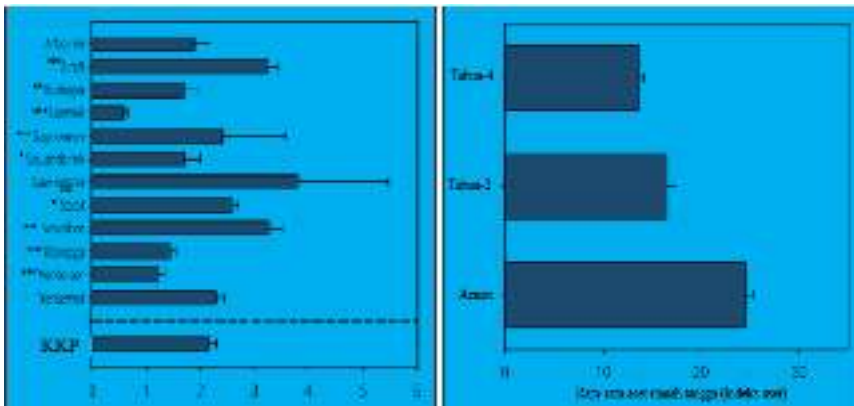


**Gambar 3.14.** Kepemilikan aset berdasarkan kampung dan perkembangan aset rumah tangga di Teluk Mayalibit.

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

Di Selat Dampier (Gambar 3.14, kiri), tingkat hak penguasaan laut dan lamanya tinggal di kampung berperan dalam menentukan tingkat aset rumah tangga. Sebagian besar keluarga di Saundarek memiliki akses terbatas terhadap kepemilikan laut dan memiliki rata-rata tinggal paling rendah di antara keluarga-keluarga lain di Selat Dampier. Hal ini dapat menjelaskan mengapa tingkat terendah aset material mereka di antara kampung-kampung lain di Selat Dampier. Terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia (2012 – 2014), menyebabkan kenaikan harga barang lainnya, termasuk masyarakat yang bermukim di Selat Dampier. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga selama pemantauan terjadi penurunan aset rumah tangga (Gambar 3.15, kanan).



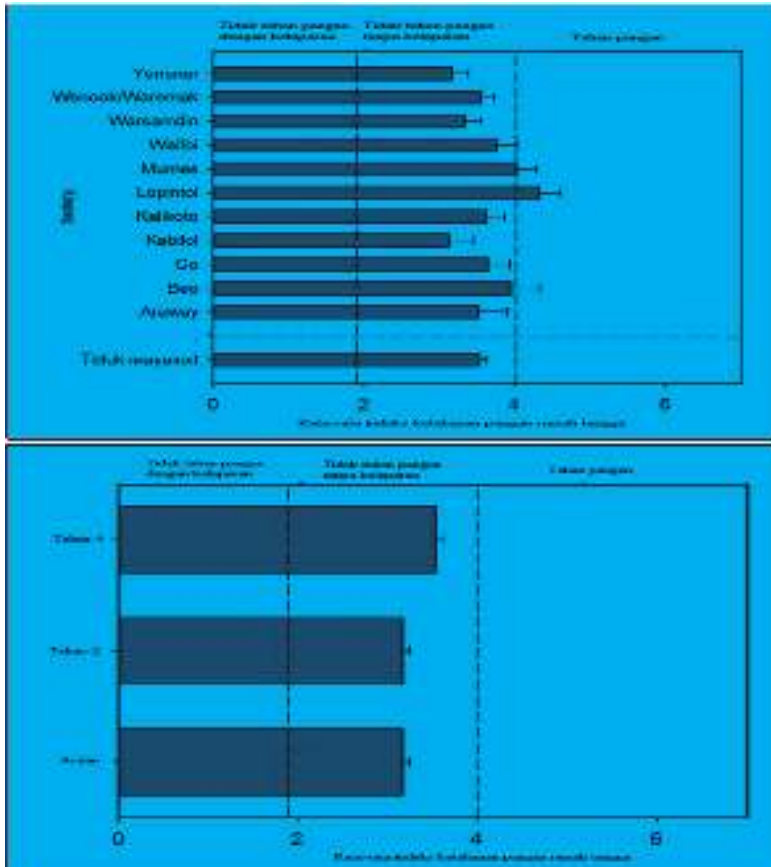
**Gambar 3.15.** Kepemilikan aset berdasarkan kampung dan perkembangan aset rumah tangga di Selat Dampier.

### c. Ketahanan pangan

Pemantauan sosial di Raja Ampat yang dilakukan oleh UNIPA-WWF Amerika selama 4 tahun (Gambar 3.16, atas) menunjukkan bahwa kebanyakan rumah tangga yang tersebar di kampung-kampung berada pada kondisi “tidak tahan pangan, tanpa kelaparan”, bahkan ada rumah tangga di kampung

Lampintol yang berada pada tingkat “tahan pangan”, termasuk rumah tangga di Kampung Beo dan Mumes. Sebagian besar masyarakat (Kampung Lopintol) menggantungkan hidupnya dari hasil laut (perikanan lema) yang tidak terlalu berpengaruh terhadap cuaca di laut. Terdapat pula rumah tangga yang sebagian besar menokok sagu (Kampung Kabilot) dan mereka ini mengalami masalah transportasi dalam pemasaran hasil.

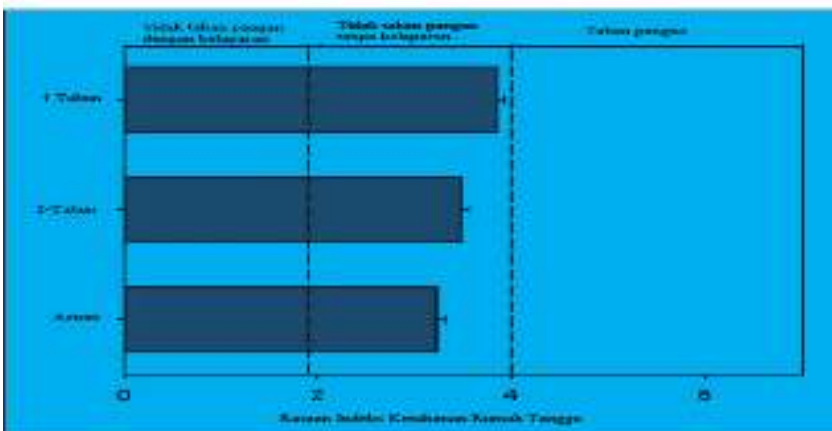
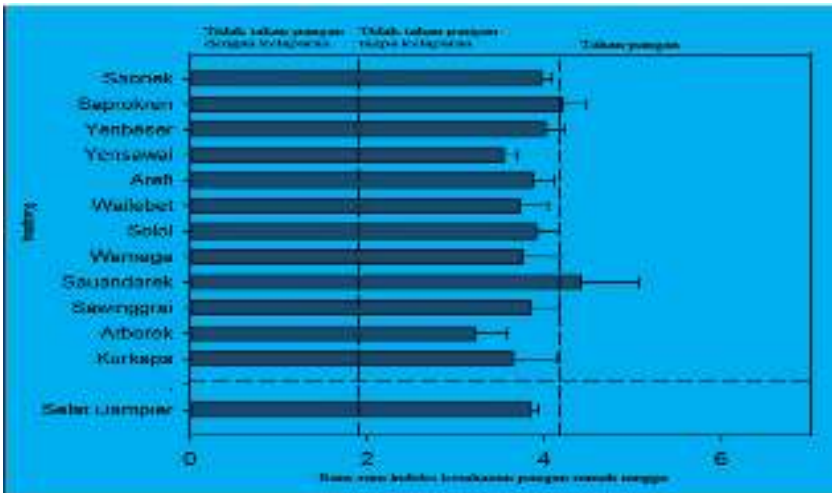
Dari aspek ketahanan pangan, selama 4 tahun pemantauan terjadi peningkatan indeks ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki kemampuan dalam mengakses bahan pangan yang bergizi. Berkembangnya kios-kios di kampung-kampung sebagai akibat pembangunan kemungkinan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pangan, dimana kios-kios ini dapat menyediakan kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula dan keperluan lain. Terbukanya isolasi daerah dengan terbentuknya modal transportasi laut dan darat memudahkan masyarakat mengakses barang dan jasa ataupun menjual hasil usaha mereka. Aspek konservasi yang digalakkan oleh berbagai Mitra Pembangunan (CII dan Rare) memberikan pengaruh yang signifikan dalam aspek perlindungan dan pemnafaatan sumberdaya perairan secara lestari.



**Gambar 3.16.** Kondisi ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan kampung (atas) dan perubahan ketahanan pangan (bawah) di Teluk Mayalibit

Gambar 3.16 memperlihatkan pula sedikit variasi yang signifikan dalam ketahanan pangan rumah tangga di permukiman di KKP Selat Dampier, menunjukkan bahwa akses terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk rumah tangga tidak berbeda jauh dengan pemukiman jika dilihat dari dampak perubahan selama pemantauan.

Status ketahanan pangan rumah tangga di Selat Dampier meningkat dari awal sampai periode pemantauan dua tahun. Ini berarti bahwa rumah tangga kurang yang mengalami kelaparan dalam periode pemantauan dua tahun dibandingkan tahun-tahun awal. Keamanan pangan rumah tangga semakin membaik dalam periode pemantauan 4 tahun.



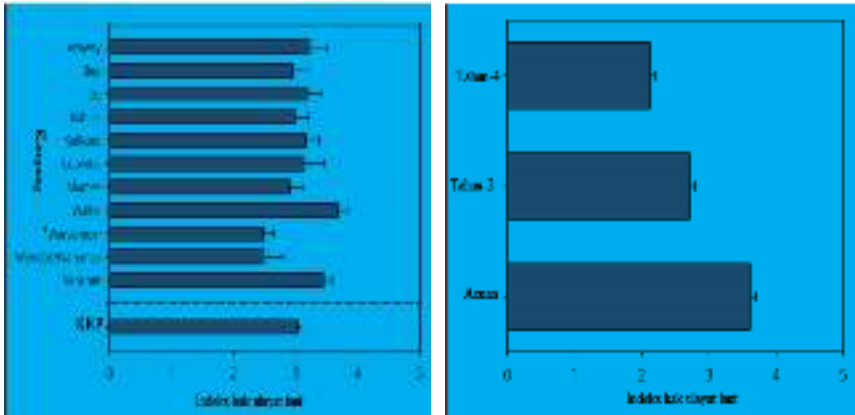
### 3. Aspek budaya

Pemanfaatan sumber daya laut berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Penggunaan cara-cara tradisional dan kearifan lokal (*sasi*) telah berhasil menjamin praktik-praktik konservasi laut guna mempertahankan sekaligus meningkatkan stok ikan bagi persediaan perikanan lestari. Dalam praktik-praktik ini terjadi keseimbangan antara mata pencaharian dan lingkungan. Di Kabupaten Kaimana khususnya dan Papua Barat secara keseluruhan, praktik pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan pendekatan kearifan lokal telah berkembang belakangan ini.

Pengelolaan sumberdaya ikan lema melalui penerapan *sasi* (di Kampung Lopintol) telah mendukung hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya. *Sasi* merupakan sistem penangkapan ikan tertutup untuk menjaga ketersediaan ikan. Sebagai praktik konservasi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, *sasi* laut menggabungkan sistem manajemen lokal, sistem klasifikasi lokal dan sistem kepercayaan lokal untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut tertentu. *Sasi* laut biasanya dilakukan selama dua minggu sampai tiga bulan sebelum ditutup selama satu hingga dua tahun, atau bergantung pada kesepakatan pemangku kepentingan di kampung.

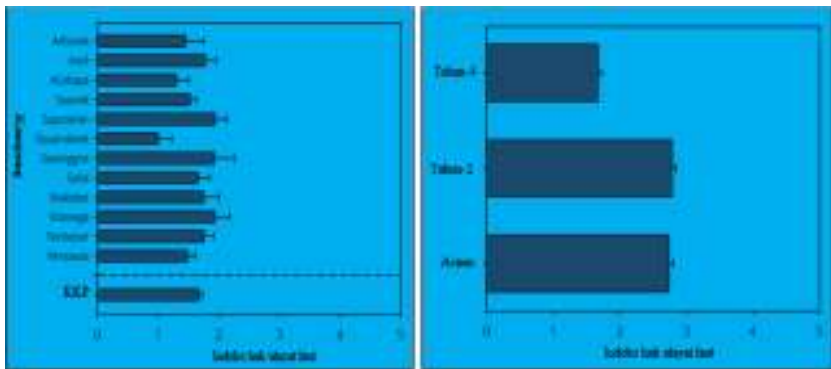
Indeks hak ulayat laut di Teluk Mayalibit berdasarkan kampung cukup tinggi, yang menggambarkan bahwa masyarakat memiliki hak terhadap wilayah adat, termasuk sumberdaya yang hidup di dalamnya. Wilayah ini telah terpetakkan dengan baik di Teluk Mayalibit dalam zonasi KKP, karena pada proses awal pembentukan KKP partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat tinggi dan mereka terlibat secara langsung dalam semua proses perencanaan dan penetapan. Namun ada kecenderungan selama pemantauan sosial ekonomi, indeks hak ulayat mengalami penurunan. Hal ini mungkin sebagai akibat adanya pengguna sumberdaya dari luar daerah diberikan hak untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dalam wilayah ulayat masyarakat. Ijin pemanfaatan diberikan oleh pemiliki hak ulayat ke pada pengguna luar dengan cara mendapatkan kompensasi. Sistem kompensasi ini sedikit menurunkan nilai-nilai kepemilikan wilayah adat.





**Gambar 4.18.** Indeks hak ulayat bersarakan kampung (kiri) dan perubahan indek hak ulayat di Teluk Mayalibit

Di Selat Dampier rumah tangga menunjukkan variasi tidak berbeda terhadap kepemilikan laut. Rata-rata lama tinggal dan memancing sebagai sumber penghidupan utama dapat menentukan tingkat rata-rata masa penguasaan laut di antara kampung-kampung di Selat Dampier. Sawinggrai dan Saproken (indeks penguasaan laut relatif lebih tinggi), artinya rumah tangga yang bergantung pada penangkapan ikan sebagai sumber penghidupan utama lebih tinggi.



**Gambar 5.19.** Indeks hak ulayat bersarakan kampung (kiri) dan perubahan indek hak ulayat di Selat Dampier

Sebagaimana di Teluk Mayalibit, di Selat Dampier menunjukkan pula terjadi penurunan. Pengembangan wisata bahari di Selat Dampier, lebih banyak rumah tangga yang terlibat dalam wisata bahari dan beberapa rumah tangga menyewakan hak ulayat mereka kepada orang luar untuk kegiatan wisata.

### 3.5. Kontribusi Kawasan Konservasi Daratan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi OAP

#### 3.5.1. Kabupaten Raja Ampat

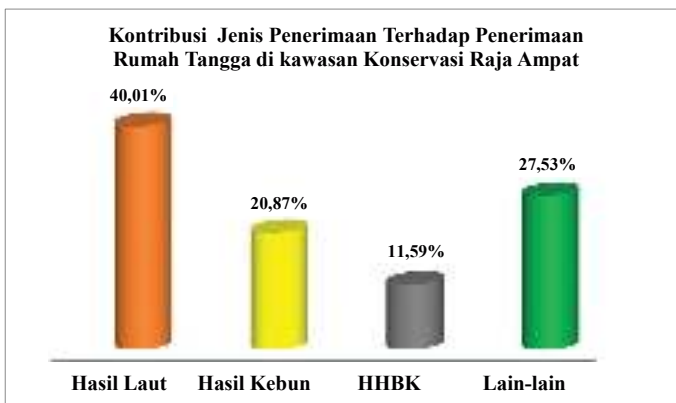
Kawasan konservasi daratan di Kabupaten Raja Ampat mulai mendapat perhatian dalam pengelolaannya dalam beberapa tahun terakhir. Selama ini pemerintah dan beberapa NGO fokus pada Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sehingga pengelolaan kawasan konservasi daratan terkesan lambat. Padahal potensi kawasan konservasi darat sangat beragama dan banyak terutama hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem hutan.

Kawasan Cagar Alam Waigeo berada di Utara Raja Ampat dimana kawasan ini berbatasan dengan kawasan Wallacea, daerah peralihan yang merupakan pertemuan dua biogeografi berbeda, Asia dan Australia. Cagar Alam Waigeo Barat seluas 95.200 ha dan Waigeo Timur sekitar 119.000 ha keduanya dipisahkan Teluk Mayalibit.

Beberapa kampung yang berada di sekitar Cagar Alam Waigeo, saat ini sudah mengekspos dan menjual potensi HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan jasa ekosistem hutan antara lain Kampung Sapokren yang masuk Cagar Alam Waigeo Barat, Kampung Warasambin (Cagar Alam Waigeo Timur) dan Warimak, Kampung Wawiyai, Kampung Pam, Gam, Selat Dampier dan Mios Manswar. Pada kampung-kampung ini masyarakat mulai menggunakan HHBK seperti daun sagu, kulit sagu untuk pembuatan senat, daun tikar sebagai bahan baku pembuatan *home stay* dan memelihara kawasan hutan yang menjadi spot pengamatan burung.

### 1. Penerimaan Tunai Rumah Tangga

Secara agregat sumber mata pencaharian yang dominan di kampung-kampung yang berada dalam kawasan konservasi di Raja Ampat masih bertumpuh pada sektor pertanian dan perikanan. Dari sisi hasil hutan kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap pendapatan total mencapai 11,59 persen. Pendapatan ini berasal dari penjualan sagu, penjualan daun sagu sebagai bahan baku pembuatan atap *home stay*, pembuatan senat, dan penjualan hasil kerajinan seperti topi, noken dan lain-lain. Topi dan noken (tas gantung) bahan bakunya berasal dari daun pandan dan tali hutan atau kulit kayu. Kampung Arborek merupakan salah kampung yang memiliki kios penjualan hasil-hasil kerajinan yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat. Pada wilayah lain masyarakat di Teluk Mayalibit dan kampung-kampung yang memiliki kawasan lindung dan konservasi sebagian besar bekerja sebagai pekerja lepas, penebang kayu dan mengambil sagu. Sagu yang dikonsumsi umumnya berasal dari sagu alam dan budidaya. Jumlah sagu yang dibudidaya di distrik Teluk Mayalibit tahun 2017 seluas 93 ha dengan produksi sebesar 40 ton/tahun. Di Kampung Sapokren dan Wawiyai terdapat areal sagu seluas 10 hektar dengan jumlah produksi per tahun sebesar 12 ton. Sagu sebagai komoditi dijual ke pasar Sorong, Waisai maupun melalui pedagang pengumpul di kampung.



**Gambar 3.20.** Kontribusi HHBK terhadap Penerimaan Rumah

Alokasi pendapatan dari hasil laut memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan keluarga yaitu sebesar 40,01 persen dan diikuti oleh pendapatan lain-lain 27,53 persen. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil berkebun hanya sebesar 20,87 persen dan sisanya bersumber dari HHBK sebesar 11,59 persen.

Sagu sebagai HHBK memiliki manfaat langsung sebagai kuliner bagi wisatawan karena sagu dapat dikemas menjadi makanan dalam bentuk Papeda, sagu lempeng dan ulat sagu dapat menjadi sate yang memberikan sajian khusus bagi wisatawan.

Ekosistem hutan memberikan manfaat berupa jasa ekosistem baik jasa pengaturan, jasa penyediaan, jasa budaya dan jasa pendukung lainnya. Jasa penyediaan berupa hasil hutan dan satwa liar memiliki nilai manfaat ekonomi sosial dan lingkungan. Dengan menjaga hutan di sekitar kampung di kawasan-kawasan konservasi saat ini masyarakat telah menerima penghasilan tambahan. Kampung Sapokren merupakan salah satu kampung di Cagar Alam Waigeo yang menikmati manfaat ekonomi dari menjaga kawasan hutan. Meskipun yang mendapat manfaat langsung hanya 10 orang ( 7,46%) dari total jumlah KK (Kepala Keluarga) di kampung. Hal ini terjadi karena adanya perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya merupakan “pemburu” satwa terutama burung, kini berubah menjadi “penjaga” satwa. Dengan menjaga habitat dan satwa setiap guide loka di kampung ini dapat menghasilkan penerimaan tambahan sebesar Rp. 200.000/jam/ kunjungan/orang. Penerimaan yang dapat diperoleh berkisar dari Rp. 500.000 – Rp. 4.000.000 rupiah per kunjungan. Karena di Sapokren ada 6 spot pengamatan burung jika dalam satu tahun ada 5 kunjungan maka nilai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh kira-kira 15.000.000 – 120.000.000 per tahun. Secara keseluruhan jumlah spot pengamatan burung di Raja Ampat tersebar pada beberapa wilayah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**TABEL 3. JUMLAH OBYEK PENGAMATAN BURUNG DI RAJA AMPAT**

No	Nama Obyek	Lokasi	Jenis Obyek Wisata
1.	Pengamatan Kangguru Warir Kalobo	Salawati Tengah	Alam
2.	Pengamatan Ular Laut Rumbabo	Salawati Utara	Alam
3.	Pengamatan Burung Wailebet	Batanta	Minat Khusus
4.	Pengamatan Burung Yenwaupnor	Waigeo Barat	Minat Khusus
5.	Pengamatan Burung Sawingrai	Meos Mansar	Minat Khusus
6.	Pengamatan Burung Kofiau	Misool	Minat Khusus
7.	Kali Biru Warsamdim	Teluk Mayalibit	Alam
8.	Pengamatan Burung Warimak	Teluk Mayalibit	Minat Khusus
9.	Pengamatan Burung Waifoi	Teluk Mayalibit	Minat Khusus
10.	Pengamatan Burung Yenbeser	Waigeo Selatan	Minat Khusus
11.	Pengamatan Burung BBI	Waigeo Selatan	Minat Khusus
12.	Pengamatan Burung Sapokren	Waigeo	Minat Khusus

Sumber : Dinas Pariwisata Raja Ampat, 2018

## **2. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Sumberdaya Alam**

Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan lindung dan konservasi Raja Ampat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan meramu baik dalam kegiatan menangkap ikan maupun berkebun merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kecuali aktivitas berburu di hutan. Waktu dalam memanfaatkannya tidak menentu tergantung kepada kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumberdaya di alam yang disesuaikan dengan musimnya. Perempuan lebih aktif dalam kegiatan seperti menokok sagu atau berkebun di sekitar hutan atau kampung sedangkan laki-laki mencari ikan, berburu di hutan atau kegiatan produktif lainnya seperti panen hasil-hasil pertanian.

Masyarakat memanfaatkan sagu sebagai makanan pokok khusus pada beberapa kampung yang berada. Pola pengambilan sagu dan sumberdaya lainnya tergantung kepada kebutuhan hidup keluarga. Secara umum status kepemilikan sumberdaya alam khususnya tanah dan lahan kebun adalah milik pribadi (*private property*) yang merupakan warisan dari orang tua. Sedangkan kepemilikan hutan dan sumber air merupakan milik komunal yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsesus yang mengatur hubungan antara masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Di kampung Sapokren marga-marga pemilik spot-spot pengamatan burung adalah Dimara, Mangaprouw, Mambrasar, Sawiyai dan Morin. Manfaat yang diterima masyarakat dari menjaga kawasan hutan di sekitar di Kampung Sapokren adalah munculnya jenis-jenis burung seperti Cendrawasih Wilson dan Cendrawasih Minor yang saat ini bermain sampai dekat kampung. Dengan menjaga jenis-jenis pohon kayu besi (*Intsia sp*) dan Damar hutan, *Dyispiros* (Harpalsem) sebagai habitat bermain burung mak masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan.

### **3. Nilai Budaya terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam**

Masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan konservasi memiliki beberapa nilai-nilai budaya yang diyakini memberikan kehidupan secara turun temurun, termasuk dalam praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam. Beberapa ritual adat dan juga acara-acara yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam serta kehidupan sehari-hari komunitas masyarakat adat pada kampung antara lain :

**Sasi.** Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya, juga

merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Di wilayah Raja Ampat pada umumnya dan secara khusus di daerah konservasi sasi biasanya dilakukan oleh pihak gereja dan tua-tua adat. Sasi di gereja dikenal dengan sebutan “Nazar sasi”. Pemerintah kampung mewakili masyarakat dan jemaat menyerahkan uang sebagai nazar untuk disembahayakan oleh majelis jemaat di gereja. Nazar ini sebagai perlambang penyerahan kawasan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus memohon perlindungan dan pertolongan. Nazar juga merupakan bentuk ikatan janji antar jemaat gereja dengan Tuhan atas semua aturan yang sudah disepakati termasuk sanksi yang akan diterima apabila hal tersebut dilanggar.

**Upacara Adat Sasi.** Setelah dilakukan nazar sasi, maka dilanjutkan dengan upacara adat. Tua-tua adat dengan bahasa setempat (bahasa daerah) mempersiapkan sesaji berupa *Kakes*, uang dan nasi untuk dipersembahkan kepada leluhur penguasa dan pemilik laut. *Kakes* berupa pinang, sirih, kapur dan rokok adalah pertanda syukur dan ikatan kekerabatan dengan para leluhur. Setelah itu alat-alat tanda batas seperti pelampung, bendera dan jangkar diarak keliling kampung dan dibawa ke lokasi yang akan disasi. Tua-tua adat melepaskan sejaji ke laut. Sesaji tersebut diikat dengan benang sebagai satu rangkaian *kakes* dan dilepaskan oleh tua-tua adat satu per satu ke laut sambil membaca doa penyerahan dalam bahasa daerah.

#### **4. Sanksi-sanksi Adat atas Pelanggaran SDA**

Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan aturan adat dan batas-batas hak ulayat akan dikenakan sanksi denda. Bentuk denda yang dapat dilakukan masyarakat berupa pembayaran uang atau barang seperti piring dan lain-lain. Hal ini berlaku untuk semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Sanksi yang paling ditakuti adalah nazar sasi, karena mengandung resiko kesakitan bahkan bisa menyebabkan kematian.

# 4

## MANFAAT BISNIS PARIWISATA BAGI ORANG ASLI PAPUA PEMBELAJARAN DARI RAJA AMPAT

### 4.1. Perkembangan Pariwisata Berbasis Konservasi di Raja Ampat

#### 4.1.1. Sejarah

Cikal bakal Ekowisata bahari di Raja Ampat adalah sebuah resort di Pulau Kri yang dimiliki pengusaha berkebangsaan Belanda yang mulai beroperasi pada akhir dasawarsa 1990 (Arman, 2014; Waimbo, 2012), ketika Kepulauan Raja Ampat masih merupakan bagian dari Kabupaten Sorong. Tidak lama kemudian sebuah *liveaboard* memulai kegiatan ekowisata di Raja Ampat. Selanjutnya, perkembangan ekowisata di Raja Ampat tidak dapat dilepaskan dari kegiatan konservasi perairan. Secara umum, kegiatan konservasi perairan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dapat dibedakan menjadi kawasan konservasi yang dikelola daerah, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), dan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pusat, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).



Rintisan, perencanaan, penetapan dan pengelolaannya KKPД Raja Ampat mendapat dukungan dari LSM konservasi internasional yakni CI, WWF dan TNC. Bersama CI dan TNC, WWF terlibat dalam kajian-kajian sumberdaya perairan serta sosialisasi hasilnya kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Raja Ampat, baik Pemerintah Daerah, tokoh adat, serta masyarakat pada umumnya. Kegiatan konservasi selanjutnya berupa perencanaan, penetapan dan pengelolaan KKPД Raja Ampat didukung oleh CI dan TNC. Sponsor utama yang menyediakan dukungan dana untuk pengembangan KKPД Raja Ampat adalah LSM filantropi internasional The Walton Family Foundation dan The David and Lucille Packard Foundation. Beberapa kegiatan pendukung dalam pengembangan KKPД Raja Ampat, seperti kegiatan kajian sumberdaya perairan, juga mendapat dukungan dana dari Bank Dunia. Kegiatan-kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam pengembangan KKPД juga melibatkan universitas setempat, yakni Universitas Cenderawasih, yang di kemudian hari menjadi Universitas Papua. Penetapan batas KKPД Raja Ampat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat adat setempat di masing-masing kawasan, kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Diseminasi kajian-kajian kelautan yang dilakukan oleh LSM internasional tersebut memancing minat wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat (Waimbo, 2012).

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat merupakan suatu jejaring kawasan konservasi yang terdiri dari lima KKPД, yaitu KKPД Kepulauan Ayau, KKPД Teluk Mayalibit, KKPД Selat Dampier, KKPД Kofiau, dan KKPД Misool Selatan. Jejaring ini dikelola oleh UPTD KKPД Raja Ampat, dengan dukungan pengelolaan oleh CI dan TNC. Selain itu, terdapat jejaring suaka alam perairan di bawah pengelolaan Balai KKPД Kupang yang terdiri dari dua KKPД, yaitu KKPД Wayag dan KKPД Waigeo Barat Kepulauan. Pengelolaan jejaring KKPД di Raja Ampat juga mendapat dukungan CI. Luas keseluruhan jejaring kawasan konservasi perairan di Raja Ampat 1.325.370 ha dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1. Kawasan konservasi terkecil adalah KKPД Teluk Mayalibit, seluas 53.100 ha, dan kawasan terluas adalah KKPД Misool Selatan, seluas 366.000 ha.

**TABEL 4.1. JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI RAJA AMPAT**

No	Kawasan Konservasi Perairan	Luas (Ha)
1	Ayau Asia	101.400
2	Teluk Mayalibit	53.100
3	Selat Dampier	303.200
4	Kofiau-Boo	170.000
5	Luas KKP	993.740
6	Wayag Saing	271.630
7	Waigeo Barat Kepulauan	60.000
8	Luas KKPN	331.630
9	Luas KKP di Raja Ampat	1.325.370

Sumber: (Mustaghfirin et al., 2012)

Rezim konservasi yang diterapkan pada jejaring kawasan konservasi perairan bersifat luwes dengan menerapkan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan yang dibolehkan di kawasan konservasi perairan dapat dilakukan di zona-zona yang telah ditentukan. Ekowisata berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di hampir semua zona pemanfaatan di jejaring KKP Raja Ampat. Zonasi di jejaring KKP di Kepulauan Raja Ampat disajikan pada Gambar 3.21.



Kegiatan operasional pengelolaan KKP terdiri dari (i) pengawasan (patroli), (ii) penjangkauan dan pengembangan ekonomi, dan (iii) pemantauan sumberdaya di kawasan konservasi dan pemanfaatannya (UPTD-KKPD Raja Ampat, 2015). Operasional KKP pada rentang wilayah yang cukup luas seperti di Raja Ampat membutuhkan sumberdaya yang banyak, baik dari segi pendanaan maupun keahlian. Dukungan dana dari LSM Filantropi Internasional dan dukungan keahlian dari LSM konservasi internasional memiliki arti penting dalam pengembangan KKP di Raja Ampat, mengingat Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengelola kawasan perairan, termasuk mengelola KKP, memiliki keterbatasan, baik pendanaan maupun keahlian.

Kajian awal terhadap sumberdaya perairan di Raja Ampat dimulai pada tahun 2001. Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Daerah secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada Tahun 2007, yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat pada Tahun 2008. Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya diperbaiki dengan peraturan-peraturan pemerintah Raja Ampat berikutnya, termasuk peraturan pembentukan struktur tatakelola KKPD Raja Ampat. Antara tahun 2001 sampai tahun 2007 terjadi proses-proses penting berupa deklarasi adat tentang batas-batas KKP di wilayah adatnya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk dikelola oleh UPT KKPD (Rudyanto et al., 2016). Pembentukan KKP dan lembaga pengelolanya dipermudah oleh kebijakan otonomi daerah.

Dua isu penting menyangkut kegiatan konservasi perairan di Raja Ampat adalah: (i) LSM, terutama LSM internasional, tidak memiliki wewenang untuk mengelola kawasan konservasi, dan (ii) dukungan pendanaan untuk pengembangan KKP kepada CI dan TNC di Raja Ampat telah direncanakan akan berakhir pada tahun 2017. Implikasinya, perlu transfer keahlian dari CI dan TNC kepada Pemerintah Daerah Raja Ampat untuk mengelola jejaring KKPD; dan perlu alternatif pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan

KKPD yang menggantikan dana yang disediakan oleh The Walton Family Foundation dan David and Lucile Packard Foundation sampai tahun 2017. Ekowisata dipandang dapat menjadi solusi untuk pendanaan berkelanjutan yang mendukung anggaran Pemerintah Daerah Raja Ampat untuk mengelola KKPD dengan kerangka Pembayaran Jasa Lingkungan. Dengan kerangka Pembayaran Jasa Lingkungan (*payment of ecosystem services*), wisatawan dan peneliti diwajibkan membayar tarif pemeliharaan jasa lingkungan ketika memanfaatkan jasa lingkungan di KKP Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerbitkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 sebagai dasar hukum bagi UPTD KKPD Raja Ampat untuk memungut pembayaran tarif pemeliharaan jasa lingkungan dari wisatawan.

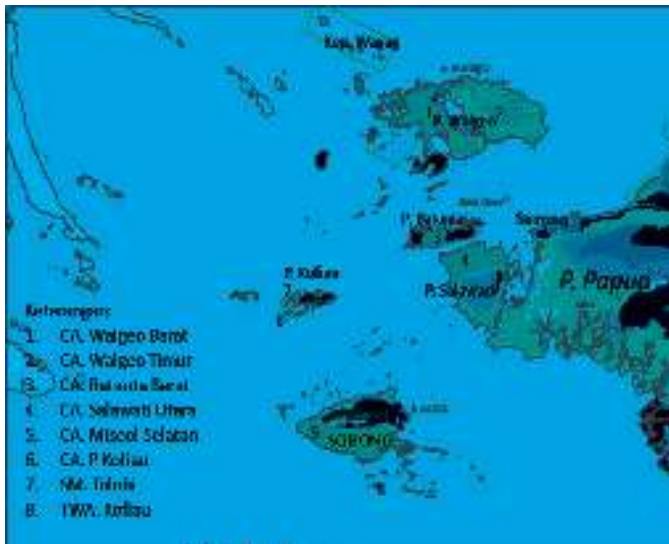
Dana yang bersumber dari pembayaran pemeliharaan jasa lingkungan secara umum kemudian dibagi menjadi dua bagian. Rata-rata sebesar 30% dari penerimaan tarif pemeliharaan jasa lingkungan yang diperoleh dari wisatawan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai penerimaan retribusi daerah. Sisanya digunakan oleh UPTD KKPD Raja Ampat bersama-sama dengan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah untuk mengelola jejaring KKPD Raja Ampat (Atmodjo et al., 2017). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2014, dana pemeliharaan jasa lingkungan yang dikelola oleh UPTD KKPD Raja Ampat dialokasikan untuk 2 kegiatan, yakni (a) biaya operasional dan non-operasional UPTD KKPD Raja Ampat, dan (b) Dana Kesejahteraan Masyarakat. Dana Kesejahteraan Masyarakat (DKM) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000.000 setahun, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan UPTD KKPD Raja Ampat. Perubahan besaran DKM ditetapkan dengan peraturan Bupati Raja Ampat.

Menyusul regulasi pemerintah pusat pada tahun 2016 yang mengalihkan tanggung jawab urusan kelautan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, dilakukan perubahan kedudukan UPTD KKPD Raja Ampat dalam struktur pemerintahan. Kedudukan UPTD KKPD Raja Ampat dialihkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 18 Tahun 2014 sebagai landasan hukum bagi UPTD KKPD Raja Ampat untuk memungut pembayaran tarif pemeliharaan jasa lingkungan dari wisatawan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tidak terdapat DKM, tetapi terdapat sebutan lain yaitu dana non-operasional berupa dana jasa lingkungan. Besaran dana jasa lingkungan tidak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 dan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur khusus mengenai jasa lingkungan dari dana pemeliharaan jasa lingkungan.

Literatur mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat setempat sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Menurut paradigma desentralisasi demokratis (*democratic decentralization*), masyarakat setempat memiliki pengetahuan lokal yang bermanfaat dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi. Selain itu, masyarakat setempat adalah pihak yang paling bergantung pada sumber daya alam di kawasan konservasi (Larson and Ribot, 2004), sehingga pengelolaan kawasan konservasi akan akuntabel dengan adanya partisipasi masyarakat setempat. Paradigma ini mendorong transfer kewenangan pengelolaan kawasan konservasi dari pemerintah pusat tidak hanya kepada lembaga pemerintah pada jenjang terbawah, tetapi juga kepada lembaga masyarakat lokal. Pendekatan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (*community-based natural resource management/CBNRM*) sangat sesuai dengan paradigma desentralisasi demokratis. Cabang-cabang kegiatan pengelolaan di kawasan konservasi dapat dilakukan dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas (PSDABK), atau dengan istilah yang lebih singkat: pengelolaan berbasis komunitas (PBK). Keterlibatan masyarakat adat dalam menetapkan batas-batas kawasan KKPD (Mustaghfirin et al., 2012) dan komunitas nelayan setempat sebagai pengguna sumberdaya dalam merancang zona-zona di dalam KKPD (Agostini et al., 2012) dapat dipandang sebagai penerapan PBK.

Selain kegiatan konservasi jejaring KKPD di bawah pengelolaan UPTD KKPD Raja Ampat dan KKPN di bawah BKKPN Kupang, selama periode tahun 2005 – 2015 Bank Dunia mendanai kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP II) (Atmodjo et al., 2017). Program ini meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi di sekitar kampung. Masyarakat kampung dilatih untuk melakukan evaluasi terumbu karang, dan menetapkan zona larang ambil di sekitar kampung yang dinamai Daerah Perlindungan Laut (DPL). Program ini juga menerapkan pendekatan PBK dengan mengembangkan kelembagaan pengelolaan terumbu karang yang di dalamnya terdiri dari lembaga masyarakat adat dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sejumlah 39 Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) terbentuk dan 40 kawasan DPL ditetapkan di 39 kampung di Raja Ampat. Kawasan konservasi (DPL) yang dibentuk melalui program COREMAP merupakan rezim yang paling ketat, yaitu zona larang ambil (*no take zone*). Namun demikian, LPSTK bentukan program COREMAP tidak lagi berfungsi sejak berakhirnya program tersebut.



Sumber: ("Konservasi SDA Raja Ampat," n.d.)

**Gambar 3.22.** Peta Kawasan Konservasi Daratan di Raja Ampat

Ada hubungan timbal balik antara ekowisata dan konservasi. Kegiatan konservasi menghasilkan jasa lingkungan yang dinikmati oleh wisatawan dan para pelaku wisata, di lain pihak ekowisata memberikan kontribusi dalam pendanaan kegiatan konservasi dan menjadi sumber pendapatan bagi penduduk yang berdiam di dalam atau sekitar kawasan konservasi. Ekowisata juga menjadi alternatif bagi pemanfaatan sumber daya secara ekstraktif di kawasan konservasi, terutama alternatif bagi pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal dan destruktif. Ekowisata diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan di kawasan konservasi. Jejaring KKP dan kegiatan konservasi darat di Kepulauan Raja Ampat dengan demikian merupakan modal bagi ekowisata, sedangkan ekowisata mendukung pelestarian alam. Kepuasan masyarakat lokal terhadap ekowisata akan berdampak pada dukungan mereka terhadap kegiatan konservasi, sekaligus merupakan keberhasilan kegiatan konservasi.

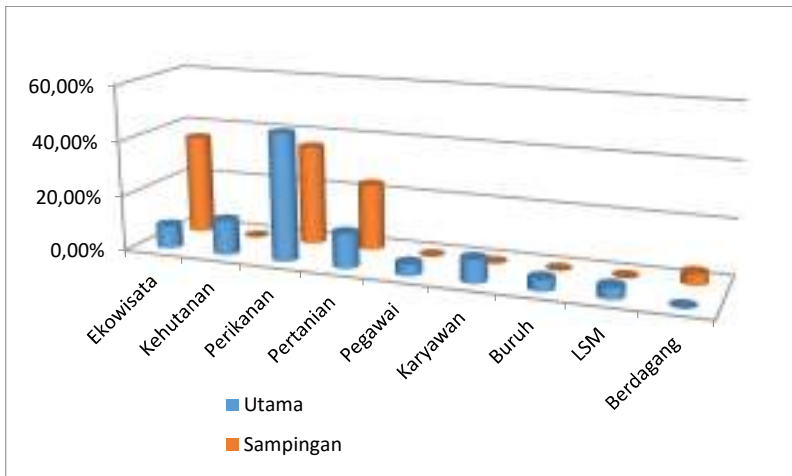
#### 4.1.2. Strategi Penghidupan Rumah Tangga.

Dari hasil wawancara terhadap responden rumah tangga, diperoleh informasi bahwa cukup banyak rumah tangga (32,65%) yang berkecimpung dalam bidang ekowisata. Namun demikian hanya sebagian kecil rumah tangga (8,33%) yang mengandalkan usaha ekowisata sebagai sumber utama untuk penghidupan mereka. Sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan perikanan sebagai kegiatan utama untuk menghidupi keluarga (45,83%). Mata pencaharian utama dan sampingan rumah tangga yang diwawancarai disajikan pada Gambar 3.22. Menarik bahwa meskipun sebagian besar wilayah darat Kepulauan Raja Ampat adalah cagar alam, terdapat rumah tangga yang mengandalkan usaha kehutanan sebagai mata pencaharian utama, yaitu pembalakan dan operator *chainsaw*.

Di antara responden yang belum berusaha di bidang ekowisata, lebih dari separuhnya (54%) menyatakan minat untuk berkecimpung dalam usaha ekowisata. Sebagian besar (61,54%) rumah tangga menyatakan bahwa modal merupakan kendala yang menyebabkan mereka belum memulai ekowisata.



Rumah tangga lainnya menyatakan alasan yang bervariasi sebagai kendala belum mulai usaha, antara lain ketiadaan tempat usaha untuk *homestay*, tidak memiliki pengetahuan pemasaran, dan sebagian besar sisanya tidak dapat mengemukakan alasan. Sebagian besar (46,15%) dari yang berminat berusaha ekowisata menyatakan bahwa usaha ekowisata menjanjikan penghasilan yang banyak dalam waktu singkat, 30,77% di antaranya menyatakan usaha ekowisata sebagai upaya konservasi alam dan budaya.



**Gambar 7.22.** Mata pencaharian utama dan sampingan rumah tangga

### 4.1.3. Aset Penghidupan OAP Raja Ampat

#### **a. Modal Alam**

Perikanan merupakan sumber penghidupan utama OAP di Kepulauan Raja Ampat. Terumbu karang yang sehat merupakan modal alam yang penting bagi penduduk yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Kajian kelautan menyimpulkan bahwa sebagian besar terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat berada dalam kondisi kesehatan yang masuk pada kategori sangat bagus sampai sedang (McKenna et al., 2002). Kondisi terumbu karang tersebut mendorong upaya konservasi untuk menjamin kelangsungan manfaatnya bagi masyarakat Raja Ampat. Jejaring KKP dengan demikian merupakan upaya melestarikan modal alam Raja Ampat.

Kawasan Raja Ampat memiliki keragaman ekosistem yang sangat tinggi, yang menjadi habitat bagi keragaman hayati yang sangat tinggi. Keragaman ekosistem dan keragaman hayati juga merupakan modal alam bagi usaha ekowisata. Keindahan alam Raja Ampat yang memiliki keragaman ekosistem dan keragaman hayati telah mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat. Terdapat lebih dari 540 jenis karang keras (75 persen dari total jenis di dunia), lebih dari 1.000 jenis ikan karang, dan 700 jenis moluska (Coremap II Raja Ampat 2009 dan Pemda Raja Ampat 2006). Selain itu Raja Ampat juga kaya akan padang lamun, hutan mangrove yang tersebar disetiap pinggir pantai, dan pantai tebing berbatu yang menjadi salah satu objek wisata bagi para wisatawan baik asing maupun lokal (Randan, 2011). Jenis-jenis ikan yang banyak ditangkap oleh nelayan di wilayah studi adalah jenis-jenis ikan karang seperti ikan cakalang, ikan oci, ikan gutila, ikan bubara dan ikan merah.

Selain sumber daya perairan, wilayah darat Kepulauan Raja Ampat juga memiliki keanekaragaman hayati. Wilayah darat Kepulauan Raja Ampat memiliki ekosistem yang khas yang relatif masih utuh, dan tumbuhan serta hewan yang khas. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan ditetapkannya

sebagian besar wilayah darat Kepulauan Raja Ampat sebagai Cagar Alam (“BBKSDA Papua Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” n.d.). Cagar alam yang terdapat di Kepulauan Raja Ampat dengan demikian merupakan modal alam bagi ekowisata. Namun demikian, cagar alam merupakan rezim konservasi yang paling ketat, sehingga pemanfaatan modal alam ini bagi masyarakat perlu diwacanakan oleh para pemangku kepentingan.

Sumber daya alam, terutama daratan, merupakan aset komunal, yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh kelompok pemilik hak ulayat secara komunal. Hasil hutan berupa hewan dan tumbuhan liar dimanfaatkan bersama-sama oleh komunitas pemilik hak ulayat. Lahan kebun pada dasarnya milik masyarakat adat namun tanaman yang diusahakan merupakan milik pribadi rumah tangga yang menanamnya. Meskipun ada anggota masyarakat yang berpendapat bahwa sumber daya perairan bebas diakses oleh siapa saja, namun pandangan umum di Kepulauan Raja Ampat menyatakan bahwa sumber daya perairan juga merupakan aset komunal yang dikuasai dan dikelola oleh kelompok pemilik hak ulayat sebagaimana pengelolaan sumber daya alam di darat. Keberadaan sasi merupakan petunjuk adanya pengelolaan sumber daya perairan secara komunal oleh kelompok masyarakat (Randan, 2011). Tatakelola ekowisata sebagaimana diuraikan di atas juga menunjukkan bahwa sumber daya perairan dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat mengerahkan kekuasaan adatnya untuk membuat aturan tatakelola untuk memastikan manfaat ekowisata bagi mereka. Secara de facto kawasan ekowisata Kepulauan Wayag adalah modal alam milik masyarakat adat di Kampung Selpele, dan kawasan ekowisata Kali Biru merupakan modal alam bagi masyarakat adat pemiliknya yang bermukim di Kampung Warsambin. Belum ada insiden antara OAP di Misool Selatan dengan MER dalam hal pemanfaatan ekowisata karena lokasinya yang cukup jauh. Dengan demikian belum dapat disimpulkan apakah kawasan Pulau Batbitim dan Pulau Daram merupakan modal alam bagi usaha ekowisata OAP yang bermukim di KKP Misool Selatan, atau eksklusif dialihkan kepada MER.

Tidak semua responden memiliki lahan kebun. Sebanyak 58,33 persen responden mengusakan kebun untuk bercocok tanam buah-buahan atau sayuran. Luas lahan kebun dari responden yang memiliki lahan kebun berkisar antara 0,04 ha sampai 4 ha, dengan rata-rata luas kebun 0,72 ha. Tanaman yang diusahakan oleh responden diuraikan pada pembahasan mengenai modal fisik.

Hampir separuh (41,07 persen) dari responden memiliki rumah yang masuk dalam kategori rumah permanen. Proporsi responden yang memiliki rumah non-permanen masih cukup besar, sekitar hampir seperempatnya (23,21 persen). Kelompok responen yang banyak memiliki rumah yang termasuk kategori non-permanen adalah para pemandu wisata (36,84 persen dari para pramuwisata). Sebagian besar (75,00 persen) responden memiliki rumah yang dibangun di atas tanah, sisanya berupa rumah panggung di atas tanah dan panggung di atas air. Sebagian besar responen memiliki rumah berlantai semen (69,64 persen), sedangkan rumah-rumah panggung berlantai papan. Hampir separuh dari responden (48,21 persen) memiliki rumah berdinding tembok. Masih terdapat responden yang memiliki rumah dengan dinding dari atap rumbia (10,71 persen), yang umumnya berupa rumah rumah panggung di atas tanah atau di atas air. Kondisi bangunan rumah responden disajikan pada Tabel 20. Sebagian besar (81,08 persen) responden memiliki rumah yang dibangun secara swadaya, sisanya memiliki rumah yang diperoleh dari Bantuan Dana Desa.

## ***b. Modal Fisik***

### ***1. Rumah***

Kondisi bangunan dan rumah masyarakat berdasarkan kategori bangunan sebangian besar sudah memiliki rumah permanen. Bentuk rumah sebagian besar (75%) panggung diatas tanah dengan lantai semen, dinding tembok dan atap seng atau asbes.

**TABEL 4.2. KONDISI BANGUNAN RUMAH YANG DIMILIKI RESPONDEN**

Kondisi bangunan rumah		Proporsi (%)
Kategori bangunan	Non-permanen	23,21
	Semi-permanen	35,71
	Permanen	41,07
Bentuk	Panggung di atas air	8,93
	Panggung di atas tanah	16,07
	Di atas tanah	75,00
Lantai	Tanah	1,79
	Papan	28,57
	Semen	69,64
Dinding	Rumbia	10,71
	Papan	28,57
	Setengah tembok	12,50
	Tembok	48,21
Atap	Rumbia	19,64
	Seng atau asbes	80,36

Sumber : Data Primer, 2019.

## 2. Aset rumah tangga

Aset rumah tangga non-usaha yang dimiliki oleh responden dikategorikan menjadi meubel, perabot rumah tangga, alat dapur, elektronik penerangan, sanitasi, dan kendaraan. Meubel yang dimiliki antara lain meja, kursi (bangku) dari kayu atau plastik, serta lemari dan tempat tidur kayu. Perabot rumah tangga yang dimiliki antara peralatan makan yang terbuat dari plastik atau perak. Alat-alat dapur antara lain kompor dan alat-alat masak dari logam atau plastik. Perangkat elektronik yang dimiliki antara lain telepon genggam, perangkat audio video, televisi, dan perangkat antena parabola. Alat penerangan yang dimiliki adalah genset dengan kapasitas kecil berbahan bakar bensin. Alat sanitasi yang dimiliki adalah tangki air. Kendaraan yang

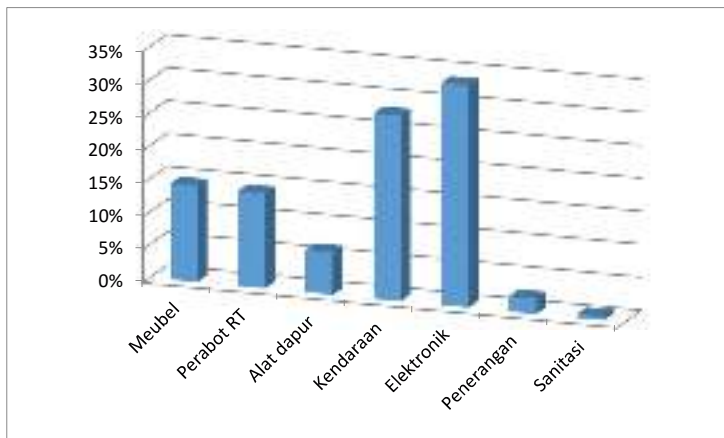
dimiliki responden adalah kendaraan roda dua, serta perahu kayu atau fiber glass yang dilengkapi dengan motor tempel dengan daya 15 PK. Satu orang responden menyatakan bahwa perahu fiberglass dan motor tempel yang dimilikinya bersumber dari bantuan Dana Desa.

Rata-rata nilai aset rumah tangga non-usaha yang dimiliki oleh responden berkisar antara Rp 12.510.000,- sampai Rp 118.680.000,-, dengan rata-rata Rp 14.722.000,-. Kepemilikan aset rumah tangga non-usaha rata-rata kelompok usaha ekowisata usaha operator *speed boat* dan kelompok pemandu wisata hampir sama, masing-masing kurang lebih Rp 21.000.000,- dan Rp 20.000.000,-, dan lebih tinggi dari kelompok lainnya, yakni rumah tangga kampung dan usaha *homestay*. Responden rumah tangga di kampung memiliki aset rumah tangga non-usaha terkecil, rata-rata sekitar Rp 6.000.000,-.

Secara keseluruhan, proporsi aset rumah tangga yang terbesar adalah perangkat elektronik (33,68%) dan proporsi yang terkecil adalah peralatan sanitasi, yaitu (14,35%). Namun demikian, komposisi aset rumah tangga non-usaha tiap kelompok responden berbeda-beda. Proporsi terbesar aset rumah tangga non-usaha kelompok usaha speedboat adalah kendaraan (51,95%), sedangkan proporsi aset non-usaha terbesar responden rumah tangga di kampung adalah perabot rumah tangga (34,40%). Umumnya aset yang dimiliki dibeli dalam waktu lima tahun atau kurang. Aset rumah tangga non-usaha yang dimiliki oleh responden disajikan pada Tabel 4.3.

**TABEL 4.3. NILAI RATA-RATA ASET RUMAH TANGGA NON-USAHA RESPONDEN (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Kelompok responden	Jenis aset							Total
	Meubel	Perabot rumah tangga	Alat dapur	Elektronik	Kendaraan	Penerangan	Sanitasi	
Homestay	1.957	3.429	1.771	4.014	2.000	857	-	12.029
Pramuwisata	2.123	1.795	950	10.518	4.405	137	132	20.060
Speed boat	5.558	167	177	3.075	11.167	1.350	-	21.493
Rumah tangga kampung	1.201	2.051	850	1.148	500	108	104	5.962
Keseluruhan	2.138	2.113	941	4.958	4.137	345	89	14.722

**Gambar 3.23.** Komposisi aset rumah tangga non-usaha berdasarkan jenis aset.

### 3. Aset usaha

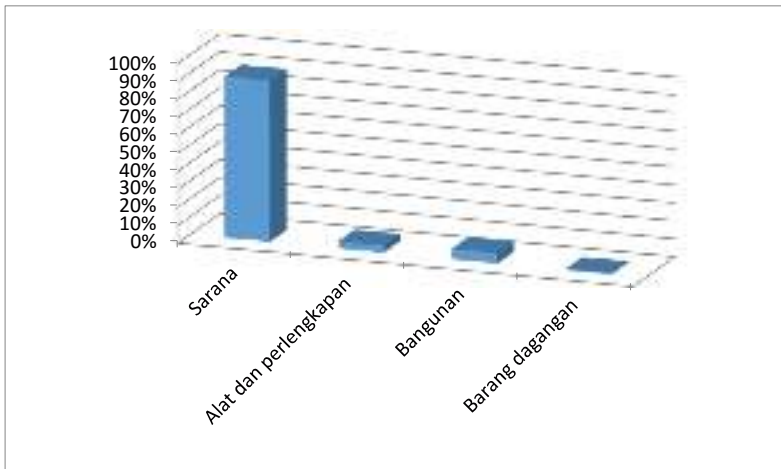
Aset usaha responden dikelompokkan menjadi sarana usaha, alat dan perlengkapan usaha, bangunan, dan barang dagangan. Sarana usaha yang dimiliki oleh responden adalah perahu, dengan atau tanpa motor, dan kendaraan darat. Jenis sarana usaha tergantung pada jenis usaha yang digeluti. Demikian pula, alat dan perlengkapan usaha tergantung pada jenis usaha yang digeluti. Alat dan perlengkapan nelayan adalah pancing, senar pancing, dan *cool box*, sedangkan alat dan perlengkapan usaha tani adalah cangkul, parang, linggis dan semacamnya. Alat dan perlengkapan usaha *homestay* sangat bervariasi, meliputi alat dapur, alat dan perlengkapan makan minum, perlengkapan tidur, alat penerangan, pompa air dan tendon penampung air, serta alat selam dan berenang. Alat dan perlengkapan yang dimiliki responden pramuwisata antara lain alat renang dan alat selam. Responden operator *speedboat* tidak memerlukan alat dan perlengkapan khusus untuk menjalankan usahanya. Aset usaha berupa bangunan dimiliki oleh usaha *homestay*, yaitu bangunan *homestay*, dan usaha kios. Aset berupa barang dagangan dimiliki oleh responden yang berdagang.

Nilai aset usaha responden rata-rata sebesar Rp 73.432.143,- dengan kisaran antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 290.000.000,-. Rata-rata nilai aset usaha terbesar dimiliki kelompok usaha pramuwisata, sebesar Rp 111.772.222, dan rata-rata nilai aset usaha terkecil dimiliki oleh rumah tangga kampung, yakni Rp 35.019.722. Berdasarkan jenis aset usaha, sebagian besar aset usaha berupa sarana usaha, sebesar 89,60%, sedangkan aset usaha yang terkecil proporsinya adalah barang dagangan, yaitu 0,69%. Kabupaten Raja Ampat merupakan kepulauan, sehingga sarana transportasi laut merupakan sarana usaha yang penting adalah, bagi hampir semua kelompok usaha. Hal tersebut menyebabkan komposisi aset usaha responden relatif seragam, yaitu berupa perahu, baik bermotor maupun tanpa motor. Perbedaan terletak pada spesifikasi sarana yang dimiliki. Nilai rata-rata aset usaha responden disajikan pada Tabel 4.4 sedangkan komposisi aset usaha disajikan pada Gambar 3.24.



**TABEL 4.4. NILAI RATA-RATA ASET USAHA RESPONDEN (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Kelompok responden	Jenis aset				Total
	Sarana usaha	Alat dan perlengkapan usaha	Bangunan	Barang dagangan	
<i>Homestay</i>	31.857	17.189	28.943	-	77.989
Pramuwisata	111.389	217	167	-	111.772
<i>Speedboat</i>	68.333	-	-	-	68.333
Rumah tangga di kampung	32.556	820	256	1.389	35.020
Keseluruhan	65.796	2.836	4.290	510	73.432

**Gambar 3.24.** Komposisi aset usaha responden berdasarkan jenis aset.

Spesifikasi sarana yang dimiliki usaha *homestay* umumnya berupa perahu fiber atau *speedboat fiber*, dengan motor tempel 15 PK atau 40 PK. Pramuwisata dan operator *speedboat* umumnya memiliki sarana dengan spesifikasi *speedboat fiber*, dengan masing-masing dua buah motor tempel 15 PK atau 40

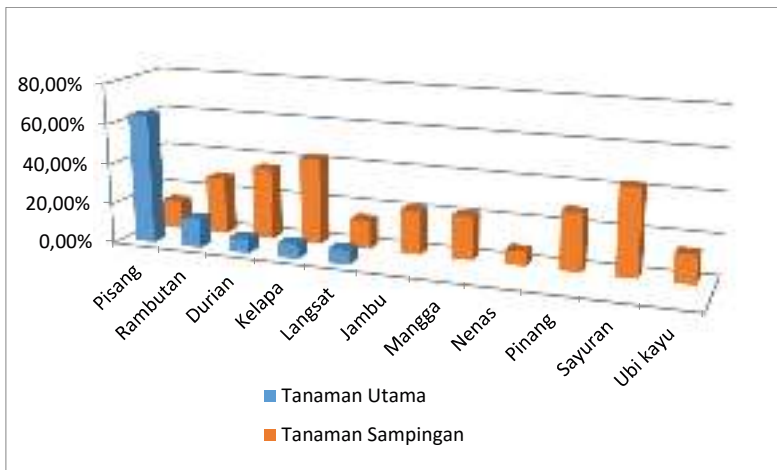
PK. Spesifikasi sarana usaha rumah tangga kampung yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan berupa perahu kayu dengan motor tempel 15 PK. Umumnya sarana usaha yang dimiliki responden diadakan secara swadaya, namun sebagian diperoleh dari bantuan pemerintah, umumnya Bantuan Dana Desa. Sebagian besar penerima bantuan adalah responden rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hampir semua sarana usaha yang dimiliki, baik yang diadakan sendiri maupun yang diperoleh dari bantuan diadakan kurang dari lima tahun lalu. Spesifikasi sarana usaha responden serta sumber pengadaannya disajikan pada Tabel 4.5.

**TABEL 4.5. SPESIFIKASI SARANA USAHA YANG DIMILIKI OLEH RESPONDEN**

Kelompok responden	Jenis aset	Pengadaan		Total
		Swadaya	Bantuan	
Homestay	Speedboat	1		1
	Longboat	1		1
	Motor tempel 15 PK	4	1	5
	Motor tempel 45 PK	1		1
Pramuwisata	Perahu kayu	2		2
	Speedboat	16		16
	Motor tempel 15 PK	7	1	8
	Motor tempel 40 PK	31		31
Speedboat	Longboat fiber	3		3
	Speedboat	3		3
	Motor tempel 15 PK	1	1	2
	Motor tempel 40 PK	6		6
Nelayan	Perahu kayu	10		10
	Perahu fiber	2	1	3
	Motor tempel 15 PK	2	6	8
	Ketinting	2	1	3

#### 4. Tanaman dan ternak

Tanaman dan ternak merupakan modal fisik sebagai hasil sebagai pemanfaatan modal alam. Tidak ada di antara responden yang mengusahakan usaha ternak. Sebagian besar responden (78,57%) mengusahakan tanaman pisang. Tanaman pisang diusahakan oleh sebagian besar responden (64,29%) sebagai utama dalam usaha taninya, sisanya mengusahakan tanaman pisang sebagai tanaman sampingan. Jenis-jenis tanaman lain yang diusahakan banyak responden adalah tanaman kelapa, rambutan, durian, dan sayur-mayur. Jenis-jenis tanaman berdasarkan banyaknya responden yang mengusahakan sebagai tanaman utama dan tanaman sampingan disajikan pada Gambar 3.25.



**Gambar 3.25.** Jenis-jenis tanaman menurut banyaknya responden yang mengusahakan sebagai tanaman utama dan tanaman sampingan

#### C. Sumber daya manusia

Karakteristik demografi rumah tangga menggambarkan modal sumberdaya manusia. Besar keluarga rumah tangga responden antara satu sampai delapan orang per keluarga, dengan rata-rata empat orang per keluarga.

## ORANG ASLI PAPUA

Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua

Anggota keluarga perempuan (54%) lebih banyak dibanding anggota keluarga laki-laki (46%). Proporsi anggota rumah tangga yang tidak mengenyam pendidikan formal cukup besar, yakni 36%, yang menyebar merata baik laki-laki maupun perempuan. Hanya sekitar 17% dari anggota rumah tangga yang menempuh pendidikan SLTA. Sebaran tingkat pendidikan anggota rumah tangga berdasarkan jenis kelamin menyebar merata. Sebaran proporsi anggota rumah tangga berdasarkan pendidikan formal yang ditempuh dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.6.

**TABEL 4.6. SEBARAN PROPORSI ANGGOTA RUMAH TANGGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak sekolah	35%	36%	36%
SD	30%	30%	30%
SLTP	16%	16%	16%
SLTA	16%	18%	17%
PT	3%	0%	1%

Selain pendidikan formal, kualitas sumberdaya manusia juga dapat ditingkatkan melalui pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan dan profesi, baik yang bersertifikat maupun tidak. Enam orang dari responden rumah tangga mendapat pelatihan di bidang ekowisata, dan lima orang lainnya mengikuti pelatihan di bidang non-ekowisata. Pelatihan bidang ekowisata antara lain pelatihan kerajinan, pemandu selam, dan *hospitality*. Pelatihan bidang non-ekowisata antara lain pelatihan koperasi, kelompok tani, serta pelatihan aparat pemerintah. Pelatihan-pelatihan yang diikuti responden diselenggarakan secara lokal Kabupaten Raja Ampat dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Semua responden pramuwisata memperoleh pelatihan bersertifikat. Tujuh orang memiliki sertifikat pemandu selam PADI dan sepuluh orang lainnya memiliki sertifikat pramuwisata dari HPI. Operator homestay yang tergabung dalam Asosiasi *Homestay* Raja Ampat

secara teratur mengadakan pertemuan, dan mendapatkan pelatihan melalui asosiasi untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang *hospitality* dan manajemen *homestay*.

#### **D. Aset ekonomi (finansial)**

Aset ekonomi (finansial) dimaksud di sini adalah akses terhadap ekonomi, hasilnya dari pemanfaatan akses, dan pemanfaatan hasil tersebut. Akses terhadap ekonomi antara lain lapangan kerja, akses terhadap bantuan, dan akses terhadap kredit. Hasil dari akses ekonomi adalah arus pendapatan. Pemanfaatan arus pendapatan antara lain untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, tabunga, dan investasi.

##### *1. Lapangan kerja*

Komunitas lokal dapat mengakses lapangan kerja dalam bidang ekowisata melalui dua cara, yaitu menjadi pekerja pada usaha-usaha ekowisata, dan berkecimpung langsung dalam usaha ekowisata. Selain itu, ekowisata berpotensi menyerap produk sektor lain, misalnya pertanian dan perikanan. Dengan demikian, menjadi pekerja pada usaha yang menyalurkan produk dan jasa kepada sektor ekowisata atau menjalankan usaha yang menyalurkan produk dan jasa kepada sektor ekowisata juga merupakan akses tidak langsung terhadap ekonomi secara yang tercipta oleh perkembangan ekowisata. Namun demikian, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa akses tidak langsung terhadap lapangan pekerjaan tidak tercipta pada ekowisata Raja Ampat.

Kebijakan berbasis masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kepulauan Raja Ampat telah membuka akses lapangan kerja bagi OAP di Kabupaten Raja Ampat, melalui kesempatan berwiraswasta yang tidak dibatasi bagi OAP. Operator *homestay* dan *speed boat* umumnya mempekerjakan tenaga kerja dari dalam keluarga, sedangkan pramuwisata dan pemandu selam merupakan pekerja mandiri yang menciptakan sendiri pekerjaan mengikuti kecenderungan perkembangan ekonomi dan kebijakan. Operator *resort* dan *liveaboard* mengungkapkan minatnya yang kuat untuk mempekerjakan OAP

dalam usaha mereka, namun tidak selalu mendapatkan OAP yang berminat untuk bekerja di resort atau di *liveaboard* sesuai kebutuhan. Penciptaan lapangan kerja bagi OAP didekati dengan keterlibatan OAP sebagai pegawai operator wisata atau terlibat langsung dalam usaha ekowisata.

**TABEL 4.7. KETERLIBATAN OAP DALAM EKOWISATA RAJA AMPAT MENURUT JENIS USAHA**

Jenis Usaha	Perkiraan keterlibatan OAP
<i>Resort</i>	221
<i>Liveaboard</i>	8
<i>Homestay</i>	750
Pramuwisata	77
<i>Speedboat</i>	55
Kelompok seni	15
Kelompok pengrajin	23

Sumber: data ketenagakerjaan, wawancara responden dan informan kunci

Usaha *homestay* menyerap tenaga kerja OAP paling banyak, dan *liveaboard* menyerap tenaga kerja OAP paling sedikit. Responden operator *homestay* umumnya mempekerjakan anggota keluarganya. *Homestay* dengan kapasitas yang besar yang menampung banyak tamu mempekerjakan keluarga dekatnya, terutama sesama pemilik hak ulayat tempat dibangunnya *homestay*. Operator ekowisata terbanyak adalah *homestay* yang dimiliki oleh OAP, sehingga menjadi sub-sektor ekowisata yang membuka lapangan kerja bagi OAP terbanyak. Sebagian besar operator *liveaboard* beroperasi di Raja Ampat hanya pada waktu musim wisatawan. Pada musim sepi *liveaboard* beroperasi di bagian lain wilayah Indonesia, umumnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Operator *liveaboard* kesulitan memperoleh OAP yang berminat bekerja tetap di kapal wisata dan mengikuti trayek kapal di luar Kepulauan Raja Ampat. Bahkan tidak mudah untuk mendapatkan OAP yang bersedia menjadi awak tidak tetap dan bekerja sesuai jadwal *liveaboard* meskipun hanya selama beroperasi di Kepulauan Raja Ampat.

## 2. Pendapatan Usaha

Pendapatan pegawai usaha ekowisata berasal dari upah/gaji, sedangkan pendapatan usaha ekowisata berasal dari penjualan jasa usaha ekowisata. Pada bagian ini ditampilkan juga dari luar ekowisata sebagai perbandingan. Pendapatan dari luar ekowisata misalnya dari bertani, nelayan, atau usaha lainnya di luar ekowisata. Arus manfaat ekowisata berupa pendapatan bagi OAP dari menurut jenis usaha ekowisata terdiri dari *homestay*, *parmuwisata*, *speedboat*, kelompok seni, kelompok pengrajin, *resort*, *Liveaboard*, dan non ekowisata.

**TABEL 4.8. ARUS MANFAAT EKOWISATA BERUPA PENDAPATAN BAGI OAP DARI USAHA EKOWISATA DAN NON-EKOWISATA (DALAM RIBUAN RUPIAH PER TAHUN)**

Jenis Usaha	Arus pendapatan bagi OAP per tahun		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
<i>Homestay</i>	5.250	379.550	1.149.200
Pramuwisata	NA	17.000	NA
<i>Speedboat</i>	5.000	255.083	636.000
Kelompok seni	NA	650	NA
Kelompok pengrajin	NA	1.200	NA
Resort	NA	24.000	NA
<i>Liveaboard</i>	NA	21.000	NA
Non-ekowisata	9.600	74.126	286.800

Sumber: data ketenagakerjaan, wawancara responden, dan wawancara informan kunci

Homestay merupakan sektor ekowisata yang paling banyak memberikan arus pendapatan per rumah tangga OAP, disusul operator speedboat. Tampak bahwa kerajinan dan pertunjukan seni belum memberikan arus pendapatan yang berarti. Pendapatan pramuwisata juga masih lebih rendah dari pendapatan rumah tangga non-ekowisata. Sub-sektor *homestay* memberikan perputaran uang bagi OAP terbesar dibanding sub-sektor lain. Dengan jumlah *homestay* sebanyak 150 usaha, arus manfaat ekowisata berupa pendapatan

melalui sektor ini dapat mencapai sekitar Rp 57 milyar per tahun. Di luar kelompok seni dan kelompok pengrajin, sub-sektor liveboard memberikan arus pendapatan bagi OAP yang paling kecil. Arus Dari 40 buah liveboard yang beroperasi di Kepulauan Raja Ampat, manfaat ekowisata bagi OAP berupa arus pendapatan secara keseluruhan kurang dari Rp 200.000.000,- per tahun.

Ekowisata dapat bermanfaat bagi OAP di sektor lain di luar pariwisata jika operator ekowisata memenuhi kebutuhan produksi dengan membeli dari OAP. Transaksi usaha operator ekowisata dengan OAP untuk keperluan produksi jasa ekowisata meliputi komponen belanja ikan, sayuran, produk ternak, pemeliharaan bangunan, perbekalan, dan bahan baku kerajinan.

**TABEL 4.9. TRANSAKSI USAHA OPERATOR EKOWISATA DENGAN OAP UNTUK PRODUKSI JASA EKOWISATA (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Jenis Usaha	Komponen belanja	Rata-rata belanja/unit usaha/tahun
<i>Homestay</i>	Ikan	18.686
	Sayuran	5.714
	Produk ternak	114
	Pemeliharaan bangunan	643
	Jumlah	25.157
<i>Speedboat</i>	Perbekalan	10.080
Kelompok kerajinan	Bahan baku kerajinan	1.200
<i>Liveboard</i>	Ikan	23.400

Arus manfaat ekowisata berupa pendapatan bagi OAP yang berusaha di luar sub-sektor ekowisata paling banyak melalui *homestay*, dengan perkiraan aliran total dari seluruh *homestay* sekitar Rp 3.770.000 per tahun. Pengeluaran terbesar *homestay* yang mengalir ke OAP di luar sub-sektor ekowisata adalah untuk belanja ikan yang dihasilkan oleh nelayan. Perkiraan pengeluaran seluruh *homestay* untuk belanja ikan sebesar Rp 2.800.000. Pramuwisata, pemandu selam tidak menyerap produk sektor lain seperti sektor pertanian



dan perikanan. Resort pada umumnya belanja kebutuhan logistik di Sorong. *Liveboard* membeli ikan dari OAP di Kepulauan Raja Ampat jika ada nelayan yang menawarkan ikan di sepanjang perjalanan wisata. Ikan yang dibeli oleh *liveboard* tersebut digunakan untuk konsumsi awak kapal.

### 3. Arus pendapatan di luar usaha

Selain pendapatan yang diperoleh sebagai pegawai atau sebagai wirausahawan ekowisata, atau menjual produk sektor lain kepada sektor ekowisata, OAP dapat memperoleh manfaat ekowisata berupa pendapatan di luar usaha. Arus manfaat ekowisata berupa pendapatan di luar kegiatan usaha antara lain sewa konsesi lahan, sumbangan, dan penerimaan-penerimaan lain yang bukan besumber dari usaha ekowisata atau di luar usaha ekowisata. Pendapatan luar usaha yang diterima OAP dari ekowisata berasal dari komponen pungutan spot wisata, donasi, dan kontrak konsesi.

**TABEL 4.10. ARUS MANFAAT EKOWISATA BAGI OAP BERUPA PENDAPATAN LUAR USAHA (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

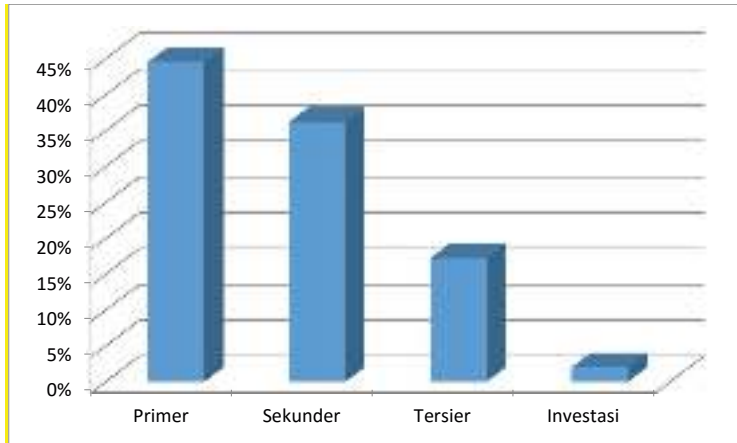
Jenis usaha	Komponen penerimaan	Jumlah/unit usaha/tahun
<i>Homestay</i>	Pungutan spot wisata	5.074
	Donasi	1.200
	Jumlah	6.274
<i>Resort</i>	Kontrak konsesi	40.000
	Donasi	5.000
	Jumlah	45.000
<i>Liveabord</i>	Pungutan spot wisata	10.000
	Donasi	1.000
	Jumlah	11.000

Setiap *resort* memberikan arus manfaat ekowisata paling besar bagi OAP berupa kontrak konsesi dan donasi/sumbangan. Setiap *homestay* memberikan arus manfaat bagi OAP yang relatif paling kecil, berupa pungutan spot wisata

dan donasi/sumbangan. Namun demikian, karena jumlah usaha *homestay* paling banyak di antara usaha ekowisata, usaha *homestay* secara keseluruhan memberikan manfaat ekowisata bagi OAP di luar usaha yang terbanyak, diperkirakan dapat mencapai hampir 1 milyar rupiah setahun. Komponen penerimaan yang terbesar dari *homestay* yang diperoleh OAP adalah pungutan spot wisata, sedangkan komponen penerimaan terbesar yang diterima oleh OAP dari resort adalah kontrak konsesi hak ulayat untuk membangun *resort*. Secara keseluruhan *liveboard* menyumbangkan penerimaan luar usaha yang kecil bagi OAP, karena jarang bersentuhan dengan komunitas lokal di kampung.

#### 4. Pemanfaatan Arus Pendapatan

Pemanfaatan arus pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga di luar kegiatan usaha menggambarkan bagaimana peran ekowisata bagi kesejahteraan OAP dan bagaimana OAP mengalokasikan pendapatannya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemanfaatan arus pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikelompokkan menjadi empat, yakni untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan pengeluaran investasi. Pengeluaran untuk kebutuhan primer adalah pengeluaran untuk sandang, papan, pangan dan pendidikan. Pengeluaran untuk kebutuhan sekunder antara lain pengeluaran untuk perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi. Pengeluaran investasi antara lain tabungan dan kredit usaha. Pengeluaran untuk kebutuhan tersier antara lain untuk rokok, pinang-sirih dan bir. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga berkisar antara Rp 2.400.000,- sampai Rp 1,980,310,000,- dengan rata pengeluaran per rumah tangga OAP Rp 35,362,679,-. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk pengeluaran primer, kemudian berturut-turut untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan pengeluaran investasi.



**Gambar 3.26.** Sebaran alokasi pengeluaran responden

Sebaran alokasi pengeluaran di luar usaha tidak sama diantara kelompok responden. Kelompok pramuwisata memiliki sebaran alokasi yang berbeda, dimana proporsi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder (46,54%) lebih besar dibanding untuk kebutuhan primer (23,19%), bahkan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan tersier (29,45%) lebih besar dibanding untuk kebutuhan primer. Sebaran proporsi pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga di luar usaha berdasarkan kelompok responden yang tertinggi berasal dari usaha *speedboat*, disusul *homestay*, dan rumah tangga serta yang paling kecil adalah pramuwisata.

**TABEL 4.11. PROPORSI PENGELUARAN UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN KELOMPOK RESPONDEN**

Kelompok responden	Primer	Sekunder	Tersier	Investasi
<i>Homestay</i>	74.52%	20.53%	0.00%	4.95%
Pramuwisata	23.19%	46.54%	29.45%	0.83%
<i>Speedboat</i>	98.05%	1.95%	0.00%	0.00%
Rumah tangga	72.59%	23.61%	0.00%	3.80%

### **E. Modal sosial**

Modal sosial dalam kajian ini dibedakan menjadi dua, yakni modal sosial tradisional yang sudah ada sebelum adanya ekowisata, dan modal sosial yang terbentuk setelah adanya ekowisata. Modal sosial tradisional yang sudah ada sebelum ekowisata antara lain lembaga adat beserta nilai, norma dan hukum yang merupakan kesatuan integral. Selain lembaga adat, modal sosial lainnya adalah lembaga keagamaan. Modal sosial yang terbentuk setelah adanya ekowisata antara lain asosiasi usaha ekowisata, seperti asosiasi *homestay*, asosiasi parmuwisata, asosiasi speedboat, kerjasama antar para pemangku kepentingan, serta lembaga-lembaga sosial lain yang terbentuk *sebagai* respon terhadap tumbuhnya ekowisata.

Lembaga adat terbentuk sebagai upaya kelompok sosial untuk bekerjasama memakai nilai dan norma tertentu untuk mengatur perilaku anggota kelompok memenuhi tujuan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Adanya ekowisata dapat melemahkan lembaga adat apabila kebutuhan anggota kelompok sosial berbenturan dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku. Peran lembaga adat juga dapat melemah apabila lembaga adat tidak memberi jalan keluar bagi anggota kelompok bila ada benturan (konflik) antara lembaga adat dan ekowisata, atau lembaga adat tidak mendapat peran dalam tata kelola ekowisata. Peran lembaga adat dalam memberi solusi bagi anggota kelompok sosial untuk memperoleh manfaat dari ekowisata akan memberikan kepuasan bagi anggotanya.

Pada umumnya responden berpendapat bahwa norma dan aturan adat serta keagamaan tidak mengalami perubahan. Kerjasama di dalam kelompok adat seperti kerja bakti membersihkan kampung, upacara-upacara nasional dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan masih tetap kuat pada saat ini seperti sebelum adanya ekowisata. Namun demikian, responden umumnya berpendapat bahwa konflik lebih sering terjadi, terutama konflik pemanfaatan hak ulayat untuk usaha ekowisata, atau konflik pemanfaatan sumberdaya alam dalam ekowisata (konflik di spot wisata).

**TABEL 4.12. PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT EKOWISATA**

Aspek sosial	Sebelum ekowisata	Sesudah ekowisata
Norma sosial	Kuat	Kuat
Aturan adat	Kuat	Kuat
Hubungan sosial	Kuat	Kuat
Peribadatan	Kuat	Kuat
Kerjasama	Kuat	Kuat
Konflik	Tidak pernah	Kadang-kadang

Asosiasi usaha ekowisata merupakan modal sosial bagi OAP yang tumbuh akibat perkembangan ekowisata di Kepulauan Raja Ampat. Asosiasi *Homestay* Raja Ampat merupakan asosiasi usaha ekowisata yang paling aktif dan memiliki peran yang dominan dalam perkembangan usaha *homestay*. Asosiasi *Homestay* Raja Ampat merupakan modal sosial bagi operator *homestay* yang tergabung di dalamnya untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, mengakses pasar ekspor ekowisata dan wadah menghimpun kekuatan dalam tatakelola ekowisata. Asosiasi *Homestay* Raja Ampat memiliki portal reservasi bagi anggotanya yang memenuhi standar untuk diikutsertakan dalam portal. Asosiasi pramuwisata memiliki peran yang penting dalam peningkatan kapasitas, dan juga wadah untuk bernegosiasi dengan pemangku kepentingan lain dalam tatakelola ekowisata di Raja Ampat. Asosiasi *speedboat* dibangun sebagai wadah mengelola pasar bagi anggotanya secara internal, namun belum berperan dengan baik.

#### 4.1.4. Keluaran Strategi Penghidupan

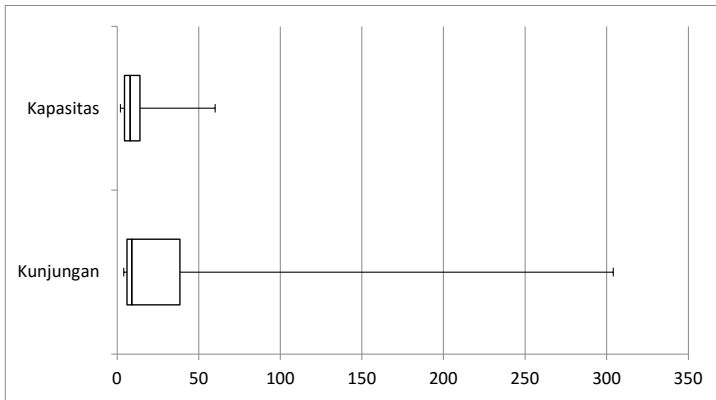
Pengembangan ekowisata dan kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi OAP, khususnya yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan konservasi, dan secara umum untuk semua OAP di seluruh Kepulauan Raja Ampat. Paradigma yang diusung dalam pengembangan ekowisata

adalah ekowisata berbasis komunitas, *co-management*, dan *pro-poor tourism*. Maka diharapkan OAP berpendapatan rendah dapat memanfaatkan ekowisata sebagai strategi penghidupannya memanfaatkan aset-aset penghidupan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha berbasis komunitas dengan berbagi peran pengelolaan ekowisata bersama-sama semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, keluaran penting yang diharapkan dari tata kelola ekowisata dan tumbuhnya industri ekowisata di Kepulauan Raja Ampat adalah kesejahteraan (*welfare*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Peningkatan kesejahteraan bagi individu adalah peningkatan taraf hidup, yang diupayakan melalui peningkatan pendapatan. Kesejahteraan bagi kelompok sosial adalah alokasi manfaat sumber daya yang adil (*equitable*) bagi seluruh anggota masyarakat. Pada bagian aset penghidupan telah diuraikan bahwa ekowisata membuka lapangan kerja dan memberikan tambahan pendapatan. Fokus pada bagian ini adalah pemerataan (*equitable*) manfaat ekowisata bagi OAP di Kepulauan Raja Ampat dan keberlanjutan.

#### *a. Manfaat ekowisata yang adil (equitable)*

Manfaat yang adil (*equitable*) dari ekowisata bagi OAP diukur dari kepuasan terhadap industri ekowisata dan tatakelola ekowisata. Kepuasan terhadap industri ekowisata dan tatakelola diukur dengan melihat persepsi terhadap aspek-aspek dari industri ekowisata dan tatakelola ekowisata. Pada umumnya responden merasa puas terhadap industri ekowisata, dalam hal penciptaan lapangan kerja, lapangan berusaha, konservasi alam dan budaya, dan rendahnya ancaman terhadap norma sosial dan adat. Namun demikian responden memiliki persepsi bahwa wisatawan asing kurang memberikan manfaat bagi OAP yang tinggal di kampung dibanding wisatawan domestik. Selain itu, manfaat industri ekowisata kurang adil, baik antar OAP maupun antara OAP dengan non-OAP. Rendahnya manfaat kunjungan wisatawan asing bagi OAP yang tinggal di kampung karena wisatawan asing umumnya menikmati keasrian alam, baik di bawah air dan di daratan, sehingga jarang mengunjungi kampung. Dilain pihak, wisatawan domestik umumnya lebih sering menikmati terumbu karang di sekitar kampung dan membeli cinder

mata. Kurangnya pemerataan (*equitability*) manfaat ekowisata bagi OAP dapat dilihat dari dua segi, yang pertama berdasarkan sebaran aset usaha dan pendapatan di antara sesama operator ekowisata, dan berdasarkan aliran manfaat dari usaha ekowisata kepada sektor di luar ekowisata. Contoh yang diberikan pada bagian ini adalah sebaran kapasitas *homestay* dan kunjungan wisatawan ke *homestay* (Gambar 3.27)



**Gambar 3.27.** Sebaran kapasitas dan kunjungan tamu *homestay*

Gambar 3.27 menunjukkan bahwa sebagian besar *homestay* memiliki kapasitas yang kecil, dan mendapat kunjungan tamu tidak sampai 50 wisatawan dalam setahun, sedangkan sebagian kecil *homestay* memiliki kapasitas yang besar, lebih dari 50 tamu pada saat yang sama, dan memperoleh tamu sampai ratusan wisatawan per tahun.

Arus manfaat ekowisata dari sektor di luar ekowisata seperti pertanian dan perikanan relatif kecil. Artinya, mereka yang tidak terlibat dalam sektor pariwisata tidak ikut menikmati pertumbuhan ekowisata.

**TABEL 4.13. ARUS MANFAAT EKOWISATA KE SEKTOR LAIN  
(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Jenis usaha	Perkiraan pendapatan	Aliran ke sektor lain	Proporsi aliran ke sektor lain
<i>Homestay</i>	57.000.000	941.000	1,65%
Pramuwisata	1.300.000	0	0%
<i>Speedboat</i>	14.000.000	554.000	3,96%
Kelompok pengrajin	27.600	1.200	4,35%
Resort*	30.000.000	0	0,00%
<i>Liveboard**</i>	96.700.000	936.000	0,97%
Total	199.027.600	2.432.200	1,22%

Sumber: data harga website, wawancara responden, dan wawancara informan kunci.

\*Asumsi lama menginap 4 hari

\*\*Asumsi penjualan 50% dari kapasitas

Proporsi aliran pendapatan sektor ekowisata yang mengalir ke sektor lain sangat kecil. Dari sekitar Rp 200 milyar aliran pendapatan ke sektor ekowisata di Kepulauan Raja Ampat, hanya 1,22 persen yang mengalir ke sektor lain seperti pertanian dan perikanan.

Pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa wisatawan masih melakukan reservasi dengan liveboard dan resort, yang tidak dimiliki oleh OAP. Sekitar 58 persen wisatawan tinggal dengan *liveboard* dan *resort*, sedangkan 16 persen sisanya tinggal di *homestay*. Perkiraan arus pendapatan yang diterima oleh usaha akomodasi milik non-OAP hampir dua kali lipat arus pendapatan yang diterima oleh usaha yang dimiliki OAP. Perbandingan pendapatan antara usaha akomodasi milik OAP dan non-OAP hanya dapat mencapai 31 persen sedangkan non-OAP di atas 60 persen.



**TABEL 4.14. PERBANDINGAN PERKIRAAN PENDAPATAN USAHA AKOMODASI OAP DAN NON-OAP (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

<b>Kepemilikan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Perkiraan pendapatan</b>	<b>Proporsi</b>
OAP	<i>Homestay</i>	57.000.000	31%
Non-OAP	<i>Resort</i>	30.000.000	
	<i>Liveboard</i>	96.700.000	
	Jumlah	126.700.000	69%
Jumlah		183.700.000	

#### *b. Keberlanjutan*

Keberlanjutan dapat ditinjau dari dua segi yang saling mempengaruhi, yakni keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan usaha. Terjaganya kawasan perairan yang merupakan modal alam bagi usaha ekowisata akan menjamin keberlanjutan usaha ekowisata. Kawasan perairan yang terjaga akan menarik wisatawan dan menjadi sumber pendapatan bagi usaha ekowisata. Di lain pihak, keberlanjutan usaha ekowisata, terutama yang dimiliki oleh OAP, akan mendorong OAP sebagai pemilik sumber daya alam untuk terus mendukung upaya konservasi perairan.

Fenomena yang muncul di Raja Ampat adalah menjamurnya *homestay* yang tumbuh dengan pesat. Di satu pihak hal tersebut menunjukkan peningkatan keterlibatan langsung OAP dalam usaha ekowisata, yang memberikan manfaat ekowisata bagi OAP. Di lain pihak, tumbuhnya *homestay* meyita lahan yang jumlahnya di pulau-pulau kecil cukup terbatas. Pulau Kri dan Pulau Arborek dapat menjadi contoh tekanan lingkungan yang besar akibat tumbuhnya usaha *homestay*. Di lain pihak, air bersih sangat terbatas ketersediaannya di banyak pulau-pulau kecil di Kepulauan Raja Ampat. Lahan datar di kedua pulau tersebut sudah tidak lagi tersisa. Pertumbuhan *homestay* tidak terkendali dan terus menimbulkan masalah terhadap lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas ekowisata dan mengancam keberlanjutan usaha ekowisata.

Ketidakpuasan OAP, baik yang berkecimpung dalam usaha ekowisata maupun di luar ekowisata terhadap kurang adilnya aliran manfaat sumberdaya alam akan mengurangi minat mereka mendukung konservasi perairan, yang pada gilirannya juga dapat mengancam keberlanjutan usaha ekowisata. Responden umumnya kurang puasterthadap tata kelola ekowisata. Responden berpendapat bahwa kurang ada dukungan pemerintah (termasuk UPTD KKPD sebagai pengelola jejaring KKPD) dan LSM agar usaha non-ekowisata milik OAP dapat menikmati manfaat ekowisata. Distribusi dana masyarakat dari tarif masuk wisata oleh UPTD KKPD juga sangat tidak memuaskan.

# 5

## TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI

### 5.1. Tata Kelola

Konsep tatakelola (*governance*) yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep yang luas. Konsep tata kelola yang sempit didefinisikan sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, keuangan, dan administrasi” (Della Corte et al., 2018). Definisi ini memberi pemahaman bahwa tata kelola ekowisata adalah ranah Pemerintah untuk mengatur sektor pariwisata, dan aparat Pemerintah adalah para aktor tunggal dalam tata kelola sektor pariwisata. Definisi ini juga menggambarkan sifat “*top-down*” dalam mengatur sektor pariwisata menuju kondisi ideal menurut Pemerintah, melalui penerbitan peraturan, perumusan kebijakan, penciptaan program dan penyediaan anggaran (Scott and Marzano, 2015). Kajian ini menggunakan konsep tata kelola yang luas sebagai berbagai kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mencapai tujuan (Della Corte et al., 2018). Konsep ini menggambarkan bahwa aparat pemerintah bukan aktor tunggal dalam tata kelola pariwisata. Para pemangku kepentingan adalah para aktor dalam tata

kelola, yang mengerahkan sumberdaya (kekuasaan, keahlian, kewenangan, dana) masing-masing untuk mencapai tujuan. Tujuan para pemangku kepentingan bisa sama, bisa juga beda satu sama lainnya, bahkan bisa bertentangan. Dalam bagian-bagian selanjutnya, “tata kelola” juga mewakili berbagai istilah cabang dari tatakelola, seperti misalnya struktur tatakelola, proses tatakelola, dan kelembagaan tatakelola.

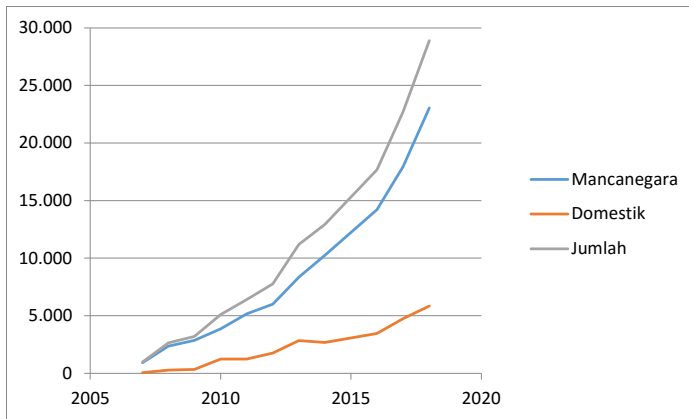
#### *5.1.1. Pemangku kepentingan*

Para pemangku kepentingan adalah para pihak (kelompok atau individu) yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi tatakelola ekowisata (Freeman, 1984). Secara umum, para pemangku kepentingan ekowisata dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: wisatawan, industri ekowisata, komunitas lokal, Pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok kepentingan lainnya (Waligo et al., 2013). Pada bahasan-bahasan berikutnya di bagian ini dibahas profil dari para pemangku kepentingan yang menonjol perannya dalam tatakelola ekowisata di Kepulauan Raja Ampat. Dampaknya terhadap OAP dibahas pada bagian lainnya.

**WISATAWAN.** Wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Raja Ampat meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat yang diterapkan sejak bulan Agustus 2007, kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat tumbuh rata-rata 30.80% setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat masih didominasi oleh wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan domestik terus tumbuh, tetapi proporsi wisatawan domestik terhadap jumlah wisatawan secara keseluruhan stabil di kisaran rata-rata 20%. Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat mencapai 28.896 pengunjung, terdiri dari 20.048 wisatawan mancanegara dan 5.848 wisatawan domestik. Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat diperkirakan lebih banyak dibanding data penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat, mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung tanpa membayar tarif masuk wisata Raja Ampat, terutama wisatawan domestik. Sebagian besar dari wisatawan domestik yang tidak membayar tarif masuk wisata adalah wisatawan domestik yang

melakukan wisata singkat (*one day trip*) ke Kepulauan Raja Ampat, termasuk yang mengawali perjalanan dari Kota Sorong dan kembali ke Kota setelah selesai perjalanan wisata. Pertumbuhan kunjungan wisatawan berdasarkan penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat jauh lebih tinggi yang berasal dari wisatawan manca negara dibandingkan wisatawan domestik.

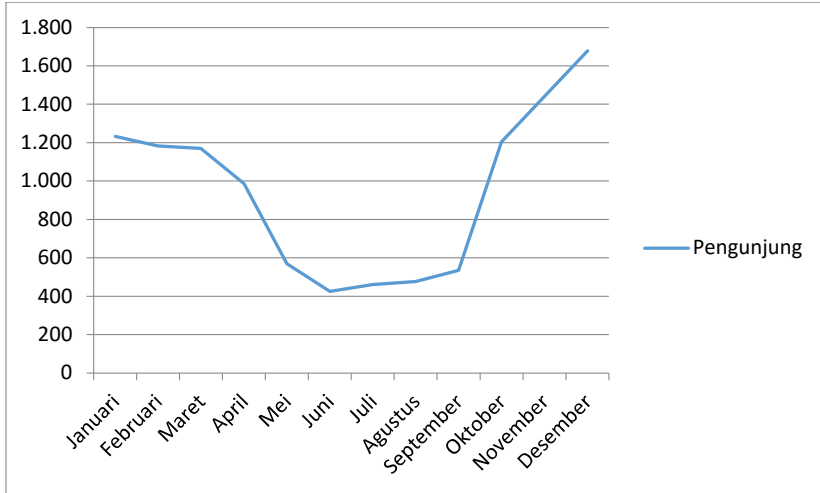
Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat berlangsung sepanjang tahun. Musim ramai kunjungan wisatawan (*peak season*) terjadi pada bulan-bulan Oktober sampai April, sedangkan musim sepi (*low season*) terjadi pada bulan-bulan Mei sampai September. Musim ramai sekitar tujuh sampai delapan bulan, sedangkan musim sepi sekitar empat sampai lima bulan.



Sumber: diolah dari data penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat

Gambar 5.1. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat

Musim sepi selain disebabkan cuaca di perairan Kepulauan Raja Ampat yang kurang bersahabat, juga arus di bawah permukaan air sangat kuat menyebabkan jarak pandang di bawah permukaan air terbatas. Selain kondisinya berbahaya, wisata selam atau *snorkeling* tidak dapat dilakukan. Pada musim sepi daya tarik wisata di sekitar Waigeo Barat dan Pulau Kri masih dapat dilakukan.



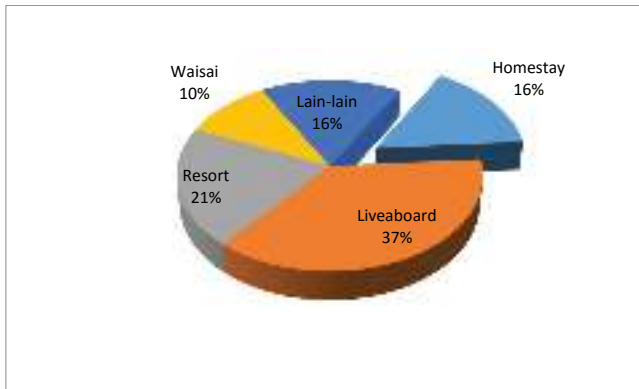
Sumber: Diolah dari data penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat

Gambar 5.2. Grafik musiman kunjungan wisatawan ke Kepulauan Raja Ampat

Sebagian besar wisatawan mancanegara berasal dari Amerika Serikat, disusul dari negara-negara Eropa seperti Jerman dan Perancis. Australia menduduki urutan ke empat sebagai asal wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan China mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berasal dari China menduduki urutan ke enam setelah wisatawan asal Australia.

Daya tarik spot-spot wisata di Kabupaten Raja Ampat berada di luar Kota Waisai. Tidak tersedia sarana transportasi umum reguler yang dapat digunakan oleh wisatawan berkunjung ke spot-spot wisata pilihan setelah tiba di Kepulauan Raja Ampat. Oleh karena itu, sebagian wisatawan melakukan reservasi dengan operator ekowisata sebelum memulai perjalanan ke Kepulauan Raja Ampat. Jumlah wisatawan yang melakukan reservasi dengan *homestay* meningkat pesat dari tahun ke tahun sejak mulai ada usaha *homestay* pada tahun 2009.

Meskipun demikian, sebagian besar wisatawan melakukan reservasi dengan *resort* dan *liveaboard*. Grafik persebaran wisatawan menurut reservasi dengan operator pada Tahun 2016 disajikan pada Gambar 5.3.



Sumber: Data penjualan tarif masuk wisata Raja Ampat

**Gambar 5.3.** Persebaran wisatawan menurut reservasi operator Tahun 2016.

Industri Ekowisata. Karakteristik industri ekowisata berbeda dengan industri manufaktur. Pada industri manufaktur produk mengalir mulai dari pengembangan konsep di titik produsen menuju konsumen melalui agen-agen perantara sepanjang rantai nilai (*value chain*). Pada industri ekowisata, konsumen mendatangi spot-spot daya tarik wisata melalui rantai nilai yang setiap titiknya (*node*) merupakan operator ekowisata. Karena kajian ini difokuskan pada manfaat ekowisata terhadap OAP, maka dilakukan identifikasi operator ekowisata yang memberi dampak terhadap OAP, baik berupa kesempatan kerja, kesempatan berusaha, transaksi usaha, atau manfaat lainnya. Secara umum, operator di sepanjang rantai nilai dapat dikelompokkan menjadi: transportasi, akomodasi, restoran, eksekursi, pertunjukan seni budaya, dan cinderamata. Usaha yang khusus melayani transportasi wisatawan dari dan menuju lokasi daya tarik wisata tidak

berkembang. Usaha restoran dan sejenisnya tumbuh pesat di Kota Waisai, namun pengamatan pendahuluan menyimpulkan bahwa manfaat sektor ini sangat kecil. Usaha akomodasi juga tumbuh pesat di Kota Waisai, namun demikian, seperti halnya usaha restoran, usaha akomodasi sangat kecil sekali pengaruhnya kepada OAP. Oleh karena itu identifikasi operator ekowisata dititik beratkan pada mereka yang beroperasi di luar Kota Waisai. Operator ekowisata yang beroperasi di luar Kota Waisai disajikan pada Tabel 5.1. Data diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen yang dipublikasi, data statistik resmi (BPS Kabupaten Raja Ampat, 2018), dan wawancara dengan informan kunci seperti asosiasi wisata Raja Ampat dan asosiasi speedboat Raja Ampat.

**TABEL 5.1. OPERATOR EKOWISATA YANG BEROPERASI DI KAWASAN WISATA KEPULAUAN RAJA AMPAT**

Jenis	Jumlah
Akomodasi	
Homestay	150 unit
Resort	22 unit
Liveboard	40 unit
Ekskursi	
Speedboard lokal	25 unit
Pemandu wisata dan Pemandu selam lokal	77 orang
Kelompok Seni	1 Kelompok
Cinderamata	2 kelompok

Usaha akomodasi di Kepulauan Raja Ampat tidak menyebar merata. Sebagian besar berada di KKP Selat Dampier. Dari 22 unit resort, hanya satu resort yang terdapat di KKP Misool Selatan. Dari 150 unit homestay di seluruh Kepulauan Raja Ampat, 11 di antaranya berada di KKP Misool Selatan, dan hanya satu buah di KKP Kofiau-Boo. Operator liveboard tergabung dalam wadah Asosiasi Liveaboard Indonesia Jangkar, yang menunjuk salah satu operator yang berdomisili di Sorong sebagai perwakilan (*contact person*).



Wisata budaya tidak begitu berkembang di Kepulauan Raja Ampat. Hanya satu kelompok yang diidentifikasi melakukan kegiatan rutin, yaitu di Pulau Arborek. Usaha cinderamata juga tidak berkembang, masing-masing satu kelompok di kawasan Misool dan satu kelompok di Pulau Arborek.

Pemandu wisata, pemandu selam dan speedboat yang ditampilkan di sini adalah operator lokal (OAP). Jumlah pemandu wisata, pemandu selam dan speedboat bisa lebih banyak, karena cukup banyak wisatawan yang mengawali perjalanan wisata dari Kota Sorong.

Operator speedboat yang berdomisili di Kepulauan Raja Ampat telah memiliki wadah berupa Asosiasi Speedboat. Demikian pula, pemandu wisata dan pemandu selam memiliki wadah, baik secara tingkat nasional yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia, maupun tingkat lokal di Himpunan Pramuwisata Raja Ampat. Asosiasi Homestay Raja Ampat menghimpun operator homestay yang berminat dan memenuhi syarat untuk bergabung. Belum ada perhimpunan yang secara resmi menjadi wadah bagi operator resort di Raja Ampat. Menurut informan kunci, pernah dibentuk Forum Tata kelola Pariwisata Raja Ampat. Namun demikian tidak diperoleh informasi mengenai struktur organisasi maupun kegiatan dari forum tersebut.

Komunitas Lokal. Komunitas lokal Raja Ampat terdiri dari kelompok-kelompok sub-etnis (kelompok marga) yang cukup banyak jumlahnya. Karakteristik penting komunitas lokal di Kepulauan Raja Ampat, seperti halnya di wilayah lainnya di Tanah Papua, aturan-aturan dan norma-norma adat masih berlaku, termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Sumberdaya alam seperti lahan, hutan, bahkan perairan merupakan milik komunal yang penggunaannya diatur bersama dalam suku yang diakui memilikinya. Beberapa spot wisata juga merupakan sumber daya alam yang dikuasai secara komunal oleh komunitas lokal.

Komunitas lokal juga bergabung dalam klompok menurut mata pencaharian dan kepentingan lainnya, seperti nelayan, petani, dan kelompok usaha pariwisata. Penduduk lokal selain memiliki status sebagai komunitas lokal, juga memiliki status industri ekowisata, jika terlibat dalam usaha ekowisata.

Anggota komunitas lokal yang terlibat dalam kegiatan LSM yang berkecimpung dalam bidang konservasi dan pariwisata juga tergolong sebagai kelompok kepentingan lain. Beberapa LSM lingkungan lokal yang melibatkan banyak anggota komunitas lokal antara lain Yayasan Kalabia dan Misool Baseftin.

Pemerintah. Dua Lembaga Pemerintah yang paling dominan pengaruhnya dalam tatakelola ekowisata di Kabupaten Raja Ampat adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan. Kebijakan-kebijakan, program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola ekowisata hampir semuanya dibuat dan dilaksanakan oleh kedua lembaga pemerintah ini. Dinas Pariwisata, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, lebih dominan daripada Dinas Perikanan dalam tata kelola ekowisata di Kepulauan Raja Ampat. Unit kerja di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat yang melaksanakan peran penting dalam tata kelola ekowisata adalah UPTD KKPD. UPTD KKPD berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki kewenangan manajemen yang leluasa, termasuk dalam hal manajemen keuangan.

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Papua Barat, khususnya Seksi KSDA Wilayah I Waisai merupakan lembaga pemerintah yang juga merupakan pemangku kepentingan dalam ekowisata Raja Ampat, karena wilayah darat Kepulauan Raja Ampat juga menjadi obyek dan daya tarik wisata. Lembaga pemerintah di tingkat pusat yang berpengaruh dalam tatakelola ekowisata Kepulauan Raja Ampat adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya yang juga menunjang tatakelola ekowisata antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Badan Pemberdayaan Kampung.

Lembaga Pendidikan. Universitas Papua (UNIPA) terlibat dalam kajian-kajian awal sumberdaya perairan Kepulauan Raja Ampat bersama CI, TNC dan WWF. Selain itu, UNIPA terlibat pula dalam kampanye diseminasi hasil kajian sekaligus mendorong konservasi sumberdaya perairan Kepulauan Raja Ampat. Peran UNIPA terus berlanjut dalam kajian-kajian pengelolaan KKPD di Kepulauan Raja Ampat. Akademi Perikanan Sorong (APSOR) juga memiliki peran mendukung kegiatan pengelolaan ekowisata di Kepulauan Raja Ampat. Pada saat ini UNIPA menyelenggarakan program D3 ekowisata di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Salah satu visinya adalah menghasilkan tenaga ahli madya profesional yang berdaya saing nasional dan internasional pada bidang pariwisata berkelanjutan. Program ini merupakan kerjasama antara UNIPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat menyediakan fasilitas gedung dan pendanaan operasional, UNIPA bertanggung jawab menyelenggarakan program pendidikan.

Kelompok kepentingan lainnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, LSM internasional di bidang konservasi yang dominan pengaruhnya dalam tatakelola ekowisata di Kepulauan Raja Ampat adalah CI, TNC dan WWF. Ketiga LSM internasional tersebut berperan dalam pembentukan KKP di Kepulauan Raja Ampat. Setelah KKP terbentuk, peran CI dan TNC berlanjut dalam pengelolaannya bersama-sama UPT KKPD. Dalam upaya mendukung ekowisata di Kepulauan Raja Ampat, CI menggandeng dua perusahaan konsultan, yakni Starling Resources (SR) dan SevenThree. Sebagai penyandang dana bagi kegiatan CI, TNC dan WWF dalam pengembangan KKPD, the Walton Family Foundation, the David Lucille Packard Foundation, dan Bank Dunia dengan demikian juga merupakan para pemangku kepentingan.

Selain Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan US-AID juga memberikan dukungan pendanaan bagi program COREMAP. Dengan demikian ADB dan US-AID juga termasuk pemangku kepentingan dalam konteks ekowisata Raja Ampat.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal yang berkecimpung dalam lingkungan hidup dan ekowisata dan melibatkan komunitas lokal antara lain Yayasan Kalabia dan Misool Baseftin.

## 5.2. Kebijakan dan Tatakelola Ekowisata

Pada bagian ini diuraikan kebijakan dan berbagai isu tata kelola ekowisata yang menggambarkan kegiatan dan interaksi para pemangku kepentingan dalam tatakelola ekowisata di Raja Ampat.

Kebijakan dan program pengembangan ekowisata. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Raja Ampat mencantumkan pendekatan pariwisata berbasis komunitas dan keberpihakan kepada kaum miskin (*pro-poor tourism*). Kebijakan-kebijakan yang dapat dipandang sebagai perwujudan penerapan pendekatan tersebut antara lain pembatasan jumlah resort dan liveboard yang diijinkan untuk beroperasi di kawasan Kepulauan Raja Ampat, sedangkan pada saat yang sama usaha homestay hanya boleh dimiliki dan dijalankan oleh OAP tanpa dibatasi jumlahnya. Selain mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, kebijakan-kebijakan tersebut member kesempatan lebih luas bagi OAP untuk terlibat dalam usaha ekowisata dan memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam yang mereka miliki. Selain tidak ada pembatasan jumlah homestay yang boleh beroperasi di Kepulauan Raja Ampat, usaha homestay juga bebas pajak.

Berbagai program dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, khususnya Dinas Pariwisata, yang berorientasi pada pengembangan kapasitas OAP untuk mendapat manfaat dari ekowisata di Kepulauan Raja Ampat.

Sejumlah Kampung Wisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai landasan hukum untuk menyalurkan bantuan bagi OAP di kampung-kampung wisata yang telah ditetapkan untuk berkecimpung dalam usaha ekowisata. Bantuan-bantuan yang diberikan antara lain bangunan homestay dan perlengkapannya untuk kelompok usaha homestay, bantuan alat kerajinan cendera mata, pelatihan pemandu selam, dan pelatihan pemandu wisata. Jumlah dan persebaran kampung wisata di Kabupaten Raja Ampat (Tabel 5.2) sebagian besar daya tarik dan obyek wisata berada di KKP Selat Dampier, dan ada obyek dan daya tarik di luar KKP. Meskipun KKPD Misool Selatan merupakan KKPD terluas di Kepulauan Raja Ampat, hanya sedikit kampung wisata yang ditetapkan di KKP tersebut.

**TABEL 5.2. JUMLAH DAN PERSEBARAN KAMPUNG WISATA  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT, 2018**

No.	Kampung	Distrik	KKP
1.	Arborek	Meosmansar	Selat Dampier
2.	Yenwaupnor	Meosmansar	Selat Dampier
3.	Sauandarek	Meosmansar	Selat Dampier
4.	Arefi Selatan	Batanta Utara	Selat Dampier
5.	Yensawai Barat	Batanta Utara	Selat Dampier
6.	Friwen	Waigeo Selatan	Selat Dampier
7.	Yenbeser	Waigeo Selatan	Selat Dampier
8.	Saporkren	Waigeo Selatan	Selat Dampier
9.	Wawiyai	Waigeo Selatan	Selat Dampier
10.	Waibon	Salawati Barat	Selat Dampier
11.	Kaliam	Salawati Barat	Selat Dampier
12.	Wailebet	Batanta Selatan	Selat Dampier
13.	Selpele	Waigeo Barat	Waigeo Barat
14.	Salyo	Waigeo Barat	Waigeo Barat

**TABEL 5.2. JUMLAH DAN PERSEBARAN KAMPUNG WISATA  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT, 2018**

No.	Kampung	Distrik	KKP
15.	Manyaifun	Waigeo Barat Kepulauan	Waigeo Barat
16.	Meos Manggara	Waigeo Barat Kepulauan	Waigeo Barat
17.	Pam	Waigeo Barat Kepulauan	Di luar KKP
18.	Saukabu	Waigeo Barat Kepulauan	Di Luar KKP
19.	Saupapir	Waigeo Barat Kepulauan	Di Luar KKP
20.	Yellu	Misool Selatan	Misool Selatan
21.	Harapan Jaya	Misool Selatan	Misool Selatan
22.	Harapan Jaya	Misool Selatan	Misool Selatan
23.	Tomolol	Misool Timur	Misool Selatan
24.	Usaha Jaya	Misool Timur	Misool Selatan

Sumber: (BPS Kabupaten Raja Ampat, 2018) dan ("Profil KKP," n.d.)

Untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi menuju objek dan daya tarik wisata di Kepulauan Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memberikan bantuan kepada Koperasi Transwisata berupa speedboat dan motor tempel yang dioperasikan oleh OAP. Dengan demikian, Koperasi Transwisata memberikan manfaat ekowisata bagi OAP selain menyediakan sarana transportasi menuju objek daya tarik wisata. Koperasi Transwisata dibina oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

Pengelolaan KKP. Kawasan Konservasi Perairan Daerah secara resmi terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2007. Peraturan Bupati tersebut menunjuk kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sayang-Wayag, Kepulauan Ayau, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Kepulauan Kofiau dan Boo, dan Misool Timur Selatan sebagai KKPD. Selain menjalankan peran penting dalam perintisan KKP, CI dan TNC juga berperan penting dalam

pengelolaan KKPD. Peraturan Bupati menetapkan bahwa pengelolaan KKPD (termasuk perencanaan, perumusan zona-zona pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan) KKPD dikelola secara kolaboratif dengan melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait. Kedua LSM internasional tersebut merekrut anggota komunitas lokal untuk melakukan patroli dan pengawasan terhadap KKPD yang telah dibentuk. Wilayah kerja CI mencakup KKPD di bagian Utara Kepulauan Raja Ampat, meliputi KKPD Kepulauan Ayau, KKPD Teluk Mayalibit, KKPD Sayang-Wayag, dan KKPD Selat Dampier. Wilayah kerja TNC meliputi KKPD Kepulauan Kofiau dan Boo serta KKPD Misool Timur Selatan, yang berada di bagian Selatan Kepulauan Raja Ampat. Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2007 kemudian diganti oleh Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2008 (Rudyanto et al., 2016).

Kelembagaan pengelolaan jejaring KKPD secara resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2009. Sebuah UPTD di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan, yaitu UPTD-KKPD ditunjuk sebagai lembaga pengelola, yang di dalamnya terdapat lima sub unit pengelola untuk mengelola masing-masing KKPD. Peraturan Bupati tersebut kemudian diganti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2001, yang memasukkan Satuan Tugas Pengawasan dan Perlindungan Laut (Satgas P2L) yang melibatkan staff CI, TNC, COREMAP dan anggota komunitas lokal selain PNS Dinas Kelautan dan Perikanan dalam struktur pengelolaan UPTD-KKPD.

Pada Tahun 2014 UPTD-KKPD mendapat status pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan ditetapkannya Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2014. Status ini memberikan kewenangan kepada UPTD-KKPD untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai pola BLU, antara lain dapat mengelola langsung pendapatan tanpa harus disetorkan ke kas Negara, dapat mengelola surplus dan defisit anggaran, mengelola hutang-piutang dan mengelola investasi. Selain itu, dengan status BLU UPTD-KKPD dapat mempekerjakan pegawai non-PNS dan para professional. Dengan demikian, staff LSM dapat dilibatkan sebagai mitra dalam struktur UPTD-KKPD dan UPTD-KKPD dapat mengelola dana hibah dari pihak ketiga seperti dari Walton Famili Foundation.

Selain jejaring KKPD, juga terbentuk 40 DPL di 39 kampung melalui program COREMAP II. Program COREMAP II membentuk LPSTK untuk mengelola DPL yang telah terbentuk. Struktur LPSTK terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok masyarakat bidang produktif, kelompok masyarakat bidang konservasi dan kelompok masyarakat bidang pembinaan perempuan. Kelompok masyarakat bidang konservasi bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan DPL. Kegiatan LPSTK berhenti sejak selesainya program COREMAP II.

Pada Tahun 2005 seorang pengusaha asal USA memperoleh konsesi selama 25 tahun dari masyarakat adat Yellu di Misool Selatan untuk menjalankan usaha ekowisata, membangun resort (Misool Eco Resort) di Pulau Batbitim. Konsesi yang diperoleh tidak hanya mencakup wilayah darat, tapi juga kawasan perairan di sekitar pulau, seluas 40.000 ha termasuk Pulau Batbitim. Selain Pulau Batbitim, Misool Eco Resort juga memperoleh konsesi di Pulau Daram dan kawasan perairan, juga pulau-pulau kecil di sekitarnya dari tiga kelompok marga yaitu Macab, Wainsaf, dan Soltief. Dalam kesepakatan konsesi, pihak masyarakat adat selain menerima sejumlah uang, juga memperoleh program pengembangan masyarakat dan lapangan kerja. Sebagai imbalannya, masyarakat adat melepaskan hak untuk menggunakan kawasan konsesi yang disepakati, termasuk penangkapan ikan di kawasan perairan dan melepaskan hak untuk memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan tersebut. Kedua kawasan konsesi tersebut berada dalam KKPD Misool Selatan dan ditetapkan sebagai zona larang ambil (*no take zone*). Salah satu daya tarik ekowisata yang unik di Kepulauan Raja Ampat, khususnya di sekitar Pulau Arborek adalah menyaksikan manta (*manta watching*). Meningkatnya pengunjung yang melakukan penyelaman untuk melihat manta di sekitar Pulau Arborek telah meningkatkan kekhawatiran dampaknya terhadap manta. Untuk itu, CI bekerjasama dengan UPT-KKPD membentuk Pokja Manta, yang melibatkan anggota komunitas lokal di Pulau Arborek untuk mengatur dan mengawasi wisata selam untuk melihat Manta.



Selain berbagai tata kelola KKP sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat adat di berbagai kampung mempraktikkan sasi laut. CI dan TNC memberikan dukungan kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sasi laut di kawasan masing-masing.

Tarif masuk wisata dan pengelolaan objek daya tarik wisata. Meningkatnya kegiatan ekowisata di Kepulauan Raja Ampat oleh pengusaha dari luar Raja Ampat memberikan kesan bagi OAP bahwa sumber daya alam yang mereka miliki, serta kegiatan konservasi perairan hanya bermanfaat bagi pihak luar. Hal tersebut mendorong komunitas lokal di objek dan daya tarik wisata mengenakan pungutan kepada wisatawan dan operator ekowisata seperti liveboard. Untuk mengatasi hal tersebut, CI memfasilitas pertemuan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan operator ekowisata, khususnya Liveboard, untuk mengetahui kesediaan wisatawan membayar tarif masuk wisata (*willingness to pay*). Berdasarkan kesepakatan, wisatawan mancanegara dikenakan tarif masuk sebesar Rp 500.000,00 sedangkan wisatawan domestik dikenakan tarif masuk Rp 250.000,00. Tarif masuk wisata Raja Ampat diberlakukan mulai tahun 2007, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Retribusi Ijin Masuk Wisata di Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat didukung CI dan TNC melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif masuk tersebut, menyiarkan liveboard yang akan berlayar melalui radiogram RRI, sehingga wisatawan tidak dikenakan lagi pungutan oleh masyarakat di lokasi daya tarik wisata. Wisatawan diberi bukti pembayaran yang berlaku selama satu tahun kalender, yang berakhir pada akhir Bulan Desember tahun pembelian. Selain bukti pembayaran wisatawan juga diberi cendera mata.

Sebanyak 30 persen dari pendapatan yang diperoleh dari tarif masuk wisata dialokasikan untuk retribusi daerah yang disetor ke kas Negara. Sisanya dialokasikan menjadi 3 bagian: 40 persen untuk dana konservasi, 40 persen untuk dana masyarakat, dan 20 persen sisanya untuk dana manajemen tim pengelola tarif masuk wisata. Untuk melaksanakan Peraturan Bupati

tentang tarif masuk wisata, dibentuk tim pengelola dana pengembangan kepariwisataan non-retribusi bagi masyarakat Raja Ampat. Tim pengelola ini beranggotakan unsur-unsur Dinas Pariwisata, CI, TNC, operator homestay, dan Dinas Perikanan. Tim Pengelola diberi kewenangan untuk memungut tarif masuk wisata, menyetorkan retribusi ke kas Negara, melakukan seleksi proposal penggunaan dana konservasi dan dana masyarakat.

Dana masyarakat yang tersedia pada masa awal penerapan tidak terlalu banyak, sehingga didistribusikan dalam bentuk makanan tambahan, yaitu susu dan kacang hijau ke 75 kampung di Kepulauan Raja Ampat. Dalam perkembangannya, Tim pengelola mendistribusikan dana masyarakat untuk menunjang usaha ekowisata komunitas lokal, antara lain untuk kelompok homestay, rumah makan, sanggar seni, pos pengamatan burung dan kelompok pemandu wisata. Selain untuk usaha ekowisata, dana masyarakat dari tarif masuk wisata Raja Ampat juga disalurkan untuk kelompok PKK. Dana konservasi disalurkan untuk pembangunan pos-pos patroli laut, kegiatan patroli pengawasan KKP, kegiatan kebersihan kampung, penanaman bakau, konservasi penyu belimbing dan penyu hijau, monitoring *mooring buoy*, dan mendukung kegiatan Yayasan Kalabia.

Pada Tahun 2015 pengelolaan tarif masuk wisata Raja Ampat dialihkan dari Tim Pengelola kepada UPTD-KKPD setelah unit kerja di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat tersebut memperoleh status BLU. Pengalihan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014, tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan. Wisatawan domestik dikenakan tarif sebesar Rp 500.000,- sedangkan wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp 1.000.000,- yang berlaku selama satu tahun sejak wisatawan membayar tarif masuk wisata. Wisatawan diberi cendera mata dan bukti pembayaran serta sebuah kartu tanda masuk yang berlaku selama satu tahun.

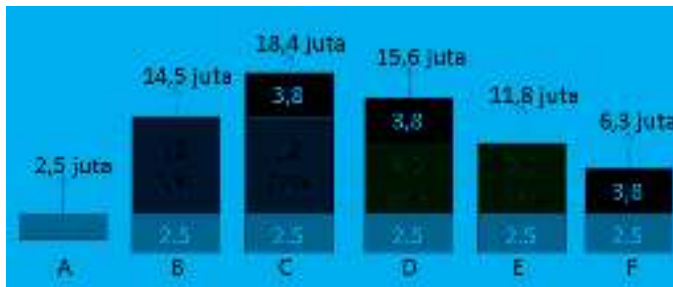
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014, 30 persen dari pendapatan tarif masuk wisata disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan daerah, sedangkan sisanya dikelola oleh UPTD-KKPD. Peraturan Bupati tersebut juga menetapkan bahwa dana sebesar Rp 1.500.000.000,- setiap tahunnya harus dialokasikan oleh UPTD-KKPD dari tarif pemeliharaan jasa lingkungan untuk dana masyarakat, yang dapat ditingkatkan jika pendapatan UPTD-KKPD memadai. Selain itu, UPTD-KKPD juga perlu menyusun prosedur penyaluran dana masyarakat tersebut.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Bupati tersebut UPTD-KKPD didampingi CI, TNC dan SR melakukan kajian untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan mengenai skema dan mekanisme penyaluran dana masyarakat. Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk Keputusan Kepala UPTD-KKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Jasa Pemeliharaan Lingkungan, dana masyarakat hanya dapat digunakan untuk kegiatan kelompok masyarakat dan pemerintah kampung. Skema dan mekanisme penyaluran dana masyarakat membagi dua kelompok besar alokasi dana masyarakat menjadi alokasi untuk kampung dan alokasi untuk kelompok masyarakat yang cakupannya lintas kampung. Alokasi dana masyarakat untuk kampung ditetapkan melalui SK Kepala UPTD-KKPD sebesar 95 persen dari total dana masyarakat, atau sebesar Rp 1.425.000.000,-, sedangkan 5 persen atau sebesar Rp 75.000.000,- sisanya dialokasikan untuk kelompok masyarakat lintas kampung.

Surat Keputusan Kepala UPTD-KKPD tentang skema dan mekanisme dana masyarakat menyatakan bahwa alokasi dana masyarakat untuk kampung didistribusikan ke semua kampung di Kabupaten Raja Ampat, kecuali Kelurahan Waisai Kota. Kampung-kampung di Kepulauan Raja Ampat dikelompokkan berdasarkan kedudukannya terhadap KKP dan kegiatan ekowista. Berdasarkan kedudukannya terhadap KKP kampung-kampung di

Kepulauan Raja Ampat dibedakan menjadi kampung di dalam KKP, kampung penyanggayang berimpitan dengan KKP dan kampung di luar KKP. Berdasarkan kegiatan ekowisata kampung-kampung dibedakan menjadi kampung wisata dan bukan kampung wisata. Kampung wisata adalah kampung-kampung yang ditetapkan sebagai Kampung Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan kampung-kampung yang diakui secara umum mendapat banyak kunjungan wisatawan. Skema alokasi dana masyarakat dirancang secara progresif, di mana setiap status kampung mendapat alokasi. Semua kampung, termasuk kampung-kampung di luar KKP mendapat alokasi sebesar Rp 2.500.000,-. Setiap tambahan status kampung mendapat tambahan alokasi. Dengan demikian, kampung yang memiliki status terbanyak akan mendapat alokasi dana masyarakat paling banyak. Alokasi paling kecil adalah untuk kampung di luar KKP, sedangkan alokasi terbanyak adalah untuk kampung di dalam KKP yang juga merupakan kampung wisata, sebesar Rp 18.400.000. Ilustrasi skema alokasi dana masyarakat dari tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan disajikan pada gambar 5.4.



**Gambar 5.4.** Skema alokasi dana masyarakat dari tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan

Keterangan:

- A : Kampung di luar kawasan konservasi
- B : Kampung di dalam kawasan konservasi
- C : Kampung wisata di dalam kawasan konseravasi
- D : Kampung wisata di kawasan penyangga
- E : Kampung di kawasan penyangga
- F : Kampung wisata di luar kawasan konservasi

Dana masyarakat disalurkan dalam bentuk natura berdasarkan usulan kampung atau kelompok masyarakat lintas kampung sesuai pagu dana yang dialokasikan untuk masing-masing kampung. Pemerintah Kampung bersama unsur-unsur masyarakat menentukan kegiatan yang akan didanai dengan dana masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh staff UPTD-KKPD bidang Ekonomi dan Penjangkauan di masing-masing KKPD, kemudian dirumuskan dalam fomulir proposal yang sudah disediakan oleh UPTD-KKPD. Alokasi dana masyarakat untuk kelompok masyarakat lintas kampung disalurkan melalui skema hibah kecil. Kelompok-kelompok masyarakat lintas kampung diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal untuk kemudian diseleksi oleh UPTD-KKPD.



**Gambar 5.5.** Bagan alir mekanisme pengusulan kegiatan kampung yang didanai dana masyarakat

Keputusan UPTD-KKPD mengenai mekanisme penyaluran dana masyarakat menentukan bahwa dana masyarakat hanya bisa dibelanjakan untuk pengadaan barang termasuk instalasi alat jika diperlukan, dan biaya pelatihan termasuk biaya konsumsi, dan untuk beasiswa pelajar atau mahasiswa. Pelatihan yang diberikan oleh UPTD-KKPD tidak dipungut biaya. Sub UPTD-KKPD di kawasan bertugas mengorganisir kegiatan pelatihan yang diusulkan oleh kampung untuk pelatihan yang tidak dapat diberikan langsung oleh UPTD-KKPD. Dengan demikian, secara garis besar terdapat dua mekanisme penyaluran dana masyarakat untuk kampung, yakni untuk belanja barang dan beasiswa, dan untuk kegiatan pelatihan. Bagan alir penyaluran dana masyarakat untuk pengadaan barang dan beasiswa disajikan pada Gambar 5.6, sedangkan untuk pelatihan disajikan pada Gambar 5.7. Pengadaan barang dan jasa oleh UPTD-KKPD dalam penyaluran dana masyarakat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan menyebabkan semua dana untuk masyarakat dapat dibelanjakan, tanpa mengurangi manfaatnya untuk biaya administrasi dan transportasi pengadaan. Namun demikian biaya penyaluran dana masyarakat menjadi jauh lebih besar dibanding dana masyarakat yang disalurkan.



**Gambar 5.6.** Bagan alir mekanisme penyaluran dana masyarakat untuk pengadaan barang dan beasiswa



**Gambar 5.7.** Bagan alir mekanisme penyaluran dana masyarakat untuk kegiatan pelatihan



**Gambar 5.8.** Mesin pangkur sagu usulan Kampung Tomolol didanai dana masyarakat Tahun 2016

Selain tarif masuk wisata bagi wisatawan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga mengenakan biaya ijin operasi liveaboard, kapal pesiar dan kapal layar pribadi berdasarkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2011. Biaya ijin operasi liveaboard dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijin operasi tahunan, dan ijin operasi sekali masuk. Kuota untuk operasi 40 liveaboard disediakan dengan ijin yang berlaku selama satu tahun. Biaya ijin operasi selama setahun dibedakan berdasarkan kepemilikan kapal, yakni kapal wisata berbendera Indonesia milik orang asing, dan kapal wisata berbendera Indonesia milik orang Indonesia dan berdasarkan kapasitas kapal, dengan kapasitas angkut tidak lebih dari 24 penumpang. Tarif ijin operasi tahunan untuk liveaboard disajikan pada Tabel 5.3. Tarif masuk untuk liveaboard sekali masuk adalah sebesar 25% dari ijin operasi liveaboard tahunan. Secara umum biaya ijin operasi kapal pesiar berbendera Indonesia milik orang asing dua kali lipat dari milik orang Indonesia. Tarif masuk untuk kapal pesiar (Yacht) adalah sebesar Rp 20.000.000,- sekali masuk yang berlaku untuk 20 hari, dan kapal layar pribadi Rp 1.000.000 yang berlaku untuk 10 hari. Penerimaan yang diperoleh dari tarif masuk liveaboard dan kapal pesiar disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan daerah.

**TABEL 5.3. BIAYA IJIN OPERASI LIVEBOARD TAHUNAN BERDASARKAN PERBUP RAJA AMPAT NO. 4 TAHUN 2011**

No.	Kepemilikan	Kapasitas	Biaya/tahun (Rp)
1.		10 orang atau kurang	10.000.000
2.	Orang Asing	11 - 16 orang	20.000.000
3.		17 - 24 orang	30.000.000
4.		10 orang atau kurang	5.000.000
5.	Orang Indonesia	11 - 16 orang	10.000.000
6.		17 - 24 orang	15.000.000



Mulai Tanggal 1 November 2019 ketentuan biaya ijin operasi liveboard diubah dengan meniadakan ijin operasional tahunan menjadi trip tunggal dan merubah struktur biaya berdasarkan kapasitas. Dengan demikian setiap liveboard wajib mengajukan dan membayar biaya ijin operasi setiap trip. Struktur biaya ijin operasional liveboard yang baru disajikan pada Tabel 5.4. Peraturan yang baru ini tidak menjelaskan apakah kuota 40 liveboard masih berlaku atau tidak.

**TABEL 5.4. BIAYA IJIN OPERASI LIVEBOARD TAHUNAN BERDASARKAN PERBUP RAJA AMPAT NO. 23 TAHUN 2019**

No.	Kepemilikan	Kapasitas	Biaya/trip (Rp)
1.		Kurang dari 10 orang	5.000.000
2.	Orang Asing	11-19 orang	10.000.000
3.		Lebih dari 20 orang	15.000.000
4.		Kurang dari 10 orang	2.500.000
5.	Orang Indonesia	11-19 orang	5.000.000
6.		Lebih dari 20 orang	10.000.000

Meskipun tarif masuk wisata dan distribusi dana masyarakat dari tarif masuk wisata telah ditetapkan, pungutan terhadap wisatawan maupun operator wisata masih berlangsung. Pungutan tersebut dilakukan baik oleh pemilik hak ulayat maupun perangkat kampung, terstruktur maupun tidak terstruktur. Pungutan yang tidak terstruktur yang dimaksud di sini adalah pungutan yang dikenakan sesuai kebutuhan kelompok pemilik hak ulayat, misalnya kedukaan, atau perayaan hari besar tertentu. Pungutan terstruktur sejauh ini diketahui hanya dilakukan oleh kelompok pemilik hak ulayat. Masyarakat pemilik adat Pulau Wayag menerapkan pungutan setiap kapal atau speedboat sebesar Rp 1.000.000,- sekali berkunjung, terlepas dari kapasitas kapal atau speedboat. Masyarakat adat pemilik hak ulayat Kali Biru, Teluk Mayapibit menerapkan pungutan sebesar Rp. 300.000,- – Rp. 500.000,- setiap kapal atau speedboat untuk sekali berkunjung.

Dinamika Tata Kelola Ekowisata. Pada bagian ini dibahas hubungan antara para pemangku kepentingan dalam tata kelola ekowisata di Kepulauan Raja Ampat. Tim pengelola dana pengembangan kepariwisataan non-retribusi bagi masyarakat Raja Ampat yang dibentuk pada Tahun 2007 untuk memungut dan mengelola tarif wisata Raja Ampat merupakan perwujudan kolaborasi antara para pemangku kepentingan ekowisata Kepulauan Raja Ampat. Tim yang diketuai Kepala Dinas Pariwisata ini dihasilkan dari konsultasi dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat obyek daya tarik wisata, dan beranggotakan unsur pemerintah, LSM, dan industri ekowisata. Tiga isu utama menyangkut kerja sama para pemangku kepentingan ekowisata ini adalah: manajemen organisasi, pengelolaan keuangan dan kewenangan. Tim pengelola tarif masuk wisata selain bertugas memungut tarif masuk wisata, juga melaksanakan pertemuan untuk membahas proposal masyarakat yang masuk untuk diseleksi dan didanai dengan dana masyarakat dan dana konservasi. Kedudukan para anggota yang berjauhan menyebabkan pertemuan anggota tim tidak selalu dapat terwujud. Selain itu, pihak LSM kadang-kadang mengutus staf yang tidak memiliki kewenangan membuat keputusan untuk mengikuti rapat, sehingga menyebabkan ketidakpastian pembuatan keputusan. Kedua hal tersebut mengganggu kegiatan tim pengelola yang memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, yaitu mendistribusikan dana masyarakat dan dana konservasi ke seluruh Raja Ampat. Meskipun tidak terdapat masalah hukum mengenai pengelolaan dana non-retribusi oleh Tim Pengelola. Pengelolaan dana secara langsung dari pendapatan negara tanpa melalui mekanisme penganggaran merupakan hal yang tidak lazim. Hal tersebut menyebabkan pihak Tim Pengelola dana menjalankan kegiatan penyaluran dana dengan sangat hati-hati untuk menghindari masalah hukum dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut menyebabkan penyaluran dana menjadi kurang lancar. Di satu pihak dana yang terkumpul belum terlalu banyak, di lain pihak penyaluran kurang lancar. Isu mengenai kewenangan berkaitan dengan tujuan pengelolaan tarif masuk wisata sebagai alternatif pendanaan pengelolaan kawasan konservasi. Meskipun beranggotakan staf Dinas Kelautan dan Perikanan, Tim Pengelola

dipandang tidak memiliki kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, sehingga perencanaan pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat langsung ditangani oleh Tim Pengelola.

Pengalihan pemungutan dan pengelolaan tarif masuk wisata dari Tim Pengelola kepada UPTD-KKPD yang telah memiliki status BLU dipandang mengatasi tiga isu berkaitan sebagaimana diuraikan di atas. Pengelolaan oleh satu lembaga dipandang memperlancar pengambilan keputusan, mekanisme keuangan BLU memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan dana secara langsung tanpa disetor lebih dahulu ke kas negara, dan perencanaan pengelolaan tarif masuk wisata dapat dikaitkan langsung dengan pengelolaan jejaring KKP. Mekanisme baru pemungutan dan pengelolaan tarif masuk wisata menunjukkan meningkatnya peran UPTD-KKPD dalam pengelolaan tarif masuk wisata, dan berkurangnya peran pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pariwisata dan industri ekowisata.

Dua LSM konservasi internasional yang beroperasi di Kepulauan Raja Ampat, yakni CI dan TNC memiliki peran yang sangat dominan dalam tata kelola ekowisata di Kepulauan Raja Ampat dan memiliki hubungan dengan hampir semua pemangku kepentingan. Dengan modal keahlian dan finansial, kedua LSM internasional tersebut menjalin hubungan kolaborasi dan kooperasi dengan berbagai pihak, dan sangat berpengaruh dalam mengarahkan bentuk tata kelola konservasi dan ekowisata yang sekarang berlangsung. Berbagai kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam bidang kelautan dan perikanan, konservasi perairan dan ekowisata dirumuskan dengan pendampingan dan fasilitasi oleh kedua LSM tersebut. Pengalihan pengelolaan tarif wisata menyebabkan peran kedua LSM tersebut lebih menonjol dibanding pada waktu berlakunya Tim Pengelola. Sebagai mitra pendamping, kedua LSM tersebut berada dalam struktur UPTD-KKPD. Karena UPTD-KKPD adalah otoritas pengelola KKP, maka keberadaan LSM dalam struktur UPTD-KKPD memberikan kekuatan otoritas bagi LSM dalam pengelolaan KKP.

Mekanisme penyaluran dana masyarakat dan dana konservasi didasarkan pada proposal masyarakat yang diajukan kepada Tim Pengelola atau ke instansi lain yang kemudian dilanjutkan ke Tim Pengelola. Tidak semua anggota masyarakat kampung memiliki informasi mengenai ketersediaan dana, sehingga hanya mereka yang memiliki informasi yang dapat mengakses dana-dana tersebut. Mekanisme penyaluran dana masyarakat berdasarkan peraturan UPTD-KKPD dipandang memberikan peran lebih besar kepada komunitas lokal untuk menentukan kegiatan yang didanai dari dana masyarakat yang berasal dari tarif masuk wisata.

Pada masa berlakunya Tim Pengelola, sejumlah dana disalurkan untuk mendukung usaha kelompok *homestay*. Selain dana masyarakat dari tarif masuk wisata, kelompok *homestay* juga mendapat aliran dana dari APBD untuk membangun *homestay*. Pada saat ini hampir semua *homestay* merupakan usaha perorangan yang dimiliki oleh satu keluarga. Hanya sebagian kecil yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa keluarga beradik-kakak. Hal tersebut menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan industri *homestay* yang berbasis komunitas. Pada saat ini usaha *homestay* yang semula milik kelompok masyarakat telah bergeser menjadi usaha yang dimiliki oleh keluarga pemilik hak ulayat di tempat *homestay* tersebut dibangun. Meskipun secara kebijakan pengembangan industri *homestay* oleh pemerintah dapat dipandang sebagai kebijakan ekowisata berbasis komunitas karena membatasi pemilikan *homestay* hanya oleh OAP, dari segi pengelolaan usaha *homestay* merupakan usaha swasta. Keberhasilan sejumlah usaha *homestay* telah mendorong tumbuh pesatnya usaha *homestay* di Kepulauan Raja Ampat.

Menurut Peraturan Bupati No. 3 tahun 2011 *homestay* adalah penyediaan kamar-kamar dalam bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya sehingga wisatawan dapat berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Nomenklatur tersebut sesuai dengan standar *homestay* ASEAN (ASEAN Secretariat, 2016). Dalam praktiknya *homestay* yang beroperasi di Kepulauan Raja Ampat lebih menyerupai *ecolodge*, di mana kehidupan

sehari-hari pemiliknya pada musim wisata adalah pengusaha akomodasi. Hal tersebut disebabkan karena homestay dibangun di luar kawasan kampung sehingga terpisah dari kehidupan masyarakat kampung. Tatanan tersebut terbentuk akibat karakteristik wisata selam yang tidak membutuhkan kontak dengan masyarakat dan kehidupan masyarakat, juga untuk menghindari benturan budaya antara wisatawan selam yang mengenakan busana yang minim pada waktu berwisata dengan budaya lokal. Di kampung-kampung yang terletak di pulau yang kecil dimana kontak antara wisatawan dan masyarakat tidak dapat dihindarkan seperti di Kampung Arborek, terdapat peringatan kepada wisatawan mengenai sopan santun berbusana ketika memasuki kampung, seperti contoh pada Gambar 5.9.



**Gambar 8.** Peringatan kepada wisatawan agar menjaga sopan santun berbusana ketika memasuki kampung Arborek.

Asosiasi Homestay Raja Ampat memainkan peran penting dalam industri homestay di Kepulauan Raja Ampat. Asosiasi ini sangat dinamis, telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. SeventyThree dan seorang sukarelawan memiliki peran dominan dalam pengelolaan asosiasi

homestay. *SeventyThree* berperan penting dalam pendampingan dan pelatihan kepada operator homestay dalam bidang pengelolaan homestay, dan bersama-sama Asosiasi Homestay Raja Ampat menetapkan standar homestay. Asosiasi *homestay* memiliki portal pemasaran yang memberikan akses pasar internasional kepada operator *homestay*. Kesempatan mendapatkan pelatihan, dan terutama akses pasar internasional menjadi alasan operator *homestay* bergabung dan mematuhi ketentuan-ketentuan asosiasi. Meskipun pada awalnya *SeventyThree* terlibat dalam pengembangan kapasitas OAP bersama-sama CI, TNC dan SR, pada akhirnya ketiga lembaga terakhir ini tidak memiliki hubungan kerjasama dengan *SeventyThree*, meskipun CI masih menyediakan tenaga pendampingan untuk melakukan pendampingan kepada operator homestay apabila diperlukan.

Pemungutan tarif masuk oleh kelompok masyarakat pemilik hak ulayat mencerminkan penggunaan kewenangan adat untuk mengatur tata kelola ekowisata di wilayah adat mereka. Seperti halnya Pemerintah yang memungut tarif masuk wisata dan liveboard memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada yang tidak membayar, kelompok masyarakat adat yang memungut tarif masuk ke wilayah adatnya juga memiliki kekuatan yang efektif untuk menolak wisatawan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara adat. Lebih jauh, kedua kelompok masyarakat adat tersebut juga memiliki kekuatan efektif untuk mengatur mekanisme pemanfaatan sumber daya alam oleh wisatawan. Kelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat Pulau Wayag mewajibkan wisatawan untuk singgah di Kampung Selpele membayar tarif masuk terlebih dahulu sebelum menuju Pulau Wayag. Ketika memasuki kawasan ekowisata Pulau Wayag kapal wisata atau speedboat diwajibkan melapor ke pos pengawasan KKP sebelum menuju lokasi obyek daya tarik wisata. Kapal atau speedboat yang masuk ke Pulau Wayag sebelum membayar akan ditolak masuk dan diperintahkan untuk membayar tarif masuk ke Kampung Selpele. Kelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat Kali Biru di Teluk Mayalibit mengatur siapa yang boleh mengantarkan tamu ke obyek daya tarik ekowisata tersebut. Pemilik hak ulayat Kali Biru memiliki prioritas mengantarkan tamu dari Kampung Warsambin. Wisatawan yang berkunjung ke

Kali Biru tidak diwajibkan melapor dulu ke pemilik hak ulayat di Kampung Warsambin, tapi dapat menitipkan tarif masuk wisata Kali Biru ke operator speedboat atau longboat yang mereka gunakan. Anggota masyarakat lain dibolehkan mengantar tamu ke Kali Biru jika pemilik hak ulayat sedang tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk mengantar tamu.

Tata kelola ekowisata sebagaimana yang terjadi di kawasan ekowisata Pulau Wayag maupun Kali Biru dapat dipandang sebagai tata kelola ekowisata berbasis komunitas. Namun demikian, tatakelola ekowisata berbasis komunitas tersebut tidak membentuk jaringan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lain, seperti misalnya Dinas Pariwisata atau UPTD-KKPD. Peran komunitas lokal dalam hal ini masyarakat adat pemilik hak ulayat sangat dominan dibanding para pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan wisatawan dan operator ekowisata tampak cukup tinggi terhadap tata kelola berbasis komunitas tersebut.

Trayek liveaboard selama ini diawali dari Kota Sorong sebagai gerbang wisatawan memasuki kawasan ekowisata Raja Ampat. Liveaboard segera memulai perjalanan wisata setelah wisatawan mendarat di Bandara Kota sorong dan memasuki kapal. Pada umumnya trayek liveaboard hanya mengunjungi obyek daya tarik wisata selama atau trekking di luar kampung, sehingga hubungan dengan masyarakat kampung sangat minim dibanding operator ekowisata lainnya. Sebagai upaya meningkatkan dampak langsung liveaboard kepada komunitas lokal, Dinas Pariwisata mendesak pemilik liveaboard untuk berkomitmen dalam gagasan program yang dinamai "one liveaboard one village". Pemilik liveaboard diminta memberi komitmen untuk melakukan program pengembangan masyarakat berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekowisata, dengan skema satu liveaboard membina satu kampung. Untuk memastikan komitmen operator liveaboard, pengurusan ijin operasi liveaboard hanya boleh dilakukan oleh pemilik, sehingga pemilik dapat diminta komitmennya pada waktu pengajuan ijin tersebut. Para responden operator liveaboard menyatakan sangat berminat

untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan kapasitas OAP, namun belum diperoleh kesepakatan mengenai format yang praktis untuk melaksanakannya. Pengaturan ini belum berjalan efektif, dan tidak terlihat peran asosiasi kapal wisata Jangkar, atau upaya untuk melibatkan peran asosiasi tersebut untuk bekerjasama dalam mewujudkan gagasan tersebut.

### **5.3. Konteks kerentanan**

Faktor internal tata kelola ekowisata seperti perubahan kebijakan dan dinamika sosial politik dapat mempengaruhi tata kelola ekowisata dan menimbulkan risiko bagi industri ekowisata secara makro maupun mikro. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika sosial politik di tempat asal wisatawan, dan faktor iklim juga dapat menimbulkan risiko bagi industri ekowisata.

UPTD-KKPD pada awal berdirinya merupakan organisasi pemerintah di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Pada tahun 2017 kewenangan urusan kelautan dan kehutanan dialihkan dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Dengan demikian, Kabupaten Raja Ampat tidak lagi memiliki kewenangan urusan kelautan, dan Dinas Kelautan Perikanan berubah menjadi Dinas Perikanan yang tidak memiliki kewenangan pengelolaan KKP. Kedudukan UPTD-KKPD dialihkan dari organisasi kerja di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat menjadi organisasi kerja di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Proses peralihan tersebut membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar kerja UPTD-KKPD mengelola ekowisata di Kabupaten Raja Ampat. Konflik sosial seperti kerusuhan di Tanah Papua secara umum dapat menyebabkan pembatalan perjalanan wisata ke Raja Ampat.



Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Raja Ampat adalah wisatawan mancanegara. Isu-isu keamanan mancanegara seperti terorisme dapat menyebabkan menurunnya jumlah pelancong yang mempengaruhi pendapatan operator ekowisata, termasuk OAP yang berkecimpung dalam bidang ekowisata.

Ekowisata bahari pada umumnya dipengaruhi oleh musim, selain seperti industri wisata lain pada umumnya yang juga dipengaruhi siklus kegiatan wisatawan di negaranya seperti libur sekolah atau libur kerja. Sifat musiman yang mencolok dari ekowisata Raja Ampat menyebabkan pada bulan-bulan sepi wisatawan pendapatan OAP yang berkecimpung dalam bidang ekowisata. Perubahan iklim merupakan isu eksternal yang dapat berdampak serius kepada industri ekowisata. Perubahan iklim seperti pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang yang merupakan sumber daya yang menjadi modal dasar ekowisata bagi OAP.

# 6

## PENUTUP

Orang Asli Papua yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Kaimana, Raja Ampat dan Pegunungan Arfak jumlahnya relatif sedikit namun menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak kesejahteraan atas pemanfaatan aset alam yang dijaga berdasarkan modal sosial yang dimiliki secara turun-temurun. Karena hidup dalam kawasan konservasi maka “ruang gerak” menjadi terbatas sebab secara *de jure* ada aturan-aturan yang membatasi akses.

Namun mereka memiliki aset penghidupan berupa aset alam, aset fisik, aset sumberdaya manusia, aset sosial dan aset finansial yang bervariasi dalam jumlah dan kualitas, tetapi telah mampu mendorong roda perekonomian daerah ke arah pertumbuhan yang positif dan menciptakan perubahan sosial dalam kehidupan mereka. Hanya saja perubahan sosial dan nilai manfaat ekonomi yang dirasa baru berada pada tingkat fondasi dan belum terdistribusi secara merata bagi semua OAP.

Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola pariwisata berbasis konservasi yang afirmatif merupakan salah satu jalan menuju peningkatan manfaat ekowisata, terutama liveboard dan resort di wilayah Raja Ampat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana stakeholders pariwisata berkolaborasi

meningkatkan akses pasar bagi pelaku wisata OAP di kawasan-kawasan wisata yang miskin pengunjung namun memiliki atraksi yang luar biasa. Kapabilitas pengusaha wisata berbasis konservasi seperti pemilik homestay harus ditingkatkan untuk memberikan layanan kelas resort sehingga mencegah tumbuhnya wisata masal.

Dalam konteks akselerasi manfaat yang adil dan merata diantara OAP maka upaya membangun kaitan ekonomi antara ekowisata dengan sektor ekonomi lain, terutama pertanian perlu ditingkatkan agar komunitas lokal yang tidak terlibat langsung dalam ekowisata juga mendapat manfaat ekowisata.

Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan harus bisa memastikan bahwa usaha di sektor pariwisata memiliki prospek dan memiliki *forward linkage* dan *backward linkage*. Jadi apabila kebijakan yang dihasilkan mematikan usaha pariwisata maka itu itu berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus berkolaborasi dalam perencanaan terintegrasi untuk mempersiapkan sektor lain dalam menciptakan dukungan (*linkage*) bagi bertumbuhnya pariwisata berbasis konservasi di Papua Barat.

Secara ekonomi, matinya usaha pariwisata berarti musnahnya efek pengganda (ouput dan input) dari kegiatan-kegiatan terkait. Jika tidak dipertimbangkan secara matang, maka permasalahan ekonomi ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial yang makin meluas, demikian juga dari aspek lingkungan akan mengancam keselamatan kawasan-kawasan konservasi.

## PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
- Agostini, V.N., Granth, H.S., Wilson, J., Mangubhai, S., Rotinsulu, C., Hidayat, N., Muljadi, A., Muhajir, Mongdong, M., Darmawan, A., Rumatna, L., Erdmann, M.V., Possingham, H.P., 2012. *Achieving Fisheries and Conservation Objectives within Marine Protected Areas: Zoning the Raja Ampat Network (No. 2/12)*, Indo-Pacific Division. The University of Queensland, Indonesia.
- Arman, A., 2014. *Derap Langkah Kepemimpinan Marinda Dalam Membangun Raja Ampat 2005-2015*. Nala Publishing House.
- ASEAN Secretariat, 2016. *ASEAN-Homestay-Standard*.
- Atmodjo, E., Lamers, M., Mol, A., 2017. Financing marine conservation tourism: Governing entrance fees in Raja Ampat, Indonesia. *Marine Policy* 78, 181–188. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.01.023>
- BBKSDA Papua Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [WWW Document], n.d. . BBKSDA Papua Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. URL <https://bbksda-papubarat.com/kawasan-konservasi/kawasan-konservasi/> (accessed 10.28.19).
- BPS Kabupaten Raja Ampat, 2018. *Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2018*.
- Damanik J dan Weber HF. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta
- Della Corte, V., Aria, M., Del Gaudio, G., 2018. Strategic governance in tourist destinations. *Int J Tourism Res* 20, 411–423. <https://doi.org/10.1002/jtr.2192>
- FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006). "Food Security" (PDF) (2). Diakses tanggal June 8, 2012.

- Fandeli C, Nurdin M. 2005. Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
- Food self-sufficiency rate fell below 40% in 2010 , Japan Times, Aug. 12, 2011
- Freeman, R.E., 1984. Strategic management: a stakeholder approach, Pitman series in business and public policy. Pitman, Boston.
- Konservasi SDA Raja Ampat [WWW Document], n.d. . Konservasi SDA Raja Ampat. URL <http://ksdarajaampat.blogspot.com/p/kawasan-konservasi.html> (accessed 10.28.19).
- Larson, A., Ribot, J., 2004. Democratic decentralisation through a natural resource lens: an introduction. The European Journal of Development Research 16, 1–1. <https://doi.org/10.1080/09578810410001688707>
- McKenna, S.A., Allen, G.R., Suryadi, S., 2002. A Marine Rapid Assessment of The Raja Ampat Island, Papua Province, Indonesia. RAP Bulletin of Conservation 22. Conservation International, Washington, DC.
- Mustaghfirin, Urbinas, M.P., Urbasa, F., Erdman, M.V., Mangubhai, S., Fox, M., Khazali, M., Rumetna, L., Nebore, A., Thebu, K., Setyawan, D., Mongdong, M., Djunaidi, A., Wamafma, K., Maturbongs, J., Purwanto, Muhajir, Hidayat, N.I., Gaman, A.G., Sabonna, S., 2012. Rencana Pengelolaan Taman Pulau-pulau Kecil Daerah Raja Ampat. UPTD KKPD Kabupaten Raja Ampat.
- Profil KKP [WWW Document], n.d. . Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.
- Randan, N., 2011. Analisis dampak penetapan kawasan konservasi laut daerah kondisi sosial ekonomi nelayan (kasus daerah perlindungan laut kampung Saporkren, Distrik Waigeo Selatan, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat). Bogor Agricultural University, Bogor.
- Rudyanto, Rumetna, L., Setyawan, D., Prabowo, N.A., 2016. Dokumentasi Proses dan Pembelajaran Pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. The Nature Conservancy.

- Saputra, 2014. Peran Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. ETD UGM, Yogyakarta.
- Scott, N., Marzano, G., 2015. Governance of tourism in OECD countries. *Tourism Recreation Research* 40, 181–193. <https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1041746>
- Sedarmayanti. 2005. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung (ID): Penerbit Mandar Maju.
- Soemarwoto O. 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
- Tafalas M. 2010. *Dampak Pengembangan Ekowisata terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat lokal studi kasus ekowisata bahari Pulau Mansuar Kabupaten Raja Ampat [tesis]*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tuwo A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya (ID): Brilian Internasional.
- UNIPA & WWF Amerika. 2018. *Monitoring Dampak Sosial dari Daerah Perlindungan Laut di Jejaring KKP Kaimana*. LP2M-UNIPA
- UNIPA & WWF Amerika. 2018. *Monitoring Sosial Daerah Perlindungan Laut Di Jejaring KKP Raja Ampat*. LP2M-UNIPA
- UPTD-KKPD Raja Ampat, 2015. *Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD UPTD KKPD Raja Ampat 2015*.
- Waimbo, D.E., 2012. *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Keterlibatan Masyarakat & Peran Pemimpin Lokal di Kampung Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat (Master Thesis)*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Waligo, V.M., Clarke, J., Hawkins, R., 2013. Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management* 36, 342–353. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008>
- WWF Indonesia. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta (ID): WWF.